

**KAJIAN PARTISIPASI PENERIMA MANFAAT DANA
BERGULIR PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERKOTAAN DI KELURAHAN TAWANG MAS
KOTA SEMARANG**

TESIS

Disusun dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

**MOHAMAD ANUGRAH HAMONANGAN
L4D 007 011**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

**KAJIAN PARTISIPASI PENERIMA MANFAAT DANA
BERGULIR PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERKOTAAN DI KELURAHAN TAWANG MAS
KOTA SEMARANG**

Tesis Diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

**MOHAMAD ANUGRAH HAMONANGAN
L4D 007 011**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 26 Januari 2010

Dinyatakan lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 26 Januari 2010

Tim Penguji:

Dr. -Ing. Asnawi, ST-Pembimbing I
Wido Prananing Tyas, ST, MDP-Pembimbing II
Wakhidah Kurniawati, ST, MT-Penguji I
Ir. Sunarti, MT-Penguji II

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, M.Sc

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelas kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan Saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, Januari 2010

MOHAMAD ANUGRAH HAMONANGAN

NIM. L4D 007 011

Pelajarilah ilmu.
Barangsiapa mempelajarinya karena Allah, itu taqwa.
Menuntutnya, itu ibadah.
Mengulang-ulang itu tasbih.
Membahasnya itu jihad.
Mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu, itu sedekah.
Memberikannya kepada ahlinya, Itu mendekatkan diri kepada Tuhan.
(Abusy Syaikh Ibnu Hibban dan Ibnu Abdil Barr, Ilya Al-Ghozali, 1986)

Sukses adalah hasil 1% yang berasal dari 99% kegagalan.
(Soichiro Honda)

Kebanyakan orang gagal meraih cita-citanya bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena tidak berkomitmen.
(Zig Ziglar)

Tesis ini kupersembahkan untuk :

**Papa dan Inangku tercinta : Chairudin
Parlaungan Siregar dan**

Sri Sumiyati Harahap

**Istriku tercinta : Sekar Netta Annaswuri,
S.Pd.**

**Anak-anakku tercinta : Naura Nabila Pamursita
dan Raihana Yumna Widyadana**

**Kakak dan Adikku tercinta : Kurnia Pinayungan,
SE.Akt dan**

Yunita Wahyu Nirmala, SE.

Tak lupa untuk teman-teman MTPWK.

\

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT sehingga pada saat ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Kajian Partisipasi Penerima manfaat Dana Bergulir Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Tawang Mas Kota Semarang” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan dan menempuh Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota (MTPWK) Universitas Diponegoro Semarang.

Selesainya tesis ini tidak lepas dari peranan dan dukungan yang telah diberikan, dan pada kesempatan yang berbahagia ucapan terima kasih disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, M.Sc. selaku Ketua Program
2. Bapak Dr. Ing. Asnawi Manaf, ST selaku pembimbing utama.
3. Ibu Wido Prananing Tyas, ST. MDP selaku pembimbing pendamping.
4. Ibu Ir. Artiningsih, MT selaku pembahas.
5. Ibu Dr. Ari Pradanawati selaku pembahas.
6. Istri dan anak-anak, keluarga yang sangat saya cintai dan banggakan: Sekar Netta Annaswuri, S.Pd, Naura Nabila Pamursita, Raihana Yumna Widyadana yang telah memberikan semangat, dukungan, doa dan waktunya.
7. Pimpinan dan jajaran PUSBINDIKLATREN BAPENAS di Jakarta.
8. Pimpinan dan rekan-rekan kerja di Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang yang telah memberikan bantuan dan motivasi.
9. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa MTPWK Kelas Bapenas IV Angkatan 2007.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu mohon kritik dan saran untuk kesempurnaannya. Terima kasih.

Semarang, Januari 2010

Penyusun,

Mohamad Anugrah Hamonangan

RIWAYAT HIDUP



MOHAMAD ANUGRAH HAMONANGAN, dilahirkan tanggal 24 Juli 1977 di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari Ayahanda Chairudin Parlaungan Siregar dan Ibunda Sri Sumiyati Harahap. Jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ditempuh di Kota Semarang yang diselesaikan pada tahun 1996.

Sedangkan untuk jenjang pendidikan Sarjana (S1) ditempuh di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dipanegara Makassar yang diselesaikan pada tahun 2002. Pengalaman kerja diantaranya Tahun 1996 sampai dengan tahun 2001 bekerja sebagai *customer service* di PT. Kahar Duta Sarana perwakilan Makassar yang bergerak dalam bidang supplier peralatan untuk Ritel. Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2002 bekerja sebagai *IT Support* PT. Deltatama Mitra Sejahtera Makassar yang bergerak dalam bidang Ritel. Pada Tahun 2002 sampai dengan sekarang tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang yang kemudian pada Tahun 2007 diberi kesempatan mengikuti Tugas Belajar pada Program Pasca Sarjana di Megester Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota di Universitas Diponegoro Semarang.

Saat mengikuti tugas belajar pada Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota kerjasama Pusbindiklatren Bappenas-Universitas Diponegoro Semarang, penulis sudah berkeluarga dengan Sekar Netta Annaswuri, SPd. dan alhamdulillah sudah dikaruniai dua orang putri bernama Naura Nabila Pamursita (5 tahun) dan Raihana Yumna Widyadana (1 tahun).

ABSTRAK

Pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Kemiskinan merupakan suatu fenomena sosial yang tidak pernah berhenti diupayakan oleh pemerintah untuk ditanggulangi dan diatasi. Masalah kemiskinan kota ditambah terjadinya krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 menimbulkan lonjakan pengangguran dan kemiskinan di perkotaan. Pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan pada saat pasca krisis ekonomi telah merancang dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan yang berdasarkan prinsip partisipatif melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), pada penelitian ini difokuskan tentang kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir dalam P2KP. Program P2KP di Kelurahan Tawang Mas mendapat tanggapan yang baik dari warganya dengan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam usahanya mengentaskan kemiskinan. Permasalahan yang muncul adalah masih rendahnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir P2KP. Dana yang digulirkan akan terus digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif dan pembangunan sarana prasarana dasar lingkungan bagi warga masyarakat serta diharapkan dapat berkelanjutan sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana bergulir tersebut dikelola dalam sistem simpan pinjam dana bergulir. Kelompok masyarakat yang memanfaatkan dana simpan pinjam tersebut wajib mengembalikan kepada pengelola yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), untuk menjaga kelangsungan perguliran dana.

Berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian untuk memahami partisipasi penerima manfaat pada proses pencairan dan pemanfaatan dana bergulir Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan sampel secara *non probability sampling* dengan teknik *purposive* dan *snowball sampling*, sehingga diperoleh 96 narasumber, yang terdiri dari orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan P2KP. Analisis yang dilakukan adalah kesesuaian konsep dan implementasi pencairan dan pemanfaatan dana bergulir pada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Tawang Mas dan partisipasi penerima manfaat, yaitu anggota KSM dalam program tersebut.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tahapan pelaksanaan pencairan dana bergulir telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman, namun ada penyimpangan pada pemanfaatan dana bergulir program. Tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir adalah positif, karena sebagian besar KSM menyatakan sangat mendukung program tersebut, dengan kesadaran akan manfaat dana bergulir ini mereka berpartisipasi, sebagian besar KSM memberikan bentuk sumbangan berupa pemikiran dan bersedia bertanggung jawab dalam mengembalikan pinjaman dana bergulir. Tetapi sangat disayangkan bahwa intensitas kehadiran anggota KSM pada setiap kegiatan dan kesediaan untuk tanggung renteng masih rendah. Semua KSM berperan serta memberikan usulan terkait kegiatan pelaksanaan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir ini merupakan kegiatan yang aspiratif. Peran Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Tawang Mas terhadap pelaksanaan kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP berada pada tingkatan *delegated power* sesuai dengan tingkatan partisipasi Arstein.

Kata Kunci : Partisipasi masyarakat, Pencairan dan Pemanfaatan dana bergulir, Tawang Mas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2 Sasaran Penelitian	4
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4.1 Ruang Lingkup Substansial.....	5
1.4.2 Ruang Lingkup Spasial	5
1.5 Kerangka Pemikiran.....	5
1.6 Metode Penelitian... ..	8
1.6.1 Pendekatan Penelitian.....	8
1.6.2 Kerangka Analisis.....	8
1.6.3 Kebutuhan Data.....	8
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.6.5 Teknik Sampling.....	14
1.6.6 Teknik Analisis.....	17
1.7 Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KAJIAN LITERATUR	
2.1 Kemiskinan Perkotaan	23
2.2 Pemberdayaan Masyarakat.....	26
2.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.....	31
2.4 Sintesis Literatur.....	44
2.5 Variabel Penelitian.....	47
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH KELURAHAN TAWANG MAS DAN PROGRAM P2KP	
3.1 Keadaan Umum Kelurahan Tawang Mas	51
3.1.1 Keadaan Geografis	51
3.1.2 Keadaan Demografi.....	51
3.1.3 Keadaan Sosial Ekonomi.....	53
3.2 Gambaran Umum Program P2KP.....	55

3.2.1 Pengertian, Tujuan dan Sasaran P2KP.....	55
3.2.2 Pelaksanaan Program P2KP.....	56
3.2.3 Pelaksanaan Pencairan dan Pemanfaatan Dana Bergulir.....	68
BAB IV ANALISIS PARTISIPASI KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) PADA PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BERGULIR PROGRAM P2KP DI KELURAHAN TAWANG MAS	
4.1 Identifikasi Pencairan dan Pemanfaatan Dana Bergulir P2KP di Kelurahan Tawang Mas.....	73
4.2 Kajian partisipasi Kelompok Swadaya Masyarakat pada Pencairan dan Pemanfaatan Dana Bergulir	89
4.3 Menganalisa Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pencairan dan Pemanfaatan Dana Bergulir.....	100
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1 Kesimpulan.....	111
5.2 Rekomendasi.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN.....	119

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Hubungan Antara Analisis, Data dan Variabel.....	10
Tabel I.2	: Jabaran Kriteria Peran Dalam Tingkatan Partisipasi.....	11
Tabel I.3	: Jenis dan Jumlah Narasumber.....	16
Tabel II.1	: Kriteria dan Garis Kemiskinan Perkotaan.....	25
Tabel II.2	: Sintesis Literatur.....	44
Tabel II.3	: Variabel Penelitian.....	45
Tabel III.1	: Jumlah Penduduk Tawang Mas Menurut Kelompok Umur.....	52
Tabel III.2	: Jumlah Penduduk Menurut Golongan Agama yang Dianut.....	53
Tabel III.3	: Tingkat Pendidikan Penduduk di Kelurahan Tawang Mas.....	54
Tabel III.4	: Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Tawang Mas.....	54
Tabel III.5	: Distribusi Alokasi Dana BLM.....	66
Tabel IV.1	: Pemanfaatan Dana Bergulir.....	79
Tabel IV.2	: Pemanfaatan Dana Bergulir Anggota KSM yang Tidak Punya Usaha	81
Tabel IV.3	: Jumlah Nominal Dana Bergilir Untuk Kelangsungan Usaha	82
Tabel IV.4	: Tingkat Pengembalian Pinjaman.....	83
Tabel IV.5	: Tingkat Kemanfaatan.....	85
Tabel IV.6	: Perbandingan Program Dengan Kondisi Riil.....	86
Tabel IV.7	: Sikap Sosial Masyarakat.....	90
Tabel IV.8	: Motivasi KSM.....	91
Tabel IV.9	: Intensitas Kehadiran Dalam Pelaksanaan Setiap Kegiatan.....	92
Tabel IV.10	: Bentuk Sumbangan.....	94
Tabel IV.11	: Kesiediaan Bertanggung jawab.....	96
Tabel IV.12	: Usulan Kegiatan.....	98
Tabel IV.13	: Ide awal terbentuknya KSM.....	100
Tabel IV.14	: Kewenang KSM Dalam Mengelola Kegiatan.....	101
Tabel IV.15	: Kewenangan KSM Dalam Membuat Keputusan.....	102
Tabel IV.16	: Peran Pemerintah Kelurahan.....	103
Tabel IV.17	: Peran Pemerintah Dalam Pemecahan Masalah.....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kelurahan Tawang Mas.....	6
Gambar 1.2	Kerangka Pikir.....	7
Gambar 1.3	Kerangka Analisis.....	9
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Pelaksanaan P2KP.....	63
Gambar 4.1	Pencairan Dana Bergulir program P2KP.....	78
Gambar 4.2	Pemanfaatan Dana Bergulir program P2KP.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah yang berkewajiban untuk mengarahkan dan membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang (Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999).

Sehubungan dengan pemberlakuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada Tahun 2001, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan setempat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Dalam kewenangan otonom yang dimiliki oleh daerah, melekat pula kewenangan dan sekaligus tanggung jawab untuk secara proaktif mengupayakan kebijakan penanggulangan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanggung jawab yang dimaksud adalah merupakan konsekuensi logis dari salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah, yakni menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih baik, efektif dan efisien, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Pesatnya pembangunan fisik khususnya di kota-kota besar dan metropolitan di Indonesia yang pada masa sebelum krisis ekonomi saja telah menunjukkan indikasi berlangsungnya “*unsustainable development*” (pembangunan kota yang tak berkelanjutan) telah menyebabkan kehidupan masyarakat di kota-kota besar semakin tidak nyaman (Soegijoko:2003).

Salah satunya adalah kemiskinan perkotaan. Kemiskinan merupakan suatu fenomena sosial yang tidak pernah berhenti diupayakan oleh pemerintah untuk ditanggulangi dan diatasi. Pemerintah Kota Semarang telah merilis dan menerapkan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang, untuk memerangi kemiskinan sekaligus memenuhi hak-hak dasar warga miskin.

Penduduk miskin di Kota Semarang bertambah dari tahun ke tahun, krisis moneter dan ekonomi tahun 1997 menyebabkan lonjakan pengangguran dan penduduk miskin. Pada tahun 2004, penduduk miskin di Kota Semarang berjumlah 18,45% terdiri dari jumlah penduduk pra sejahtera sebanyak 59.550 KK dan jumlah penduduk keluarga sejahtera I berjumlah 322.734 KK. Secara proporsional bagian utara dari kota Semarang yaitu: Kecamatan Semarang Utara, Genuk, Tugu merupakan kantong kemiskinan yang relatif besar (37,19%) dari keseluruhan penduduk miskin. Pada tahun 2007 mencapai 122.029 KK, dan meningkat tahun 2009 menjadi 136.000 KK.

Untuk menanggulangi persoalan kemiskinan di perkotaan pemerintah memandang perlu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Kegiatan ini bukan hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat yang dialami, namun juga bersifat strategis karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang menguat bagi perkembangan masyarakat dimasa yang akan datang.

Program P2KP khususnya pada kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir di Kelurahan Tawang Mas Kecamatan Semarang Barat secara umum mendapat respon positif dari masyarakat khususnya masyarakat miskin yang mempunyai usaha produktif atau usaha baru yang mau menghidupkan dan mengembangkan kembali usahanya yang dilanda kebangkrutan akibat krisis ekonomi Tahun 1997, masyarakat miskin tersebut membentuk suatu kelompok yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). KSM adalah suatu kelompok yang beranggotakan orang-orang yang bersifat kesukarelaan dan memiliki ikatan sosial, yang dibangun karena memiliki tujuan ekonomi yang sama, tujuan sosial yang sama, tujuan pembelajaran yang sama, domisili yang sama dan lain-lain, namun syarat terpenting adalah adanya cerminan sebagai makhluk sosial. KSM secara

spesifik didefinisikan sebagai sekumpulan warga di kelurahan sasaran yang memenuhi kriteria sebagai warga miskin yang ditetapkan masyarakat sendiri, dimana mereka mempunyai minat serta tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok yang sama, baik yang menyangkut prasarana dasar lingkungan, peningkatan pengetahuan serta keterampilan atau masalah-masalah sosial yang lain maupun modal pengembangan usaha atau modal bagi para anggota dan kelompok, serta dibangun atas dasar kesamaan kepentingan ekonomi anggotanya (kelompok usaha atau kelompok dibidang ekonomi). Sampai saat ini jumlah KSM yang telah terbentuk dan telah mendapat guliran dana bantuan untuk modal kerja sebanyak 87 KSM dengan 462 anggota. Dari banyaknya jumlah KSM yang ada tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat atau keluarga-keluarga miskin yang memerlukan bantuan dana bagi modal kerja usaha mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka mulai menyadari dan peduli, kalau masalah yang mereka hadapi hanya dapat diatasi dan dipecahkan oleh mereka sendiri dengan berusaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya yaitu dengan membangun dan mengembangkan usaha mereka kembali. Namun dalam pelaksanaan kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir, tidak semua kegiatan yang dijalankan KSM-KSM dapat berjalan lancar dan sukses karena masih ada beberapa KSM yang mengalami kendala-kendala atau hambatan-hambatan dalam pengembalian dana bergulir dan memerlukan penanganan dan dicari cara penyelesaiannya, karena jika tidak diatasi maka akan menghambat kelancaran pelaksanaan dan keberhasilan P2KP yang berarti juga menghambat upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

Partisipasi aktif anggota KSM adalah yang paling dominan berpengaruh pada perkembangan dan tingkat keberhasilan P2KP dalam mengelola dana abadi masyarakat. Hal ini juga berarti bahwa mereka juga ikut mensukseskan program pembangunan untuk mewujudkan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

1.2 Rumusan masalah

Program P2KP di Kelurahan Tawang Mas Kota Semarang merupakan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (*Urban Poverty Project*) yang bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap

kegiatan, yang mengarah pada bertemunya pendekatan pembangunan *top down* dan *bottom up*. Secara riil operasional program baik dalam penentuan lokasi dan operasional tahap persiapan proyek P2KP masih menggunakan pendekatan pembangunan yang bersifat *top down*, artinya dalam proses perencanaan, penentuan lokasi, penentuan tahapan kegiatan pelaksanaannya belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat. Sedangkan pada tahap pelaksanaan kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir sudah memakai pendekatan *bottom up*. Peran dan partisipasi masyarakat berupa tinjauan dan komentar terhadap program P2KP merupakan peran yang paling sederhana dari masyarakat khususnya KSM belum muncul, sehingga dikhawatirkan dukungan dan rasa memiliki KSM terhadap program tidak akan muncul yang berimbas pada capaian program yang kurang maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang diangkat dan akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu:

Bagaimanakah peran dan tingkat partisipasi KSM pada pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP di Kelurahan Tawang Mas Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang ?

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran dan tingkat partisipasi KSM pada pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP di Kelurahan Tawang Mas Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

1.3.2 Sasaran Penelitian

1. Mengidentifikasi pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP di Kelurahan Tawang Mas Kota Semarang.
2. Mengkaji partisipasi Kelompok Swadaya Masyarakat pada pencairan dan pemanfaatan dana bergulir.
3. Menganalisa tingkat partisipasi KSM pada pencairan dan pemanfaatan dana bergulir.
4. Membuat kesimpulan dan rekomendasi

1.4 Ruang lingkup Penelitian

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial

Berdasarkan pada tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup substansial yang akan membatasi dan mengarahkan studi agar tujuan penelitian dapat tercapai yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi penerima manfaat pada pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP di Kelurahan Tawang Mas Kota Semarang.
Dalam Identifikasi ini membandingkan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir pada pedoman program P2KP dengan kondisi riil di Kelurahan Tawang Mas Kota Semarang.
2. Mengkaji Partisipasi Kelompok Swadaya Masyarakat.
Kajian ini membahas partisipasi masyarakat terhadap permasalahan yang berkaitan dengan P2KP di Kelurahan Tawang Mas Kota Semarang serta usulan program yang harus dilakukan.
3. Menganalisa tingkat partisipasi KSM pada pencairan dan pemanfaatan dana bergulir berdasarkan teori Sherry Arnstein. Pokok bahasan ini dijelaskan mengenai capaian program dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir.

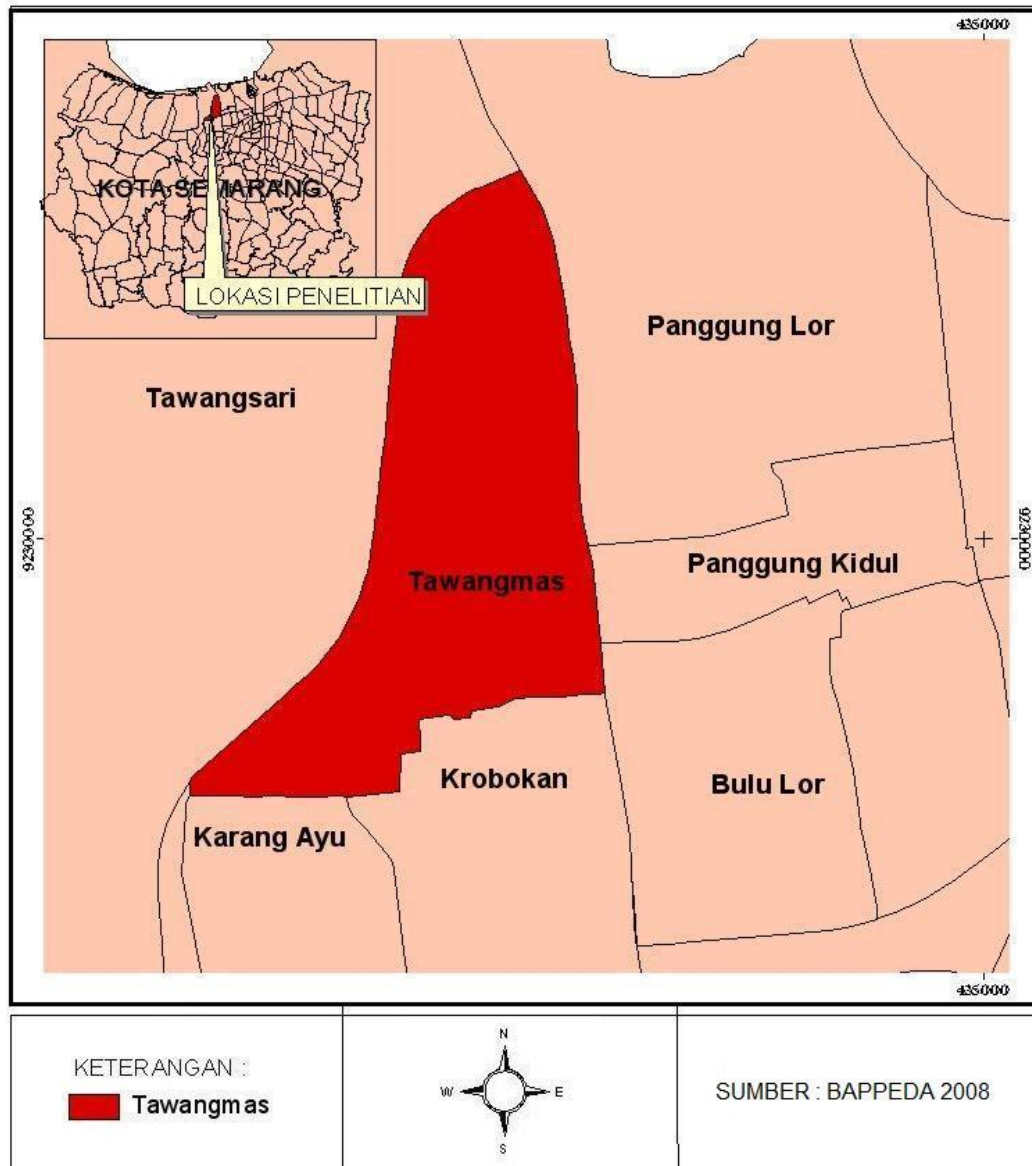
1.4.2 Ruang Lingkup Spasial

Ruang lingkup penelitian ini adalah berada di wilayah Kelurahan Tawang Mas Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. (Lihat Gambar 1.1).

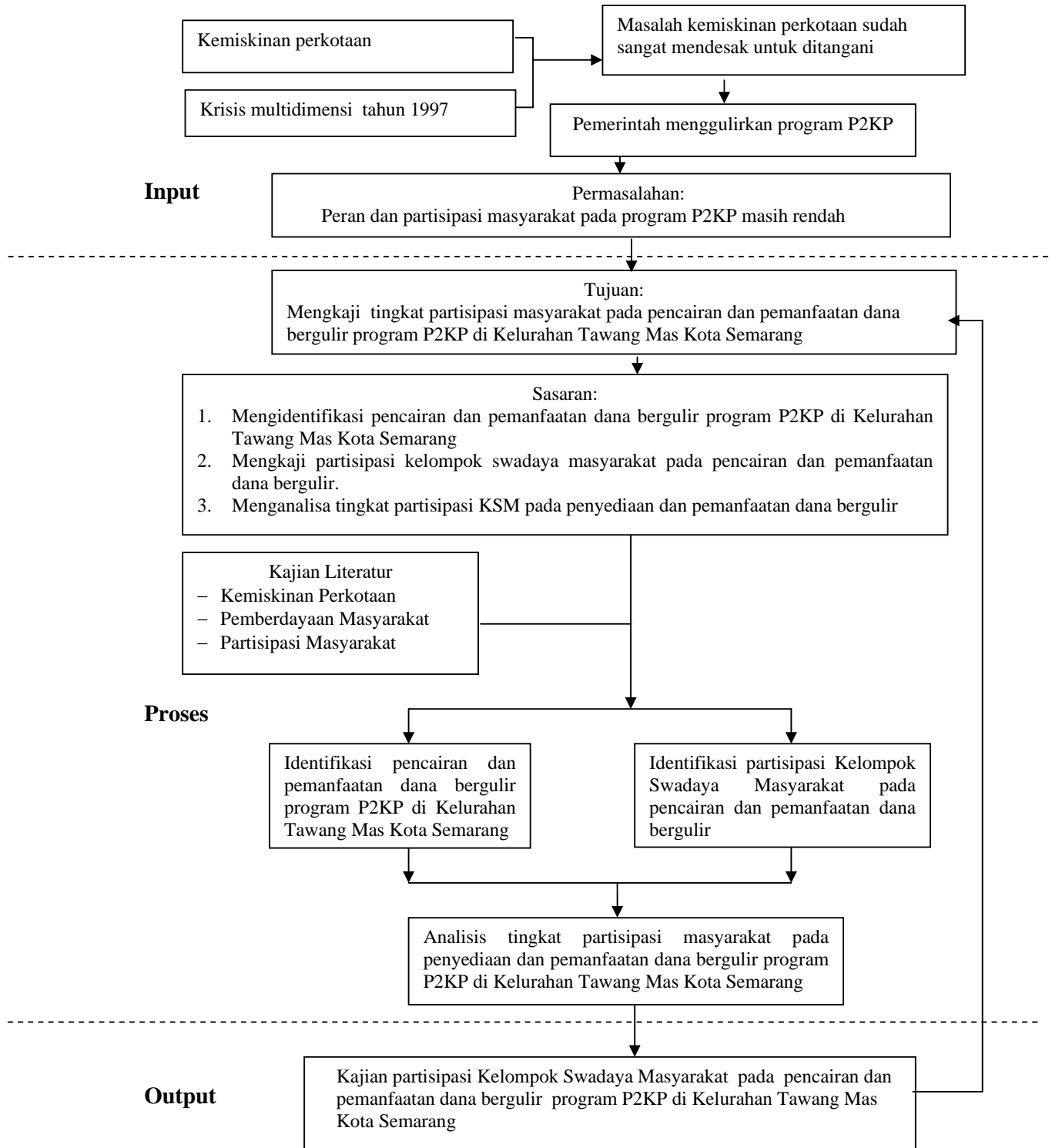
1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam studi ini berawal dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat. Kemiskinan merupakan suatu fenomena sosial yang tidak pernah berhenti diupayakan oleh pemerintah untuk ditanggulangi dan diantisipasi. Masalah kemiskinan kota ditambah terjadinya krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 menimbulkan lonjakan pengangguran dan kemiskinan di perkotaan.

Pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan pada saat pasca krisis ekonomi telah merancang dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), pada penelitian ini dibahas tentang kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir dalam P2KP.



GAMBAR 1.1
LOKASI PENELITIAN



Sumber: penyusun, 2009

GAMBAR 1.2
KERANGKA PIKIR

Program pengentasan kemiskinan yang berlangsung di Kelurahan Tawang Mas masih terdapat kendala-kendala di lapangan. Kendala-kendala tersebut menimbulkan pertanyaan penelitian berupa bagaimana tingkat partisipasi KSM pada pemanfaatan dana bergulir program P2KP.

Dengan melihat kajian literatur dan menggunakan pendekatan metodologi sebagai alat analisis diharapkan dapat diperoleh kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan hasil pelaksanaan program P2KP.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian diskriptif yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial (Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1982:22). Penulis juga menginterpretasikan atau menterjemahkan informasi dilapangan dengan bahasa penulis sebagai wacana untuk mendapatkan penjelasan tentang kondisi yang ada. Pendekatan deskriptif diartikan sebagai suatu proses pengumpulan, penyajian dan meringkas berbagai karakteristik dari data dalam upaya untuk menggambarkan data tersebut secara memadai (Santoso, 2003).

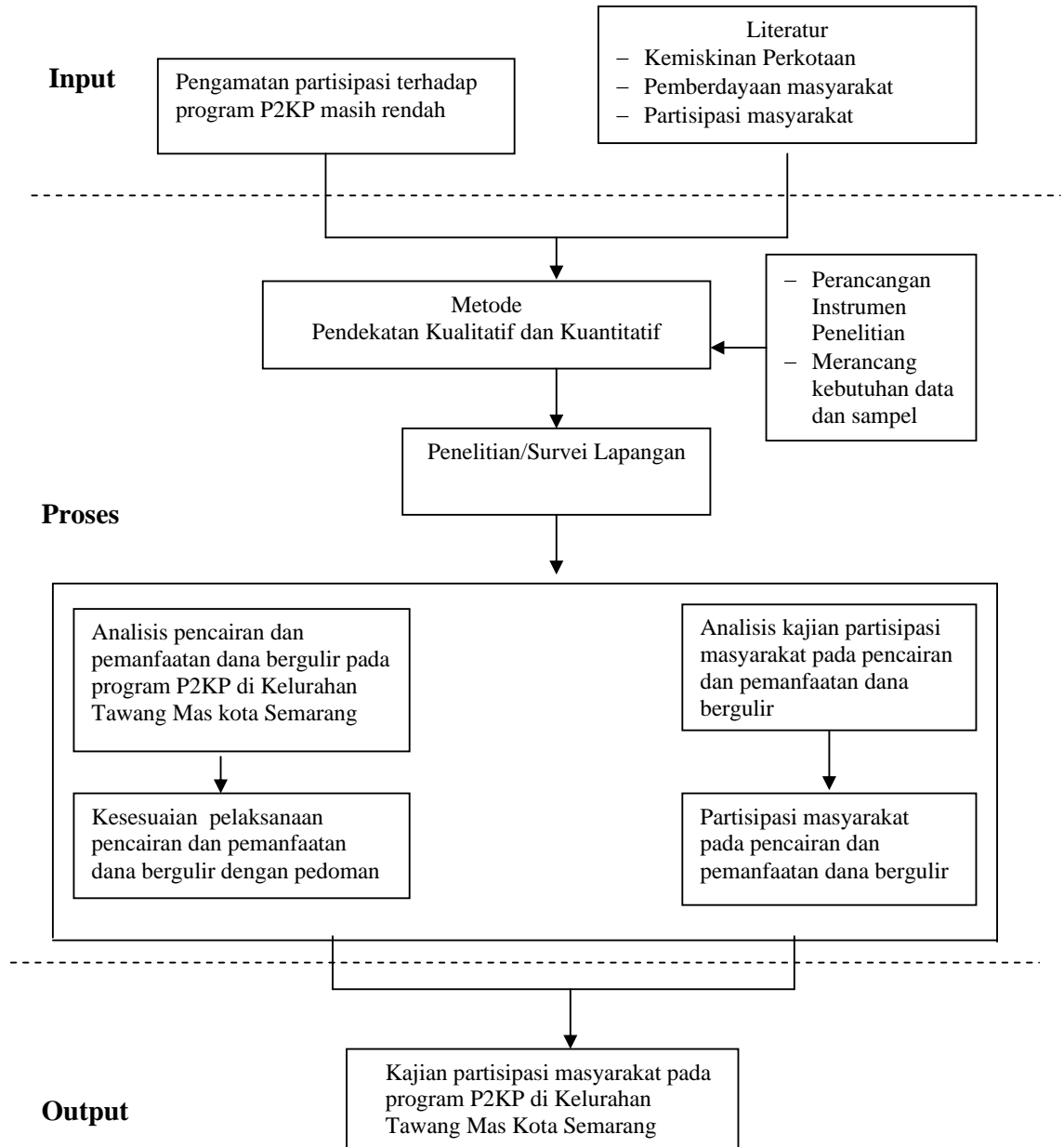
1.6.2 Kerangka Analisis

Kerangka analisis yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.3.

1.6.3 Kebutuhan Data

Data untuk mendukung penelitian ini dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau langsung dari lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara terhadap tokoh-tokoh kunci (*key persons*) yang berperan dalam pelaksanaan program P2KP khususnya pada pencairan dan pemanfaatan dana bergulir. Data Sekunder adalah data yang sudah ada dalam

pengumpulannya, bukan dari usaha sendiri dalam pengumpulannya, tetapi diperoleh dari narasumber lain yang terkait dalam penelitian, yaitu dengan memanfaatkan dokumen, rekaman maupun laporan kegiatan, surat kabar, laporan penelitian terdahulu, dan website, karena semua data ini akan memperkuat didalam menarik kesimpulan didalam penelitian. Data primer yang diperlukan dapat dilihat pada tabel I.1.



Sumber: Penyusun, 2009

GAMBAR 1.3
KERANGKA ANALISIS

TABEL I.1
HUBUNGAN ANTARA ANALISIS, DATA DAN VARIABEL

Analisa	Data	Bentuk /Kegiatan	Variabel	Kriteria	Perangkat	
Pencairan dan Pemanfaatan Dana Bergulir Program P2KP Kelurahan Tawang Mas Kota Semarang	Pencairan dan pemanfaatan dana bergulir	pencairan dana bergulir	Penentuan sasaran masyarakat miskin	Pola seleksi sasaran kemiskinan ditetapkan oleh masyarakat dan tokoh masyarakat setempat	Survey instansional, wawancara dan kuesioner dengan stakeholder	
			Penyusunan Usulan Kegiatan	usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dan warga miskin benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat yang realistis dan mendesak, bukan sekedar usulan atau keinginan semata		
			pencairan dana bergulir	- Telah di nilai kelayakannya oleh UPK - Disetujui prioritas pendanaannya oleh BKM		
		Manfaat dana bergulir	Bentuk pemanfaatan dana bergulir	- Usaha ekonomi produktif dan pembukaan lapangan kerja baru - Pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana lingkungan - Pengembangan SDM		
			Besar Anggaran pinjaman bergulir	- Besar - Cukup - Kurang		
			Tingkat pengembalian pinjaman	- Tepat waktu - Kadang tepat waktu - Tidak tepat waktu		
			Tingkat kemanfaatan	- Sangat bermanfaat - Cukup bermanfaat - Tidak bermanfaat		
Partisipasi Masyarakat Pada Pencairan dan Pemanfaatan Dana Bergulir Program P2KP di Kelurahan Tawang Mas Kota Semarang	Partisipasi masyarakat	Tanggapan dan perilaku masyarakat	Sikap sosial	- Sangat mendukung - Cukup mendukung - Kurang mendukung	Survey instansional, wawancara dan kuesioner dengan stakeholder	
			Motivasi	- Terpaksa - Ikut-ikutan - Kesadaran		
			Intensitas dalam setiap pelaksanaan kegiatan	- Selalu - Sering - Kadang-kadang		
			Bentuk sumbangan	- Pemikiran - Uang/materi - Tenaga		
			Kesediaan bertanggung jawab	- Sangat bersedia - Bersedia - Tidak bersedia		
	Usulan masyarakat	Peran masyarakat	Peran/posisi masyarakat dalam program P2KP	usulan terhadap program P2KP		Seleksi sasaran dana bergulir program P2KP Penyusunan usulan kegiatan KSM Pencairan dana bergulir Manfaat dana bergulir Pemberdayaan masyarakat
				<i>Manipulation</i>		
				<i>Theraphy</i>		
				<i>Informing</i>		
				<i>Consultation</i>		
<i>Placation</i>						
<i>Partnership</i>						
<i>Delegated Power</i>						
<i>Citizen Control</i>						

Sumber: Hasil Analisis, 2009

TABEL I.2
JABARAN KRITERIA PERAN DALAM TINGKATAN PARTISIPASI

No.	Tingkat Partisipasi	Jabaran Peran		
		Inisiasi	Pengelolaan	Keputusan
1.	<i>Manipulation</i>	Ide awal program dari pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Pelibatan masyarakat diselewengkan, namanya tidak tercatat hanya untuk kepentingan publikasi - Pengelolaan ditangan pemerintah 	Keputusan di tangan pemerintah
2.	<i>Theraphy</i>	Ide awal program dari pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat dilibatkan di banyak kegiatan dengan namun seolah hanya penyembuhan penyakit dengan perintah-perintah dengan tujuan untuk mengubah pola pikir atas pengelolaan program - Pengelolaan ditangan pemerintah 	Keputusan di tangan pemerintah
3.	<i>Informing</i>	Ide awal program dari pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat diberikan informasi satu arah tentang hak dan tanggungjawab dengan berbagai pilihan tidak ada tanggapan atau usulan - Sebagian besar pengelolaan ditangan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat diberi limpahan kewenangan terkait jawaban atas pertanyaan terkait keputusan yang menyangkut kepentingannya. - Keputusan ditangan pemerintah
4.	<i>Consultation</i>	Ide awal program dari pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Peran masyarakat sebatas memberikan opini - Disini masyarakat sudah memberikan masukan atau usulan - Sebagian besar pengelolaan ditangan pemerintah 	Keputusan ditangan pemerintah

Tabel I.2 Lanjutan...

No.	Tingkat Partisipasi	Jabaran Peran		
		Inisiasi	Pengelolaan	Keputusan
5.	<i>Placation</i>	Ide awal program dari pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian kecil masyarakat ikut dilibatkan - Pelaksana utama oleh pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam beberapa hal masyarakat ikut terlibat namun keterwakilannya rendah - Pemerintah masih sebagai penentu keputusan
6.	<i>Partnership</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ide awal program merupakan ide bersama antara pemerintah dan masyarakat - Kesepakatan pembagian tanggungjawab 	Tanggung jawab dalam pengelolaan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan - Penyusunan kebijakan - Pemecahan masalah - Pengendalian 	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan bersama - Tidak ada keputusan sepihak
7.	<i>Delegated Power</i>	Ide awal program merupakan ide masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan ada pada masyarakat - Peran pemerintah dalam pemecahan masalah dengan tanpa tekanan/paksaan 	Ada limpahan kewenangan pemerintah pada masyarakat untuk membuat keputusan
8.	<i>Citizen Control</i>	Ide awal program merupakan ide masyarakat	Kebijakan, pengelolaan dan kerjasama berada ditangan masyarakat	Keputusan sepenuhnya berada ditangan masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2009

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Informasi atau data (Marzuki, 2002:55-56) dapat dibedakan berdasarkan sumbernya yang terdiri dari:

1. Data Sekunder

Merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan maupun publikasi lainnya serta laporan-laporan.

2. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a) Wawancara mendalam

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang dipikirkan atau yang dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan. Adapun wawancara itu sendiri berguna untuk :

- Mendapatkan data di tangan pertama (primer).
- Pelengkap teknik pengumpulan lainnya.
- Menguji hasil pengumpulan data lainnya.

Tujuan wawancara ialah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat narasumber. Salah satu teknik pengumpulan data kualitatif adalah wawancara mendalam. Instrumen yang digunakan yaitu pedoman wawancara. wawancara dilakukan kepada sejumlah narasumber dalam hal ini *stakeholders* yang jumlahnya relatif terbatas dan memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan kontak langsung secara berulang-ulang sesuai dengan keperluan.

Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP dan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, dengan alasan bahwa peneliti ingin menggali semua informasi dari narasumber sebanyak mungkin, mendalam dan ingin menggali tanggapan, usulan dan peran masyarakat pada pencairan dan pemanfaatan program P2KP.

Langkah pertama, peneliti melakukan wawancara dengan informan kunci, sebab dengan melakukan wawancara dengan informan kunci terlebih dahulu, peneliti akan lebih mudah mendapatkan informan berikutnya. Proses wawancara diciptakan dalam situasi non formal,

dilakukan mengalir seperti percakapan sehari-hari, sehingga akan dapat membangun suatu kepercayaan dan agar tidak ada jarak antara peneliti dan subyek yang diteliti. Waktu melakukan wawancara, peneliti berusaha menjadi pendengar yang baik atau tidak menyela, pada saat informan menceritakan pengalamannya. Selain itu peneliti tidak membatasi waktu pelaksanaan wawancara, peneliti sepenuhnya memberikan kesediaan informan untuk diwawancarai.

b) Pengamatan Lapangan (observasi lapangan)

Beberapa informasi yang diperoleh dari pengamatan lapangan terutama yang menyangkut implementasi program. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui implementasi program yang sebenarnya dengan menggunakan alat bantu seperti: alat pemotret, alat perekam suara, alat pengukur dan sebagainya.

c) Kuesioner (daftar pertanyaan)

Pengumpulan data dengan kuesioner adalah merupakan daftar yang berisikan suatu rangkaian pertanyaan yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian dan yang merupakan penjabaran atau operasional dari indikator-indikator variabel, yang melukiskan isian dalam kuesioner yaitu penelitian pada saat tatap muka dengan narasumber.

d) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji keterangan-keterangan yang diambil dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

1.6.5 Teknik *Sampling*

Untuk mengumpulkan data primer dapat digunakan teknik *sampling* (teknik pengambilan sampel). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel secara *non probability sampling* dengan teknik *purposive* dan *snowball sampling* dimana penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu orang-orang yang terlibat dan tahu mengenai pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP, memilih sampel awal yaitu informan kunci, lalu

memilih sampel lanjutan guna memperluas informasi dan menghentikan pemilihan sampel lanjutan bilamana tidak ditemukan lagi variasi informasi. Ukuran sampel ditentukan berdasarkan pada penilaian peneliti. Pemilihan unit sampling didasarkan pada pertimbangan atau penilaian subjektif dan tidak ada penggunaan teori probabilitas.

1. Dasar Penentuan Narasumber

Pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *pusposive* dan *snowball sampling*, dengan alasan:

- a. Mempermudah dalam mencari narasumber yang representatif pada populasinya atau dianggap mengerti dalam lingkup penelitian yang diangkat, sehingga akan menghemat waktu dan biaya.
- b. Diperoleh narasumber yang benar-benar mengerti dan menggeluti kegiatan P2KP di Kelurahan Tawang Mas, sehingga akan didapat data sesuai dengan topik atau fokus penelitian dan memiliki dengan validitas yang diinginkan. Dipilih juga dari sisi usia, pekerjaan maupun latar belakang pendidikan, sehingga penulis memilih orang-orang yang dipertimbangkan mampu memberikan jawaban yang meyakinkan untuk setiap pertanyaan yang diajukan.

Langkah-langkah yang digunakan dalam pemilihan sampel pada penelitian ini adalah (Bungin, 2003):

- a. Pemilihan sampel awal atau informan kunci, apakah itu informan untuk diwawancarai atau situasi sosial untuk diobservasi yang terkait dengan fokus penelitian ini.
- b. Pemilihan sampel lanjutan guna memperluas diskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang mungkin ada.
- c. Menghentikan pemilihan sampel lanjutan bilamana dianggap sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi (sudah terjadi replikasi perolehan informasi).

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Suharno, kedudukan beliau sekarang adalah masih aktif sebagai Ketua BKM Artha Manunggal dan telah menggeluti program P2KP sejak tahun 2003. Adapun pertimbangan lainnya adalah:

- a. Merupakan penduduk asli Kelurahan Tawang Mas, yang lahir dan besar di tempat tersebut, sehingga sangat mengerti kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut.
- b. Merupakan orang yang jujur, terbuka dalam memberikan informasi, sehingga dapat memberikan informasi yang faktual (apa adanya).
- c. Beliau mau meluangkan banyak waktu untuk diajak wawancara, dan memiliki pandangan mengenai program P2KP yang dilaksanakan di Kelurahan Tawang Mas.

Langkah selanjutnya adalah mencari *target group*, yaitu informan yang tinggal di wilayah studi dan terlibat dalam kegiatan P2KP, yaitu ketua maupun anggota KSM sebagai penerima dan pemanfaat dana bergulir. Agar informasi yang diperoleh sesuai dengan harapan penulis, penulis membatasi informan dengan beberapa kriteria, antara lain:

- a. Laki-laki atau perempuan dewasa (umur > 17 tahun).
- b. Berpendidikan minimal SD.
- c. Bertempat tinggal di wilayah studi.
- d. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan P2KP.

2. Batasan Penentuan Narasumber

Jumlah narasumber pada dasarnya ditetapkan menurut kompleksitas masalah pada penelitian, hal ini ditentukan sendiri oleh peneliti dengan teknik *purposive* dan *snowball sampling* yang telah dilakukan, sehingga didapatkan jumlah narasumber sebanyak 96 orang dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Untuk pengumpulan data dengan wawancara diambil 9 orang narasumber, yaitu: satu orang kepala kelurahan selaku pemimpin wilayah kelurahan Tawang Mas sebagai narasumber dari pemerintah kelurahan, 4 (empat) orang pengurus BKM selaku pengelola dan pelaksana kegiatan, serta 4 (empat) orang anggota KSM selaku penerima dan pengguna dana bergulir.
- b. Untuk pengumpulan data dengan kuesioner diambil 87 orang yaitu ketua KSM yang dianggap tahu tentang kondisi riil KSM untuk mendukung validitas data.

1.6.6 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif untuk menemukan makna dalam suatu situasi sosial yang diteliti. (Miles dan Huberman, 1992:20) menyatakan dalam analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dimunculkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman) dan yang biasanya diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.

Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik analisis juga mendasarkan pada ketiga alur kegiatan analisis tersebut, yang pada dasarnya dapat terjadi pada waktu yang bersamaan. Jadi pada saat melakukan reduksi data boleh jadi pada saat itu sekaligus dilakukan pembuatan format penyajian data yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan.

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis, melainkan merupakan bagian dari analisis dimana peneliti memilih tentang bagian data mana saja yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan-pilihan yang analitis. Kode atau pengkodean merupakan singkatan atau simbol yang diterapkan pada sekelompok kata-kata, dapat berupa kalimat atau paragraf dari catatan-catatan lapangan yang ditulis. Kode-kode merupakan kategori-kategori, biasanya dikembangkan dari permasalahan penelitian, hipotesis, konsep-konsep kunci, atau tema-tema yang penting. Kode-kode adalah peralatan yang mengorganisasi dan menyusun kembali kata-kata sehingga memungkinkan penganalisis dapat menemukan dengan cepat, menarik kemudian menggolongkan seluruh bagian yang berhubungan dengan masalah khusus, hipotesis, konsep atau tema. Selanjutnya dalam reduksi data dapat berupa analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

Kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ia merupakan bagian dari analisis. Merancang deretan dan kolom-kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks merupakan kegiatan analisis.

Ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, analisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan itu ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun kemudian menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang tidak dapat terpisahkan pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus.

Penelitian kualitatif ini pada dasarnya mengadopsi ketiga alat analisis kualitatif tersebut, namun penggunaannya disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dalam konteks terapan, penelitian ini lebih banyak berupaya mengemukakan dan memberikan penjelasan (deskripsi) mengenai fenomena yang terkait dengan variabel penelitian. Proses pelaksanaannya lebih banyak menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Adapun urutannya sebagai berikut :

Tahap pertama, untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah tentang pelaksanaan program P2KP di Kelurahan Tawang Mas Kota Semarang yang partisipatif. Data yang dibutuhkan dalam analisis ini berupa data primer maupun sekunder yang meliputi data kebijakan pemerintah daerah tentang pelaksanaan program yang partisipatif. Analisis ini mendeskripsikan pelaksanaan program P2KP khususnya pada pencairan dan pemanfaatan dana bergulir. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait maupun observasi lapangan, wawancara dan

kuesioner terhadap narasumber. Hasil akhir dari analisis tersebut menghasilkan rangkaian kegiatan dalam mendukung program P2KP secara partisipatif.

Tahap kedua, pada bagian ini digunakan teknik komunikasi langsung dan tidak langsung dengan cara mengumpulkan data dengan cara kontak langsung secara lisan atau tatap muka dengan sumber data dan menyebarkan kuesioner, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi yang sengaja dibuat untuk keperluan tersebut. Materi wawancara mendalam dengan narasumber dan kuesioner mengenai tanggapan dan partisipasi masyarakat terhadap program P2KP termasuk informasi lain yang muncul yang bisa digunakan untuk analisis yang lebih luas terkait pelaksanaan program P2KP. Semaksimal mungkin menggali masukan dari narasumber untuk memudahkan dalam analisis.

Masukan-masukan tersebut dianalisis dengan 3 (tiga) alat utama dalam penelitian kualitatif. Sehingga meskipun dalam penelitian kualitatif senantiasa terikat dengan ruang dan waktu (konteks) penelitian, namun berdasarkan data yang diperoleh senantiasa diungkapkan berbagai fakta apa adanya. Meski pada saat menggali data, upaya mendekati diri semaksimal mungkin pada narasumber untuk memahami konteks jawaban atau pernyataan dari narasumber. Pada saat melakukan analisis lanjutan, hasil wawancara tersebut disikapi dengan cara lain agar hasil analisis secara keseluruhan dapat lebih baik dan memadai.

Tahap ketiga, mencoba untuk mengambil intisari peran serta masyarakat dalam program P2KP tercantum dalam program pemerintah serta kondisi riil yang ada berupa karakteristik wilayah dan karakteristik masyarakat (potensi ekonomi, sosial, politik, kebudayaan). Dari hasil analisis ini dapat dirumuskan faktor-faktor pendorong pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program serta bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan kontribusi atau peran masyarakat dalam program P2KP secara partisipatif.

Tahap keempat, dilakukan berdasarkan hasil analisis ketiga yang dicoba untuk diabstraksikan dan direfleksikan lebih jauh, guna menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang perlu ditempuh. Rekomendasi yang dihasilkan berupa upaya pelaksanaan program khususnya P2KP yang partisipatif dalam artian merupakan aspirasi dari masyarakat setempat. Selain itu juga dirumuskan bentuk-

bentuk keterlibatan/partisipasi masyarakat dan kontribusinya dalam pelaksanaan program P2KP secara partisipatif di Kelurahan Tawang Mas Kota Semarang.

1.7 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan tesis ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan tesis ini diawali dengan latar belakang mengapa diperlukan kajian ini, rumusan masalah yang ada, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian dan kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan. Pada bab ini juga memuat: pendekatan penelitian, kerangka analisis, teknik analisis, teknik pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, teknik sampling dan kebutuhan data.

BAB II KAJIAN LITERATUR

Dalam bab ini diulas tentang kajian literatur yang diharapkan dapat digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari: kajian literatur pemberdayaan, partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan pembangunan ekonomi lokal.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH KELURAHAN TAWANG MAS KOTA SEMARANG DAN PROGRAM P2KP

Dalam bab ini dijelaskan mengenai kondisi wilayah Kelurahan Tawang Mas Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang yang meliputi: keadaan geografis, demografi dan sosial ekonomi. Dalam bab ini juga dijelaskan gambaran umum Program P2KP yang berlangsung pada wilayah tersebut.

BAB IV KAJIAN PARTISIPASI PENERIMA MANFAAT PADA PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BERGULIR PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DI KELURAHAN TAWANG MAS KOTA SEMARANG

Bab ini terdiri dari analisis: identifikasi program P2KP tahap pencairan dan pemanfaatan dana bergulir di Kelurahan Tawang Mas Kota Semarang, Kajian partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kegiatan

pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP di Kelurahan Tawang Mas Kota Semarang, Tingkat partisipasi Kelompok Swadaya Masyarakat pada pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP di Kelurahan Tawang Mas Kota Semarang.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP di Kelurahan Tawang Mas Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN LITERATUR

2.1 Kemiskinan Perkotaan

Kemiskinan di perkotaan dapat dipahami sebagai suatu kondisi deprivasi terhadap sumber-sumber pemenuh kebutuhan dan rendahnya aksesibilitas terhadap fasilitas pembangunan baik pada sektor ekonomi, politik, sosial, budaya (Sulistiyani, 2004:20).

Dalam pandangan Robert Chambers dengan teorinya “*deprivation trap*” atau jebakan kemiskinan disebutkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi deprivasi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan pendidikan dan kesehatan (Nurhadi, 2007:31).

Kemiskinan menurut (Scott dalam Rohidi, 2000:24) didefinisikan sebagai kondisi yang diderita manusia karena:

1. Kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, kesehatan, transportasi.
2. Tidak memiliki aset seperti tanah, rumah, peralatan, uang, emas, kredit dan lain-lain.
3. Kekurangan atau tidak memiliki berbagai macam hak, seperti kebebasan, memperoleh pekerjaan yang layak, hak atas rumah tangga dan kehidupan yang layak.

Ada berbagai kategori kemiskinan menurut (Sunarto dan Mardimin, 1996:23), yaitu:

1. Kemiskinan absolut, yaitu jika tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup untuk memelihara fisiknya agar dapat bekerja penuh dan efisien.
2. Kemiskinan relatif, yaitu membandingkan kondisi seseorang atau kelompok dengan kondisi orang lain.
3. Kemiskinan struktural, yaitu seseorang atau kelompok yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur masyarakatnya yang timpang, tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah.

4. Kemiskinan situasional atau kemiskinan natural, yaitu seseorang atau kelompok yang tinggal di daerah-daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya mereka menjadi miskin.
5. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang terjadi karena kultur masyarakatnya.

Sedangkan Saiful (2000) mendefinisikan dua model kemiskinan, yaitu: kemiskinan kultural yang diakibatkan oleh karakter budaya dan etos kerja yang rendah dan kemiskinan struktural diakibatkan oleh struktur yang timpang.

Tidak mudah mengukur suatu tingkat kemiskinan (Nurhadi, 2007:21), kemiskinan tidak dapat diukur hanya dengan indikator penguasaan atau pemilikan materi. Jika dipahami secara sempit sebagai suatu realitas atau keadaan objektif, mandiri dan dapat dihitung dengan angka, istilah kemiskinan dapat menyesatkan (Sunarto dan Mardimin, 1996:19). Kesulitan untuk mengukur kemiskinan bukan hanya pada indikator apa yang akan digunakan, akan tetapi juga bagaimana menggunakan indikator tersebut pada suatu individu, keluarga, kelompok orang atau masyarakat. Untuk mempermudah mengukur kemiskinan kemudian muncul konsep *poverty line* (garis kemiskinan).

Terdapat empat pendekatan yang biasa dipakai untuk mengukur garis kemiskinan, yaitu: (1) Pendekatan kebutuhan pengeluaran minimum untuk makan, (2) Pendekatan kebutuhan gizi minimum, (3) Pendekatan kebutuhan dasar, (4) Konsep garis kemiskinan internasional (Esmara dalam Nurhadi, 2007:21). Para ahli dan instansi yang telah merumuskan dan menentukan kriteria dan garis kemiskinan di perkotaan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Kemiskinan yang terjadi di perkotaan menimbulkan keadaan ketidakberdayaan, untuk menanggulangnya dibutuhkan suatu intervensi pemberdayaan seperti program P2KP. Proses pemberdayaan hendaknya dapat dituangkan dalam bentuk program aksi yang jelas disertai oleh langkah-langkah pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan derajat hidup masyarakat, kesejahteraan dan keseimbangan dalam banyak segi kehidupan lingkungan, fisik maupun sosial. Kemiskinan akan terentaskan jika program diarahkan untuk memberikan stimulasi bagi upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan melakukan proses menuju kemandirian sejati.

Pada pelaksanaan program P2KP di Kelurahan Tawangmas Kota Semarang, penentuan sasaran penerima bantuan dana bergulir merupakan warga miskin di lingkungan kelurahan yang dinilai dan diputuskan sendiri oleh masyarakat setempat. Kelompok sasaran ini bersifat sukarela dan memiliki ikatan sosial yang dibangun karena memiliki tujuan ekonomi, tujuan sosial, tujuan pembelajaran yang sama serta berdomisili ditempat yang sama.

TABEL II.1
KRITERIA DAN GARIS KEMISKINAN PERKOTAAN

Penelitian	Kriteria	Garis Kemiskinan
Esmara(1969-70)	Konsumsi beras perkapita per tahun (kg)	125
Sajogjo(1971)	Tingkat Pengeluaran ekuivalen per orang per tahun (kg) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Miskin ▪ Miskin sekali ▪ Paling miskin 	480 360 270
Ginneken(1969)	Kebutuhan gizi minimum per orang per hari <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kalori ▪ Protein (gr) 	2000 50
Anne Both (1969-70)	Kebutuhan gizi minimum per orang per hari <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kalori ▪ Protein (gr) 	2.000 40
Gupta(1973)	Kebutuhan gizi minimum per orang per tahun (Rp)	24.000
Hasan(1975)	Kebutuhan gizi minimum per orang per tahun (US Dolar)	125
Sajogjo(1984)	Pengeluaran perkapita perbulan (Rp)	8.240
Bank dunia(1984)	Pengeluaran perkapita perbulan (Rp)	6.719
Indonesian-world Bank(1990)	Pengeluaran perkapita perbulan (Rp)	27.748
ECAPE Method (1984)	Pengeluaran perkapita perbulan (Rp)	29.205
BPS(1984)	Konsumsi kalori perkapita perhari Pengeluaran perkapita per bulan (Rp)	2.100 13.731
BPS(1993)	Konsumsi kalori perkapita perhari Pengeluaran perkapita per bulan (Rp)	2.100 27.905

Sumber: Sunarso Hs. dan Joh. Mardimin, 1996

Tujuan dan sasaran pelaksanaan program P2KP sejalan dengan pendapat Dennis A. Rondinelli (1990:91-92) bahwa keberhasilan pembangunan pada negara berkembang: (1) Diarahkan pada masyarakat miskin dan (2) Bantuan tersebut digunakan untuk peningkatan pendapatan penduduk miskin serta (3) Spesifik kebutuhan masyarakat.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di perkotaan (P2KP) merupakan program yang menganut pendekatan pemberdayaan (*empowerment*) untuk dapat menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan struktur yang harus muncul dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat, dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Proses perubahan tersebut berlangsung secara alamiah dengan asumsi bahwa setiap anggota masyarakat sebagai pelaku-pelaku sosial yang ikut dalam proses perubahan tersebut yang diharapkan akan tumbuh kemandirian.

Kemandirian dapat tercipta dari sebuah masyarakat yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan meningkatkan kemampuan atau potensi yang dimilikinya. Dengan kata lain, pembelajaran masyarakat pertamanya harus difokuskan pada usaha melepaskan seseorang dari realitas yang menghambat eksistensi, yakni hambatan yang berupa ketidaksederajatan, tekanan, dan penindasan dari pihak luar yang merasa lebih berpengetahuan, berpangkat, berjabatan dan lain sebagainya.

Namun demikian, hampir di setiap lini kehidupan masih terdapat sikap-sikap munafik dan feodalisme terutama pada golongan yang berpengetahuan, berpangkat, berjabatan untuk kecenderungan menindas pihak yang lemah.

Pemberdayaan memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif. Dalam konteks pemberdayaan, masyarakat harus diberdayakan untuk merumuskannya sendiri melalui sebuah proses pembangunan konsensus diantara berbagai individu dan kelompok sosial yang memiliki kepentingan dan menanggung resiko

langsung (*stakeholders*) akibat adanya proses atau intervensi pembangunan, baik pembangunan ekonomi, sosial maupun lingkungan fisik.

Pemberdayaan harus berperan untuk mewujudkan konsep masyarakat belajar atau *Concept of Societal Learning* dan caranya adalah dengan mempertemukan *top down approach* dengan *bottom-up approach* yang pada dasarnya adalah “kontradiktif” (Friedmann dalam Burke, 2004:238). Kedua macam pendekatan ini kontradiktif karena masyarakat dan perencana sangat sering memiliki pemahaman masalah, perumusan, tujuan dan ide-ide pemecahan praktis yang berbeda akibat menganganya jurang pengetahuan dan komunikasi antara perencana dengan masyarakat.

Pendekatan yang bertentangan ini membutuhkan aktualisasi relasi baru, yang mampu mengintegrasikan proses saling belajar (*mutual learning*) dari kedua belah pihak melalui proses perencanaan yang disebut sebagai *Transactive Planning* (Perencanaan Transaktif). Selanjutnya Friedmann dalam Burke, bahwa Perencanaan Transaktif merupakan tanggapan terhadap kesenjangan komunikasi antara perencana teknis dan para klien. Untuk menutup kesenjangan tersebut, suatu rangkaian transaksi pribadi yang terus menerus dan terutama transaksi secara verbal antara perencana dan klien, sangat dibutuhkan. Friedmann juga menunjukkan bahwa tumbuhnya kaum teknokrat dari masyarakat kita menuntut adanya metode pengambilan keputusan yang didasarkan pada proses belajar secara bersama-sama. Friedmann menjelaskan bahwa dibutuhkan suatu penggabungan sains dan teknologi dengan pengetahuan pribadi pada tahap-tahap kritis intervensi sosial guna menghindari agar pengambilan keputusan tidak berada di tangan pihak teknokrat secara eksklusif.

Perencanaan Transaktif memungkinkan perencana belajar pengetahuan eksperimental dari klien, sedangkan klien belajar pengetahuan teknis dari perencana. Melalui proses ini pula, kedua macam pengetahuan tersebut masing-masing akan berubah dengan sendirinya, dan kemudian kedua macam pengetahuan ini akan melebur menjadi satu.

Pada saat pengetahuan kedua belah pihak melebur, maka persepsi dan imaji dari pihak satu terhadap pihak yang lain akan berubah, dan selanjutnya perilaku keduanya pun akan berubah. Ide awal dari perencana untuk “mengajari

masyarakat” akan merubah menjadi “pelajar” (*the learners*) akan bertransformasi menjadi aksi masyarakat (*community action*) artinya ”dialog saling belajar” telah merubah perilaku kolektif masyarakat dan mendorong masyarakat secara lebih aktif menolong diri mereka sendiri dan sekaligus membangun komunitas bersama seperti yang diharapkan.

Masyarakat belajar (*Learning Society*) yang aktif melakukan aksi ini dengan sendirinya akan terbangun kapasitasnya karena *learning society* secara inheren akan mengembangkan kapasitas komunitas (*Community Capacity Building*). Secara empirik banyak studi menunjukkan bahwa masyarakat yang sudah memasuki fase *Learning Society* akan lebih berpotensi untuk mewujudkan sebuah pembangunan yang lebih berkelanjutan, karena mereka sudah lebih mandiri dalam berbagai hal mulai dari mengidentifikasi, menilai dan menformulasikan masalah baik fisik, sosial, kultural maupun ekonomi, membangun visi dan aspirasi, memprioritaskan intervensi, merencana, mengelola, memonitor dan bahkan memilih teknologi yang tepat. Masyarakat aktif (*Active Society*) semacam ini juga menghasilkan kerelaan masyarakat yang lebih untuk memberi kontribusi kerja dan biaya pembangunan, operasi dan perawatan sedemikian sehingga pendekatan mampu mengembalikan biaya investasi publik (*Cost - Recovery*) yang pada gilirannya akan menjadi lebih berkemungkinan terjadinya pengulangan (*Self - Replicability*).

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan struktur yang harus muncul dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat, dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Proses perubahan tersebut berlangsung secara alamiah dengan asumsi bahwa setiap anggota masyarakat sebagai pelaku-pelaku sosial yang ikut dalam proses perubahan tersebut.

Pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapat diterjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah. Pemberdayaan dalam konsep (wacana) politik menurut Dahl (1963:50) merupakan sebuah kekuatan yang menyangkut suatu kemampuan seseorang (pihak pertama) untuk mempengaruhi orang lain (pihak kedua) yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pihak kedua.

Program P2KP pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat yang

menekankan penerapan pelaksanaan penguatan kelembagaan pembangunan masyarakat dan aparat di tingkat lokal berdasar prinsip pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Kegiatan Program P2KP mengutamakan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola masyarakat secara langsung dalam wadah kelembagaan-kelembagaan lokal yang dikoordinasikan oleh lembaga lokal baik kelurahan, kecamatan dan tingkatan di atasnya.

Pemberdayaan memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif. Dalam konteks pemberdayaan, masyarakat harus diberdayakan untuk merumuskannya sendiri melalui sebuah proses pembangunan konsensus diantara berbagai individu dan kelompok sosial yang memiliki kepentingan dan menanggung resiko langsung (*stakeholders*) akibat adanya proses atau intervensi pembangunan, baik pembangunan ekonomi, sosial maupun lingkungan fisik. yang umumnya berisikan arah, tujuan, cara dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan.

Sasaran Program yang mengarah pada penduduk miskin dan perempuan yang kebanyakan menganggur menyebabkan mereka sadar, yakin dan percaya diri untuk dapat berusaha. Dengan begitu, maka mereka akan berusaha menampilkan apa yang dapat diperbuat dan diusahakan dan nantinya dapat dikerjakan bersama. Berawal dari hal sederhana seperti itu, maka semangat masyarakat dalam membangun (walaupun dengan cara dan pemahaman mereka sendiri sendiri) akan terus berlanjut dan berdayanya masyarakat dalam artian mandiri dalam membangun tanpa menggantungkan terhadap pemerintah akan tercapai. Kondisi yang seperti itu dalam masyarakat akan membuat masyarakat merasa nyaman, tenteram sehingga iklim berusaha (peningkatan pendapatan keluarga) akan terjaga dan semangat membangun terus terpelihara dalam masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari peran serta kelompok-kelompok masyarakat yang harus dan terus didampingi oleh tenaga pendamping program yang dijalankan.

Pemberdayaan yang akan dilakukan memerlukan langkah-langkah yang riil dalam penanganannya. Langkah-langkah yang diambil dalam mewujudkan tujuan adalah melalui dua hal yang mendasar dalam membentuk iklim bagi masyarakat adalah dengan:

- Menyadarkan masyarakat dan memberikan dorongan/motivasi untuk berkembang.

Proses menyadari masyarakat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk mengenal wilayahnya melalui survei dan analisis. Proses ini disebut dengan *participatory survey* dan *participatory analysis*.

- Memotivasi masyarakat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk menggambarkan dan merencanakan wilayah, yang disebut dengan *participatory design and planning*.

Pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat secara psikologis akan memberikan rasa *ke-berpihak-an* kepada masyarakat.

Untuk memperkuat (*empowerment*) potensi yang ada dilakukan dengan mengorganisasi masyarakat dalam kelompok-kelompok/komunitas pembangun, yang selanjutnya dikembangkan dengan memberikan masukan-masukan/input serta membuka berbagai peluang-peluang berkembang sehingga masyarakat semakin berdaya. Secara aplikatif *empowerment* terhadap kelompok masyarakat bawah dan menengah dilakukan melalui 2 (dua) hal yaitu:

- Penguatan Akses/*Accesibility Empowerment*

Pada pemberdayaan kelompok masyarakat *empowerment* dilakukan melalui menciptakan akses dari kelompok informal kepada kelompok formal, kelompok yang diberdayakan dengan kelompok pemberdaya. Kebutuhan akan akses ini sangat menentukan *share* dan partisipasi antar *stakeholders* dalam proses pemberdayaan.

- Penguatan Teknis/*Technical Empowerment*

Technical empowerment dilakukan sebagai bagian dari kegiatan *advocacy* sehingga dapat diwujudkan peningkatan kapasitas dari kelompok yang diberdayakan. Keterlibatan secara aktif dari masing-masing *stakeholders* diwujudkan dalam bentuk *share* nyata seperti program, pendanaan, dan kebijaksanaan (*policy*).

Program P2KP memberikan bantuan dalam jumlah tertentu dan pemanfaatannya semata agar pemanfaatan program dengan berlatih menggunakan dana tersebut sebagai stimulan untuk pengembangan pemberdayaan lebih lanjut. Dana yang ada digunakan untuk pembiayaan investasi sosial dan investasi ekonomi untuk menciptakan produktivitas yang membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraannya. Bentuk bantuan lain adalah pengembangan

sumber daya manusia dengan dilakukan pelatihan secara berjenjang baik melalui tenaga pendamping dan atau aparat mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten maupun provinsi.

2.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Pembangunan masyarakat yang komprehensif pada hakekatnya membutuhkan suatu perencanaan dan pemahaman mendalam mengenai situasi dan kondisi masyarakat yang akan dibangun. Pemahaman ini merupakan dasar dari upaya menuju keberhasilan sebuah proses pembangunan. Keberhasilan suatu program pembangunan kemiskinan (Korten, 2001:110) adalah proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi sendiri.

Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat bersifat penting dalam pelaksanaan kegiatan P2KP (Conyers dalam Suparjan, 2003:53), yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Dalam hal ini masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Menurut Alastraire White (dalam Sastropetro, 1986:32), ada 10 buah alasan pentingnya partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Dengan partisipasi lebih banyak hasil kerja yang dapat dicapai.
2. Dengan partisipasi pelayanan atau *service* dapat diberikan dengan biaya yang murah.

3. Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta, karena menyangkut kepada harga dirinya.
4. Partisipasi merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya.
5. Partisipasi mendorong timbulnya rasa tanggung jawab.
6. Partisipasi menjamin bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat telah dilibatkan.
7. Partisipasi menjamin bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan arah yang benar.
8. Partisipasi menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga terjadi perpaduan berbagai keahlian.
9. Partisipasi membebaskan orang dari ketergantungan kepada keahlian orang lain.
10. Partisipasi lebih menyadarkan manusia terhadap penyebab kemiskinan, sehingga menimbulkan kesadaran terhadap usaha untuk mengatasinya.

Dari tiga alasan utama Conyers dan pendapat Dr. Alastaire White diatas dapat kita lihat bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P2KP mutlak diperlukan, karena masyarakatlah yang akhirnya akan melaksanakan program tersebut. Adanya pelibatan masyarakat memungkinkan mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan program P2KP tersebut. Dengan pendekatan partisipatif diharapkan partisipasi, potensi dan kreatifitas masyarakat dapat lebih tergali.

Menurut ST. Verianto (1979:133) pengetahuan adalah proses pendidikan seumur hidup yang sesungguhnya dimana tiap tiap individu memperoleh sikap, nilai-nilai ketrampilan, baik dari pendidikan formal maupun pendidikan informal, pengaruh pendidikan, pekerjaan dan pengalaman mass media.

Dengan berbekal pengetahuan yang dimiliki kelompok masyarakat cenderung akan bertindak sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya itu. Dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat yang disertai kesediaannya akan menimbulkan suatu pemahaman dan kesadaran dalam diri masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan program P2KP.

Pemahaman masyarakat mengenai program P2KP ini dimaksudkan supaya masyarakat mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tujuan P2KP, sehingga didalam pelaksanaannya masyarakat mampu menjalankan dan memenuhi

kewajibannya terhadap program P2KP. Selanjutnya berdasarkan pengetahuan yang dimiliki masyarakat, partisipasi ini diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang mendukung terselenggaranya pelaksanaan P2KP ini dengan baik.

Sikap (Saparian, 1979:202) adalah kemampuan individu yang ditujukan pada penyesuaian diri terhadap nilai-nilai yang telah berkembang sesuai tuntutan kemajuan jaman, baik yang bersikap kemasyarakatan maupun politis agama legalistis secara pembaharuan dibidang teknologi dan pembangunan. Sikap yang dimiliki oleh masyarakat ini merupakan cara pandang masyarakat berdasarkan pendirian atau keyakinan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan pendirian atau keyakinan dalam menyikapi dan menanggapi mengenai pelaksanaan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP.

Perilaku merupakan tanggapan individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku ini terwujud dalam gerakan atau tindakan seperti pengertian perilaku menurut Miftah Toha (1986:35) adalah merupakan langkah dan strategi yang dilakukan oleh seseorang dalam proses organisasi sehubungan dengan pilihan alternatif dan konsekuensinya untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Khairuddin (1992:126) perilaku berupa motivasi dalam berpartisipasi terjadi karena: takut/terpaksa, ikut-ikutan, kesadaran.

Pada dasarnya keberhasilan pelaksanaan P2KP berdasarkan pada terwujudnya pencapaian Visi, Misi dan pencapaian tujuan P2KP itu sendiri. Adapun pelaksanaan, kelancaran dan keberhasilan sebuah program (Sumodiningrat, 1999) ditentukan oleh :

1. Peran serta kelompok masyarakat sebagai kelompok sasaran dan sekaligus pelaksana.
2. Dukungan segenap aparat pemerintah di pusat dan di daerah.
3. Pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh pendamping secara khusus bertugas untuk mendampingi kelompok masyarakat.
4. Berbagai pihak yang peduli pada pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuh pada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satu kelompok/antar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia maka partisipasi dapat disebut sebagai “Falsafah Pembangunan Indonesia”. Dengan demikian sudah

se wajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konsep partisipasi dan tiap partisipasi menurut Parwoto (1997) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Proaktif atau sukarela (tanpa disuruh)
- Adanya kesepakatan yang diambil bersama oleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebut
- Adanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut
- Adanya pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsur/pihak yang terlibat.

Konsep partisipasi dalam pembangunan kemudian disebut sebagai pembangunan partisipatif, yaitu pola pembangunan yang melibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintah, swasta dan masyarakat yang akan langsung menikmati/terkena akibat pembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konsep partisipasi, dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dan sekaligus sebagai objek dalam menikmati hasil pembangunan.

Pembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yang berwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstual sehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dari seluruh perencanaan makro. Hal ini sejalan dengan pendapat Jones (1996:293-294) dalam Putra (2001) yang menyebutkan bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya, namun demikian implementasi kebijakan sangat tergantung pada tatanan kebijakan itu sendiri (macro policy dan micro policy) artinya formulasi kebijakan makro yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Pembangunan partisipatif juga mempertemukan pendekatan dari atas (*top-down*), dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atas dan pendekatan dari bawah (*bottom-up*), yang menekankan keputusan di tangan masyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing. Dalam pembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yang terlibat.

Ada perbedaan wacana mengenai pembangunan dan partisipasi masyarakat, yaitu dari wacana pemerintah dan wacana masyarakat. Menurut Widyatmadja dan Goulet (dalam Prijono 1996:105) partisipasi dalam wacana

pemerintah adalah lebih menekankan pada pengorbanan dan kontribusi rakyat daripada hak untuk ikut menikmati manfaat pembangunan itu sendiri. Dari perspektif rakyat, partisipasi merupakan praktek dari keadilan dan hak untuk menikmati hasil pembangunan yang mungkin dapat menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Lebih lanjut menurut Soetrisno (1995:221) ada dua jenis definisi partisipasi yang beredar dalam masyarakat. Definisi pertama adalah definisi yang diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia. Definisi partisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukur dengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah.

Definisi kedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka. Ukuran lain yang dipakai oleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah ada tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil proyek itu.

Pengertian partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan (Moeliono,1988). Secara harfiah kata partisipasi bisa diartikan sebagai ikut serta, istilah partisipasi (*participation*) erat hubungannya dengan istilah *partnership*, yang berarti bahwa partisipasi hendaknya harus disertai dengan sikap ikut bertanggung jawab dari satu kesatuan yang turut ambil bagian di dalam aktifitas tersebut.

Sedangkan partisipasi (Sastropetro, 1986:11) merupakan sinonim dari peran serta, keikutsertaan, keterlibatan. Partisipasi juga memiliki arti sebagai hubungan dengan pihak lain dalam sebuah ikatan dengan hak-hak dan kewajiban

tertentu, dan terdapat pembagian keuntungan/manfaat di antara pihak-pihak yang mengambil bagian tersebut, seperti pendapat Narine (dalam Midgley, 1986:113) bahwa partisipasi merupakan bentuk hubungan yang saling menguntungkan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam partisipasi terdapat proses tindakan pada suatu kegiatan yang terdefiniskan sebelumnya. Dengan kata lain ada keadaan tertentu lebih dahulu, baru kemudian ada tindakan mengambil bagian. Partisipasi juga membutuhkan suatu wadah untuk menjaga hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Dengan pengertian di atas, partisipasi dapat terjadi pada tahap perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi, dan pengelolaan kegiatan. Dalam urutan kegiatan ini, partisipasi pada suatu tahap akan mempengaruhi tahap selanjutnya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut PBB (United Nations dalam Midgley, 1986:24) adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat secara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan dan berbagi hasil pembangunan secara adil.

Menurut pendapat Ramos dan Roman (dalam Yeung, Mc Gee, 1986:97) peran serta masyarakat berarti menyiapkan pemerintah dan masyarakat untuk menerima tanggung jawab dan aktifitas tertentu. Dalam hal ini terdapat pendelegasian wewenang dari pemerintah dan masyarakat dalam aktifitas tertentu.

Menurut Gordon Allport (dalam Sastropetro, 1986:12) partisipasi adalah keterlibatan ego atau diri sendiri/pribadi/personalitas (kejiwaan) lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja. Keterlibatan dirinya berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya. Misalkan jika anda berpartisipasi, maka anda melakukan kegiatan itu karena menurut pikiran anda perlu dan perasaan andapun menyetujui/berkenan untuk melakukannya.

Menurut Keith Davis (dalam Sastropetro, 1986:51) partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada tujuan/cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya. Sedangkan menurut Achmadi (dalam Sastropetro, 1986:51) pada simposium gotong-royong di Jakarta berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya gotong-royong merupakan modal utama. Swadaya adalah kemampuan

dari suatu kelompok masyarakat yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar pemenuhan kebutuhan.

Menurut Soetrisno (2004:207) Partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Karena partisipasi merupakan bentuk suatu kerjasama maka dalam definisi ini tidak diasumsikan bahwa subsistem disubordinasikan oleh suprasistem dan subsistem adalah sesuatu yang pasif dari suatu sistem pembangunan. Subsistem dalam konteks partisipasi ini diasumsikan mempunyai aspirasi, nilai budaya yang perlu diakomodasikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program pembangunan.

Menurut Sutarto (1980:125) partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara langsung maupun emosional untuk memberikan sumbangan-sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi seseorang yang bersangkutan melaksanakan akan tanggung jawab untuk menyelesaikan hal tersebut.

Menurut Alastraire White (dalam Sastropetro,1986:52) partisipasi adalah keterlibatan komuniti setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan. Sedangkan menurut Daryono, SH (dalam Sastropetro,1986:52) partisipasi berarti keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dari prioritas dalam rangka mengeksploitasikan sumber-sumber potensial dalam pembangunan.

Menurut Drs. RA. Santoso Sastropetro (1986:13) partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap usaha yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan tersebut.

Dari definisi-definisi partisipasi tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan individu (seseorang) yang berada dalam suatu kelompok yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dan

memberikan sumbangan terhadap usaha kelompok yang disertai dengan kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam studi ini kelompok masyarakat yang dimaksud adalah KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).

Adapun keterlibatan masyarakat dalam hal berpartisipasi meliputi bidang-bidang sebagai berikut (Darjono, SH dalam Sastropetro, 1986:19):

- a. Dalam proses pengambilan keputusan dan / atau proses perencanaan.
- b. Dalam proses pelaksanaan program.
- c. Dalam proses monitoring dan evaluasi terhadap program.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dimaksudkan agar masyarakat dapat menentukan terlebih dahulu segala sesuatunya dan mempersiapkan langkah-langkah atau tindakan-tindakan apa saja yang tepat dan sesuai yang akan dipakai dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program adalah dimana masyarakat yang terlibat melaksanakan serangkaian usaha yang telah direncanakan sebelumnya dengan menggunakan dan memanfaatkan segala potensi, sumberdaya yang dimiliki dan sarana-sarana/fasilitas-fasilitas yang ada dengan efisien dan efektif.

Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam proses monitoring (pengawasan/pemantauan) dan evaluasi terhadap program dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan sebelumnya dan tidak menyimpang. Dan evaluasi pada dasarnya mempunyai kaitan timbal balik dengan perencanaan, karena evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dalam pencapaian hasil. Dan hasil-hasil dari evaluasi tersebut dapat dijadikan acuan bagi perencanaan kembali.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap partisipasi masyarakat menurut Stuart Chapin, Faisal K. Dan Josef F. Stepanek (Iskandar, 1994:79) adalah:

- Keanggotaan seseorang dalam organisasi atau kelompok kegiatan masyarakat
- Intensitas kehadiran seseorang dalam berbagai pertemuan masyarakat
- Intensitas seseorang dalam memberikan sumbangan dana atau keuangan

- Keanggotaan seseorang dalam berbagai kepanitiaan yang dibentuk dalam masyarakat
 - Posisi kepemimpinan seseorang dalam berbagai organisasi/kelompok kegiatan
- Cohen dan Uphof, dalam Komarudin, (1997:320) dalam partisipasi masyarakat dikenal adanya tipe partisipasi, modus partisipasi dan siklus partisipasi, yaitu

Tipe partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

- a. Partisipasi dalam membuat keputusan (membuat beberapa pilihan dari banyak kemungkinan dan menyusun rencana-rencana yang bisa dilaksanakan, dapat atau layak dioperasionalisasikan)
- b. Partisipasi dalam implementasi (kontribusi sumberdaya, administrasi dan koordinasi kegiatan yang menyangkut tenaga kerja, biaya dan informasi)
- c. Dalam kegiatan yang memberikan keuntungan (material, sosial dan personel)
- d. Dalam kegiatan evaluasi termasuk keterlibatan dalam proses yang berjalan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Menurut Hall (1986:9) partisipasi masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang memandang masyarakat dalam konteks dinamis yang mampu memobilisasi sumber daya sesuai dengan kepentingan, kemampuan dan aspirasi yang dimiliki, baik secara individu maupun komunal.

Dalam Wibisana (1989:41) partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan hingga pelaksanaan program. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung berupa keuangan, pemikiran dan material yang diperlukan.

Kegiatan yang dapat digolongkan sebagai partisipasi menurut Surbakti (1984:72-73) adalah:

1. Ikut mengajukan usul-usul mengenai suatu kegiatan
2. Ikut serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan tentang alternatif program yang dianggap paling baik

3. Ikut serta melaksanakan apa yang telah diputuskan termasuk disini memberi iuran atau sumbangan materiil.
4. Ikut serta mengawasi pelaksanaan keputusan.

Menurut Slamet (1992) partisipasi merupakan keterlibatan aktif dan bermakna dari masa penduduk pada tingkatan-tingkatan yang berbeda, yaitu:

- a. Dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. Dalam pelaksanaan program-program atau proyek-proyek secara sukarela
- c. Dalam pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau proyek (sesuai dengan azas pembangunan yaitu pembagian yang merata atas hasil pembangunan)

Definisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan pada semua tahapan dalam proses pembangunan, dari tahapan perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, sampai tahapan pemanfaatan hasil-hasilnya.

Dalam Burke (2004:52-54) keuntungan dan masalah partisipasi akan dilihat dalam konteks yang berbeda oleh setiap orang yang berkepentingan. Secara umum, keuntungan dari partisipasi:

- a. Masyarakat akan merasa “memiliki” terhadap rencana kerja.
- b. Memungkinkan adanya ide-ide segar.
- c. Mendapat bantuan dalam bentuk barang atau sumber daya lainnya.
- d. Masyarakat akan tetap merasa menjadi bagian dari pemecahan masalah jangka panjang karena mereka telah mempunyai rasa memiliki terhadap ide-ide awal.
- e. Keikutsertaan dalam satu proyek atau program membangun kesadaran, kepercayaan dan keyakinan menjadi bagian penting pada proyek/kesempatan-kesempatan lainnya. Selain itu, keuntungan dari suatu keluaran atau *out put* yang lebih baik adalah issue “proses” membantu mengembangkan keterampilan dan *confidence* masyarakat. Keuntungan pada umumnya berkaitan dengan Kepentingan utama yang disepakati pada tingkat partisipasi yang tepat; kesamaan bahasa untuk mendiskusikan issue dan mengembangkan ide-ide; dan metode-metode tepat guna yang dipakai sebanyak mungkin sesuai

kesepakatan untuk mencapai hasil yang diinginkan

Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diketahui berdasarkan besarnya pengaruh yang dimiliki masyarakat di dalam proses penentuan permasalahan beserta hasilnya, dari pengaruh yang kecil sampai kepada pengaruh yang besar. Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan terdiri dari

1. Tinjauan dan Komentar

Masyarakat diberi kesempatan untuk meninjau suatu rencana yang diusulkan. Komentar dapat dibuat, tetapi organisasi perencanaan tidak terikat untuk mengubah atau memodifikasi rencana tersebut. Peran ini bersifat pasif, yang dirancang terutama untuk menyediakan informasi kepada masyarakat dan kelompok.

2. Konsultasi

Dengan peran ini, masyarakat diangkat dan dimintai masukan serta informasi khusus. Metode yang dipergunakan untuk memperoleh masukan adalah melalui pertemuan dan kuesioner. Peran masyarakat sebagai konsultan adalah untuk menjadi bagian dari usaha pembuatan keputusan. Tujuan dari peran konsultasi ini bersifat lebih jauh, bukan hanya sebagai penyedia informasi bagi masyarakat. Peran ini merupakan proses komunikasi dua arah di mana tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki keputusan.

3. Pemberi Nasehat

Pengaruh dan peran masyarakat bersifat lebih besar karena masyarakat diangkat ke dalam organisasi dan ditempatkan pada komite kebijakan dan perencanaan di dalam organisasi perencanaan tersebut. Tujuan dari peran ini adalah untuk memperoleh informasi maupun dukungan terorganisir untuk kegiatan-kegiatan.

4. Pengambilan Keputusan Bersama

Peran ini menggambarkan partisipasi masyarakat dan perencana yang bertindak sebagai mitra di dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk mencapai keputusan yang mencerminkan keinginan tim perencana yang di dalamnya memuat aspirasi masyarakat.

5. Pengambilan Keputusan Terkendali

Dalam peran ini, masyarakat memiliki wewenang penuh atas semua kebijakan dan keputusan. Peran dari para staf profesional adalah untuk memfasilitasi pengambilan keputusan, yaitu untuk bertindak sebagai penasehat dan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan oleh masyarakat. Peran partisipasi masyarakat ini sangat umum untuk organisasi yang bersifat sukarela.

Pendekatan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, memungkinkan keseimbangan antara kepentingan administrasi dari pemerintah setempat dan integrasi penduduk setempat dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat lokal. Terdapat 2 (dua) macam partisipasi penduduk, yaitu (Jayadinata, 1999:201-202):

1. Partisipasi Vertikal

Penduduk diberi lebih banyak kesempatan untuk menyumbangkan pendapatnya dalam pembangunan. Interaksi dengan cara dari bawah ke atas (*bottom up*) dalam hal:

- a. Teknik belajar dan mendengarkan (masyarakat diberi informasi mengenai masalah aktual).
- b. Pengumuman informasi berhubungan dengan program yang diusulkan.
- c. Masukan yang terus dari berbagai golongan.
- d. Penelaahan kembali rencana yang diusulkan.

2. Partisipasi Horisontal

Dalam partisipasi ini masyarakat berinteraksi secara horizontal dalam hal:

- a. Masyarakat setempat berinteraksi dengan berbagai kelompok lain.
- b. Mengambil pengalaman dari kelompok lain.
- c. Mempengaruhi agar persentase partisipasi penduduk menjadi lebih besar.

Partisipasi masyarakat secara umum terbagi dalam 8 (delapan) tingkatan menurut Arstein (dalam Panudju, 1999:72 -76) tingkatan-tingkatan tersebut, adalah:

1. *Manipulation*

Merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah karena masyarakat hanya dipakai namanya saja sebagai anggota dalam berbagai badan penasehat. Tidak

ada peran yang nyata, karena hanya diselewengkan sebagai publikasi oleh pihak penguasa.

2. *Theraphy*

Pada tingkatan ini, masyarakat diperlakukan seolah-olah seperti proses penyembuhan pasien penyakit jiwa dalam grup terapi. Masyarakat terlibat dalam banyak kegiatan, namun hal tersebut hanya ditujukan untuk mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan informasi atau usulan-usulan.

3. *Informing*

Merupakan tahap pemberian informasi kepada masyarakat tentang hak-hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan. Biasanya hanya diberikan secara satu arah, dari penguasa ke rakyat, tanpa adanya kemungkinan umpan balik, Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk mempengaruhi rencana bagi kepentingan masyarakat. Biasanya dilakukan dengan cara media berita, pamflet, poster dan tanggapan atas pertanyaan.

4. *Consultation*

Mengundang opini masyarakat, setelah memberi informasi kepada mereka. Apabila konsultasi tidak disertai dengan cara-cara partisipasi yang lain, maka tingkat keberhasilannya akan rendah, mengingat tidak adanya jaminan kepedulian terhadap ide-ide masyarakat. Tahap ini biasanya dilakukan dengan cara pertemuan lingkungan, survei tentang pola pikir masyarakat dan dengar pendapat publik.

5. *Placation*

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai pengaruh, meskipun dalam beberapa hal masih ditentukan oleh penguasa. Beberapa anggota masyarakat yang dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan kerjasama. Usul-usul dari masyarakat berprestasi rendah dapat dikemukakan, tetapi sering tidak diperhitungkan karena kemampuan dan kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit bila dibandingkan dengan anggota-anggota instansi pemerintah lainnya.

6. *Partnership*

Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara masyarakat dengan pihak penguasa. Disepakati juga pembagian

tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi. Setelah adanya kesepakatan tersebut maka tidak dibenarkan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan secara sepihak.

7. *Delegated Power*

Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana atau program tertentu. Masyarakat berhak menentukan program-program yang bermanfaat bagi mereka. Untuk memecahkan masalah, pemerintah harus mengadakan tawar-menawar tanpa adanya tekanan.

8. *Citizen Control*

Pada tingkat ini masyarakat mempunyai kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Masyarakat mempunyai kewenangan penuh di bidang kebijaksanaan, aspek-aspek pengelolaan dan dapat mengadakan negosiasi dengan "pihak-pihak luar" yang hendak melakukan perubahan.

2.4 Sintesis Literatur

Ringkasan kajian teoritis ini dibentuk berdasarkan kajian teori yang akan digunakan dalam pelaksanaan dan pembahasan studi, seperti pada tabel di bawah ini:

TABEL II.2
SINTESIS LITERATUR

LITERATUR	SUB BAHASAN	URAIAN	VARIABEL
A. Landasan Teori Kemiskinan Perkotaan			
Esmara (dalam Nurhadi, 2007: 21)	Kemiskinan perkotaan	Pendekatan yang biasa dipakai untuk mengukur garis kemiskinan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan kebutuhan pengeluaran minimum untuk makan - pendekatan kebutuhan gizi minimum - Pendekatan kebutuhan dasar - Konsep garis kemiskinan internasional. 	Ukuran Kemiskinan
B. Landasan Teori Pemberdayaan masyarakat			
Dahl (1963)	Pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan dalam wacana politik merupakan sebuah kekuatan yang menyangkut suatu kemampuan seseorang (pihak pertama) untuk mempengaruhi orang lain (pihak kedua) yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pihak kedua.	pemberdayaan

Tabel II.2 Lanjutan...

LITERATUR	SUB BAHASAN	URAIAN	VARIABEL
C. Landasan Teori Partisipasi Masyarakat			
Saparian (1979:202)	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Sikap adalah kemampuan individu yang ditujukan pada penyesuaian diri terhadap nilai-nilai yang telah berkembang sesuai tuntutan kemajuan jaman, baik yang bersikap kemasyarakatan maupun politis agama legalistis secara pembaharuan dibidang teknologi dan pembangunan.	Sikap masyarakat dalam berpartisipasi
Khairuddin (1992:126)		Ditinjau dari motivasinya, partisipasi masyarakat terjadi karena: - Takut/terpaksa - Ikut-ikutan - Kesadaran	Motivasi masyarakat dalam berpartisipasi
Soelaiman (1985:15-20)		Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat: - Keanggotaan seseorang dalam organisasi atau kelompok kegiatan masyarakat - Intensitas kehadiran seseorang dalam berbagai pertemuan masyarakat - Intensitas seseorang dalam memberikan sumbangan dana atau keuangan - Keanggotaan seseorang dalam berbagai kepanitiaan yang dibentuk dalam masyarakat - Posisi kepemimpinan seseorang dalam berbagai organisasi/kelompok kegiatan	Intensitas kehadiran seseorang dalam berbagai pertemuan
Sutarto (1980:125)		Partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara langsung maupun emosional untuk memberikan sumbangan-sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi seseorang yang bersangkutan melaksanakan akan tanggung jawab untuk menyelesaikan hal tersebut.	- Bentuk sumbangan - Kesediaan bertanggung jawab
Surbakti (1984:72-73)		Kegiatan yang dapat digolongkan sebagai partisipasi menurut adalah: - Ikut mengajukan usul-usul mengenai suatu kegiatan - Ikut serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan tentang alternatif program yang dianggap paling baik - Ikut serta melaksanakan apa yang telah diputuskan termasuk disini memberi iuran atau sumbangan meteril. - Ikut serta mengawasi pelaksanaan keputusan.	- Usulan program

Tabel II.2 Lanjutan...

LITERATUR	SUB BAHASAN	URAIAN	VARIABEL
Arstein (1969)	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	<p>Tangga partisipasi terdiri dari:</p> <p>Manipulation; Merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah karena masyarakat hanya dipakai namanya saja dan tidak tercatat sebagai anggota dalam berbagai badan penasehat. Tidak ada peran yang nyata, karena hanya diselewengkan sebagai publikasi oleh pihak penguasa.</p> <p>Therapy; Pada tingkatan ini, masyarakat diperlakukan seolah-olah seperti proses penyembuhan pasien penyakit jiwa dalam grup terapi. Masyarakat terlibat dalam banyak kegiatan dengan perintah-perintah, namun hal tersebut hanya ditujukan untuk mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan informasi atau usulan-usulan.</p> <p>Informing; Merupakan tahap pemberian informasi kepada masyarakat tentang hak-hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan. Biasanya hanya diberikan secara satu arah, dari penguasa ke rakyat, tanpa adanya kemungkinan umpan balik/masukan dari rakyat, Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk mempengaruhi rencana bagi kepentingan masyarakat. Biasanya dilakukan dengan cara media berita, pamflet, poster dan tanggapan atas pertanyaan.</p> <p>Consultation; Mengundang opini/masukan atau usulan masyarakat, setelah memberi informasi kepada mereka. Apabila konsultasi tidak disertai dengan cara-cara partisipasi yang lain, maka tingkat keberhasilannya akan rendah, mengingat tidak adanya jaminan kepedulian terhadap ide-ide masyarakat. Tahap ini biasanya dilakukan dengan cara pertemuan lingkungan, survei tentang pola pikir masyarakat dan dengan pendapat publik.</p> <p>Placation; Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai pengaruh, meskipun dalam beberapa hal masih ditentukan oleh penguasa. Beberapa anggota masyarakat yang dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan kerjasama. Usul-usul dari masyarakat berpenghasilan rendah dapat dikemukakan, tetapi sering tidak diperhitungkan karena kemampuan dan kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit bila dibandingkan dengan lainnya anggota-anggota instansi pemerintah.</p>	- Tingkatan atau peran masyarakat dalam program P2KP

Tabel II.2 Lanjutan...

LITERATUR	SUB BAHASAN	URAIAN	VARIABEL
		<ul style="list-style-type: none"> - Partnership; Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara masyarakat dengan pihak penguasa. Disepakati juga pembagian tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi. Tidak dibenarkan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan secara sepihak - Delegated Power; Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana atau program tertentu. Masyarakat berhak menentukan program yang bermanfaat bagi mereka. Untuk memecahkan masalah, pemerintah harus mengadakan tawar-menawar tanpa adanya tekanan. - Citizen Control; Pada tingkat ini masyarakat mempunyai kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Masyarakat mempunyai kewenangan penuh di bidang kebijaksanaan, aspek-aspek pengelolaan dan dapat mengadakan negosiasi dengan "pihak-pihak luar" yang hendak melakukan perubahan. 	

Sumber: penyusun, 2009

2.5 Variabel Penelitian

Dari teori-teori tersebut, maka diketahui variabel-variabel penelitian sebagai batasan-batasan studi dan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

TABEL II. 3
VARIABEL PENELITIAN

No	Sasaran	Teori	Variabel	Keterangan
1	Mengidentifikasi pencairan dan pemanfaatan dana bergulir	Dahl (1963:50) Pemberdayaan merupakan sebuah kekuatan yang menyangkut suatu kemampuan seseorang (pihak pertama) untuk mempengaruhi orang lain (pihak kedua) yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pihak kedua.	<ul style="list-style-type: none"> - Penentuan sasaran masyarakat miskin - Penyusunan usulan kegiatan - Pencairan dana bergulir - Pemanfaatan dana bergulir - Besar anggaran pinjaman bergulir - Tingkat pengembalian pinjaman - Tingkat kemanfaatan 	Penyediaan dan pemanfaatan dana bergulir merupakan pokok kegiatan dari program P2KP yang menganut pendekatan pemberdayaan masyarakat

Tabel II.3 Lanjutan...

No	Sasaran	Teori	Variabel	Keterangan
2	Mengkaji Partisipasi Kelompok Swadaya Masyarakat pada pencairan dan pemanfaatan dana bergulir	<p>Saparian (1979:202) Sikap adalah kemampuan individu yang ditujukan pada penyesuaian diri terhadap nilai-nilai yang telah berkembang sesuai tuntutan kemajuan jaman, baik yang bersikap kemasyarakatan maupun politis agama legalistis secara pembaharuan dibidang teknologi dan pembangunan.</p> <p>Khairuddin (1992:126) Ditinjau dari motivasinya, partisipasi masyarakat terjadi karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Takut/terpaksa - Ikut-ikutan - Kesadaran <p>Soelaiman (1985:15-20) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keanggotaan seseorang dalam organisasi atau kelompok kegiatan masyarakat - Intensitas kehadiran seseorang dalam berbagai pertemuan masyarakat - Intensitas seseorang dalam memberikan sumbangan dana atau keuangan - Keanggotaan seseorang dalam berbagai kepanitiaan yang dibentuk dalam masyarakat - Posisi kepemimpinan seseorang dalam berbagai organisasi/kelompok kegiatan <p>Sutarto (1980:125) Partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara langsung maupun emosional untuk memberikan sumbangan-sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi seseorang yang bersangkutan melaksanakan akan tanggung jawab untuk menyelesaikan hal tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sikap - Motivasi - Intensitas dalam pelaksanaan kegiatan - Bentuk sumbangan - Kesiediaan bertanggung jawab 	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tergantung dari besarnya pengaruh yang dimiliki di masyarakat. (Burke 2004)

Tabel II.3 Lanjutan...

No	Sasaran	Teori	Variabel	Keterangan
		<p>Surbakti (1984:72-73) Kegiatan yang dapat digolongkan sebagai partisipasi adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ikut mengajukan usul-usul mengenai suatu kegiatan - Ikut serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan tentang alternatif program yang dianggap paling baik - Ikut serta melaksanakan apa yang telah diputuskan termasuk disini memberi iuran atau sumbangan materiil. - Ikut serta mengawasi pelaksanaan keputusan. 	- Usulan program	
3	Menganalisa tingkat partisipasi masyarakat pada dan pemanfaatan dana bergulir	<p>Arstein (dalam Panudju, 1999:72-76) Tingkatan partisipasi masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Manipulation</i> 2. <i>Theraphy</i> 3. <i>Informing</i> 4. <i>Consultation</i> 5. <i>Placation</i> 6. <i>Partnership</i> 7. <i>Delegated Power</i> 8. <i>Citizen Control.</i> 	Tingkatan atau peran masyarakat dalam program P2KP	

Sumber: Penyusun, 2009

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH KELURAHAN TAWANG MAS KOTA SEMARANG DAN PROGRAM P2KP

3.1 Keadaan Umum Kelurahan Tawang Mas

Lokasi penelitian berada di wilayah Kelurahan Tawang Mas Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Adapun keadaan umum lokasi penelitian akan dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

3.1.1 Keadaan Geografis

Kelurahan Tawang Mas merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 199.569 Ha dan terbagi atas 10 RW dan 49 RT, dengan batasan-batasan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Semarang Barat
- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Kelurahan Panggung Lor Kecamatan Semarang Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Panggung Kidul Kecamatan Semarang Barat
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Barat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Karangayu dan Krobokan Kecamatan Semarang Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tawang Sari.

3.1.2 Keadaan Demografi

Adapun persebaran penduduk di wilayah Kelurahan Tawang Mas Kecamatan Semarang Barat cukup merata, dengan jumlah penduduk 6.743 jiwa pada tahun 2007, yang terdiri dari 3.392 jiwa penduduk laki-laki, 3.351 jiwa penduduk perempuan dan terdiri 1.666 Kepala Keluarga.

Sedangkan jumlah penduduk di Kelurahan Tawang Mas menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL III.1
JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN TAWANG MAS MENURUT
KELOMPOK UMUR

NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH (JIWA)	PERSENTASE
1	0 – 4 Tahun	787	11,67 %
2	5 - 9 Tahun	719	10,66 %
3	10 – 14 Tahun	743	11,02 %
4	15 – 19 Tahun	932	13,82 %
5	20 – 24 Tahun	813	12,06 %
6	25 – 29 Tahun	517	7,67 %
7	30 – 34 Tahun	387	5,74 %
8	35 – 39 Tahun	397	5,89 %
9	40 – 44 Tahun	382	5,66 %
10	45 – 49 Tahun	313	4,64 %
11	50 – 59 Tahun	242	3,59 %
12	55 – 59 Tahun	157	2,33 %
13	60 – 64 Tahun	170	2,52 %
14	65 Tahun Keatas	184	2,73 %
	Jumlah	6.743	100

Sumber : Data Monografi Kelurahan Tawang Mas Tahun 2007

Berdasarkan data di atas, angka ketergantungan atau *dependency ratio* di Kelurahan Tawang Mas adalah 54 artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif, menanggung 54 penduduk usia non produktif di Kelurahan Tawang Mas. Kepadatan penduduk (*Density of Population*) setiap 1 km² ditempati oleh 3.379 jiwa. Jadi, wilayah Kelurahan Tawang Mas dapat dikategorikan termasuk wilayah yang cukup padat penduduknya.

3.1.3 Keadaan Sosial Ekonomi

Di Kelurahan Tawang Mas, sebagian besar masyarakatnya beragama Islam yaitu sebesar 5.866 orang (87%), disamping pemeluk agama lainnya. Namun begitu perkembangan agama di kelurahan ini amat baik dan harmonis, karena hubungan dan toleransi antar umat bergama terpelihara dengan baik. Adapun jumlah penduduk Kelurahan Tawang Mas sesuai dengan golongan agama yang dianut pada tabel berikut:

TABEL III.2
JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN AGAMA
YANG DIANUT

NO	AGAMA	BANYAKNYA PENDUDUK (JIWA)	PERSENTASE
1	Islam	5.866	87 %
2	Katholik	372	5,52 %
3	Protestan	405	6 %
4	Hindu	25	0,37 %
5	Budha	75	1,11 %
	Jumlah	6.743	100

Sumber : Data Monografi Kelurahan Tawang Mas, Tahun 2007

Dilihat dari tingkat pendidikannya, penduduk di Kelurahan Tawang Mas sudah cukup sadar akan pentingnya pendidikan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel III.3 dan dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat pendidikan yang menonjol pada penduduk Kelurahan Tawang Mas adalah tamat SLTP sebanyak 1.639 (24,31%), diikuti dengan setingkat SLTA sebanyak 1.573 (23,33%) dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat yang menyadari pentingnya pendidikan cukup tinggi bila dibandingkan dengan penduduk yang tidak tamat SD dan yang belum sekolah sebanyak 1.810 (26,84 %). Adapun untuk tamatan setingkat akademi dan perguruan tinggi adalah sebanyak 334 jiwa (4,95%)

TABEL III.3
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK
KELURAHAN TAWANG MAS

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (JIWA)	PERSENTASE
1	Perguruan Tinggi	134	1,99 %
2	Tamat Akademi	200	2,96 %
3	Tamat SLTA	1.573	23,33 %
4	Tamat SLTP	1.639	24,31 %
5	Tamat SD	1.387	20,57 %
6	Tidak Tamat SD	1.233	18,28 %
7	Belum Sekolah	577	8,56 %
	Jumlah	6.743	100

Sumber : Data Monografi Kelurahan Tawang Mas, Tahun 2007

TABEL III.4
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK KELURAHAN TAWANG MAS
(BAGI UMUR 10 TAHUN KEATAS)

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	JUMLAH (JIWA)	PROSENTASE
1	Nelayan	23	4,44 %
2	Pengrajin	50	9,65 %
3	Buruh tani	135	26,06 %
4	Buruh industri	103	19,88 %
5	Buruh bangunan	65	12,55 %
6	Pedagang	18	3,48 %
7	Pegawi Negeri Sipil	52	10,04 %
8	ABRI	19	3,67 %
9	Pensiunan	37	7,14 %
10	Peternak	16	3,09 %
	Jumlah	518	100

Sumber : Data Monografi Kelurahan Tawang Mas, Tahun 2007

Sedangkan apabila dilihat dari mata pencahariannya, penduduk di Kelurahan Tawang Mas memiliki mata pencaharian beraneka ragam dan sebagian besar bergerak dibidang jasa. Untuk mengetahui lebih jelas mata pencaharian yang dimiliki penduduk Kelurahan Tawang Mas dapat dilihat pada tabel III.4, dimana dapat dijelaskan bahwa 26,06 % penduduk Kelurahan Tawang Mas mempunyai mata pencaharian yang bergerak dibidang buruh tani, yaitu petani tambak. Kemudian 20,85 % Penduduknya adalah Pegawai Negeri (ABRI dan Pensiunan), sedangkan jumlah yang paling kecil sendiri adalah sebagai peternak dengan 3,09 %.

3.2 Gambaran Umum Program P2KP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang PROPENAS, pemerintah secara tegas menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun (2000-2004) adalah berkurangnya penduduk miskin absolut sebesar 4% dari tingkat kemiskinan 1999. Salah satu langkah strategis pemerintah adalah melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) baik Tahap I maupun Tahap II yang dimulai tahun 2003-2008 (Kuncoro,2004).

3.2.1 Pengertian, Tujuan dan Sasaran P2KP

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah merupakan suatu program bantuan yang telah dirancang oleh pemerintah dalam rangka membantu masyarakat menanggulangi dan mengentaskan persoalan kemiskinan yaitu khusus pada masyarakat di perkotaan baik yang bersifat struktural maupun yang diakibatkan oleh dampak krisis ekonomi. Program P2KP ini menganut pada pemberdayaan masyarakat sebagai syarat menuju pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Sehingga dengan demikian diharapkan masyarakat mampu mengatasi persoalan yang mereka hadapi secara mandiri serta mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki.

Adapun tujuan dari pelaksanaan P2KP ini adalah untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan di perkotaan melalui penyediaan dana

bantuan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan dalam upaya pengembangan kegiatan usaha produktif pengusaha-pengusaha kecil.

Sedangkan sasaran dari pelaksanaan P2KP ini adalah perorangan dan keluarga miskin yang mempunyai usaha terutama usaha kecil yang berada di wilayah administrasi pemerintahan di tingkat kota baik yang berstatus Kelurahan maupun Desa Perkotaan.

3.2.2 Pelaksanaan Program P2KP

Secara nasional lembaga penyelenggara (*executing agency*) proyek P2KP adalah Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) yang untuk kelancaran tugas membentuk PMU (*Project Manangement Unit*). PMU ini didukung oleh Tim Pengarah Inter Departemen, yang terdiri dari unsur-unsur terkait, antara lain: Bappenas, Departemen Kimpraswil, Departemen Keuangan dan Kantor Menko Kesra/Komite Penanggulangan Kemiskinan. Di Tingkat pusat untuk kelancaran pelaksanaan P2KP dibentuk Tim Pengarah Inter Departemen dan *Project Management Unit* (PMU)

Dalam pelaksanaan program P2KP, dibentuk tim koordinasi pada beberapa institusi yang terkait yaitu sebagai berikut:

a. Di Tingkat Provinsi

Pemerintah Propinsi berperan memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya. Penanggung jawab pelaksanaan P2KP di tingkat propinsi adalah Bappeda Propinsi, yang untuk kelancaran tugasnya dapat membentuk Tim Koordinasi antar instansi terkait ditingkat propinsi.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pemasyarakatan program P2KP kepada instansi pemerintah di tingkat propinsi dan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten di wilayahnya;
- Memfasilitasi terjadinya koordinasi pelaksanaan P2KP di wilayahnya;
- Memantau kegiatan pelaksanaan P2KP dan menerima laporan tahunan dari Pemerintah Kota/Kabupaten;
- Mendorong Pemerintah Kota/Kabupaten untuk menumbuh-kembangkan pola-pola pembangunan partisipatif dengan cara membangun sinergi dan

memadukan program yang disusun masyarakat dengan program pembangunan pemerintah dan tercermin dalam APBD Kota/Kabupaten;

- Mengalokasikan anggaran Biaya Operasional Proyek P2KP yang diperlukan untuk tingkat Propinsi;
- Berkoordinasi dengan KMW, menyelesaikan persoalan dan konflik yang muncul serta menangani pengaduan-pengaduan, yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kota/kabupaten.

b. Di Tingkat Kota/Kabupaten

Pemerintah Kota/Kabupaten berperan menjamin kelancaran pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya. Penanggung jawab pelaksanaan P2KP di tingkat kota/kabupaten adalah Bappeda kota/kabupaten, yang untuk kelancaran tugasnya dapat membentuk Tim Koordinasi antar instansi terkait di tingkat kota/kabupaten.

Tugas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam rangka P2KP, antara lain adalah:

- Membentuk tim koordinasi kota/kabupaten di Bappeda dan mengangkat penanggung jawab operasional (PJOK) di tingkat kecamatan untuk pencairan dana BLM;
- Membangun kerjasama antar para pelaksana P2KP, baik pelaksana dari instansi pemerintah, konsultan maupun masyarakat;
- Mengalokasikan Biaya Operasional Proyek (BOP) secara tepat waktu dan tepat kebutuhan, baik untuk BOP-Koordinasi, BOP-PJOK, BOP-Kelurahan, maupun biaya-biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan P2KP yang tidak disediakan oleh APBN, APBD Propinsi, dan pinjaman Bank Dunia;
- Pemasyarakatan program P2KP kepada instansi pemerintah ditingkat kota/kabupaten termasuk kecamatan dan kelurahan di wilayahnya;
- Bersama dengan KMW, mendorong pelibatan masyarakat, KSM, BKM dan forum BKM dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif, mulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan hingga kota/kabupaten antara lain dalam bentuk keikutsertaan organisasi masyarakat tersebut dalam kegiatan Rakorbang, sesuai dengan kebutuhan;

- Memadukan kebutuhan dan program penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat melalui penetapan kebijakan program pemerintah kota/kabupaten khususnya yang dibiayai oleh APBD kota/kabupaten;
- Mendorong terbentuknya Forum Konsultasi Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan, sesuai dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan setempat;
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum Komunikasi BKM tingkat kota/kabupaten;
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan P2KP dan menerima laporan kegiatan dari PJOK;
- Berkoordinasi dengan koordinator kota KMW, menyelesaikan masalah dan konflik yang muncul serta menangani pengaduan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat BKM/kelurahan.

c. Di Tingkat Kecamatan

Di tingkat kecamatan unsur yang masuk dalam pelaksanaan P2KP adalah:

1. Camat dan perangkatnya

Peran dan tugas Camat dan perangkatnya adalah:

Peran pokok Camat adalah memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- Melakukan pemasyarakatan program P2KP kepada lurah dan perangkat kelurahan di wilayah kerjanya;
- Memfasilitasi berlangsungnya koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya;
- Melakukan pemantauan pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya melalui laporan para Lurah;
- Mendorong dan mendukung tumbuhnya prakarsa dan partisipasi warga masyarakat di wilayahnya;
- Memadukan dan mensinergikan kebutuhan dan rencana program penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat melalui penetapan kebijakan dalam program pembangunan desa;

- Mendorong proses pembangunan partisipatif dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya;
- Memfasilitasi masyarakat dalam merumuskan program penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya;
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum Komunikasi BKM, Forum KSM dan kelompok peduli lainnya untuk meningkatkan keberhasilan P2KP;
- Berkoordinasi dengan tim fasilitator, memfasilitasi penyelesaian masalah, konflik dan penanganan pengaduan yang muncul di wilayahnya.

2. Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK)

Peran Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) adalah sebagai pelaksana proyek P2KP di tingkat kecamatan dan bertanggung jawab atas aspek administrasi pencairan dana BLM di dalam wilayah kerjanya. PJOK diangkat oleh Bupati/Walikota, dengan tugas:

- Memantau proses pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan;
- Memfasilitasi proses pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat di wilayah kerjanya. Bentuk-bentuk fasilitasi dikonsultasikan dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan KMW serta juga dengan tim fasilitator yang ada di wilayah kerjanya.
- Melaksanakan pengadministrasian proyek yang meliputi: menandatangani SPPB, memproses SPP ke KPKN dll;
- Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas setiap bulan. Laporan bulanan dibuat rangkap empat untuk diserahkan sebelum tanggal 15 setiap bulan kepada bupati/walikota. Laporan tersebut dikirim sebagai tembusan kepada Camat, Lurah dan BKM-BKM di wilayah kerjanya;
- Membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya dan menyerahkannya kepada bupati/walikota paling lambat satu bulan setelah masa tugasnya sebagai PJOK berakhir. Jika terjadi pergantian PJOK antar waktu, maka PJOK sebelumnya harus menyerahkan satu copy laporan kepada PJOK penggantinya. Laporan pertanggung-

jawaban PJOK memuat pelaksanaan tugas, hasil-hasil kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi serta dilengkapi dengan uraian dan penjelasan penggunaan dana BOP PJOK;

- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan P2KP bersama-sama dengan tim fasilitator kecamatan.

d. Di Tingkat Kelurahan

Secara umum peran utama Lurah atau Kepala Desa adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui P2KP dapat tercapai dengan baik. Untuk itu Lurah/Kepala Desa dapat mengerahkan perangkat kelurahan atau desa sesuai dengan fungsi masing-masing.

Rincian tugas dan tanggung jawab Lurah/Kepala Desa dalam pelaksanaan P2KP adalah sebagai berikut:

- Membantu pemasyarakatan awal P2KP keseluruhan masyarakat di kelurahan bersangkutan;
- Memfasilitasi proses pengambilan keputusan oleh masyarakat untuk menerima/menolak P2KP termasuk atas nama warga mengajukan surat Bappeda Kota/Kabupaten dan KMW bila masyarakat menerima P2KP;
- Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan pengurus RT/RW dan masyarakat dengan KMW/fasilitator dan kader masyarakat dalam upaya penyebaran informasi dan pelaksanaan P2KP;
- Membantu memfasilitasi proses pembentukan kelembagaan komunitas didalam wilayah kerjanya. (bentuk-bentuk dukungan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta ketentuan P2KP);
- Membantu memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan termasuk peninjauan lapangan;

- Membantu memfasilitasi pelaksanaan pemetaan swadaya (*Community Self mapping*) dalam rangka pemetaan kemiskinan dan potensi sumberdaya komunitas yang dilaksanakan masyarakat;
- Memfasilitasi dan mendukung penyusunan Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan dan program tahunannya oleh masyarakat yang diorganisasikan oleh organisasi masyarakat setempat (BKM);
- Mendorong tumbuh berkembangnya proses pembangunan partisipatif di desa/kelurahannya;
- Memberi laporan bulanan pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya kepada Camat;
- Berkoordinasi dengan fasilitator, kader masyarakat dan BKM, memfasilitasi penyelesaian masalah dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya.

P2KP menyakini bahwa pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan proses perubahan perilaku masyarakat adalah melalui pendekatan pemberdayaan atau proses pembelajaran (*edukasi*) masyarakat dan penguatan kapasitas untuk mengedepankan peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakatnya. Kedua substansi P2KP tersebut sangat penting sebagai upaya proses transformasi P2KP dari '*tataran Proyek*' menjadi '*tataran program*' oleh masyarakat bersama pemerintah daerah setempat. Bagaimanapun harus disadari bahwa upaya dan pendekatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi perhatian pemerintah pusat, melainkan justru yang terpenting harus menjadi prioritas perhatian dan kebutuhan masyarakat bersama pemerintah daerah itu sendiri.

Substansi P2KP sebagai proses pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat dilakukan dengan terus menerus untuk menumbuhkembangkan kesadaran kritis masyarakat terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Proses pembelajaran di tingkat masyarakat ini berlangsung selama masa Program P2KP maupun pasca Program P2KP oleh masyarakat sendiri dengan membangun dan melembagakan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK).

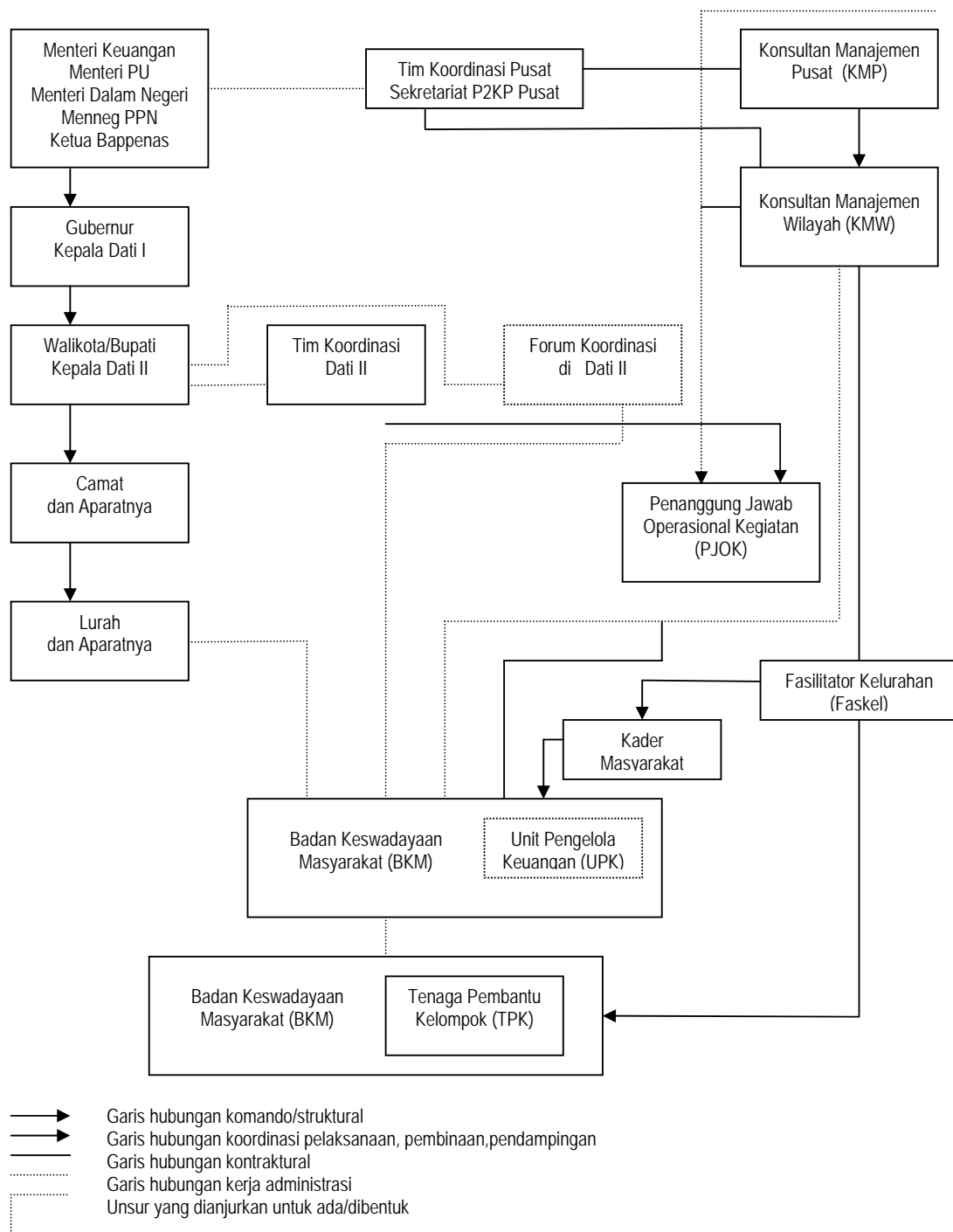
Sedangkan substansi P2KP sebagai penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mengedepankan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah, dilakukan melalui; pelibatan intensif Pemda pada pelaksanaan siklus kegiatan P2KP, penguatan peran dan fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) agar mampu menyusun Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan PJM Pronangkis Kota/Kabupaten berbasis program masyarakat (Pronangkis Kelurahan), serta melembagakan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP). Semua pendekatan yang dilakukan P2KP di atas, ditujukan untuk mendorong proses percepatan terbangunnya landasan yang kokoh bagi terwujudnya kemandirian penanggulangan kemiskinan dan juga melembaganya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Dengan demikian, pelaksanaan P2KP sebagai “*gerakan bersama membangun kemandirian dan pembangunan berkelanjutan yang berbasis nilai-nilai universal*” diyakini akan mampu membangun kesadaran kritis dan perubahan perilaku individu ke arah yang lebih baik. Perubahan perilaku individu yang secara kumulatif menimbulkan perubahan kolektif masyarakat inilah yang menjadi inti pendekatan TRIDAYA, yakni proses pemberdayaan masyarakat agar terbangun: daya sosial sehingga tercipta masyarakat efektif, daya ekonomi sehingga tercipta masyarakat produktif dan daya pembangunan sehingga tercipta masyarakat pembangunan yang peduli lingkungan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Konsep Tridaya didalam P2KP, yaitu:

- a. Kegiatan Pemberdayaan Sosial
- b. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi
- c. Kegiatan Pemberdayaan Lingkungan

Berdasarkan tata peran institusi terkait, maka secara operasional pelaksanaan P2KP dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:



Sumber : Data Buku I Pedoman Umum Manual Proyek P2KP tahun 1999

GAMBAR 3.1
STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN P2KP

Bahwa penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dengan memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengenali masalah kemiskinan beserta problematikanya, merencanakan penanggulangannya, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara bersama-sama, berdasarkan pada Visi dan Misi P2KP, yaitu:

Visi P2KP adalah Terwujudnya masyarakat madani, yang maju, mandiri, dan sejahtera dalam lingkungan permukiman sehat, produktif dan lestari.

Sedangkan Misi P2KP yaitu Membangun masyarakat mandiri yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan.

Program penanggulangan kemiskinan perkotaan bertujuan mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman masyarakat miskin perkotaan, termasuk perbaikan/pengembangan perumahannya;
2. Mengenalkan dan membangun upaya-upaya peningkatan pendapatan secara mandiri dan berkelanjutan untuk masyarakat miskin perkotaan, baik masyarakat yang telah lama miskin, masyarakat yang pendapatannya menjadi tidak berarti karena inflasi, maupun masyarakat yang kehilangan sumber nafkah karena krisis ekonomi;
3. Terciptanya organisasi masyarakat warga yang memiliki pola kepemimpinan kolektif yang representatif, akseptabel, inklusif, tanggap dan akuntabel yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan dan memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik;
4. Memperkuat agen-agen lokal (Pemerintah, dunia usaha dan kelompok peduli) untuk membantu masyarakat miskin. (Manual Proyek P2KP, September 2002)

P2KP dilaksanakan melalui strategi-strategi, yaitu mendorong gerakan masyarakat untuk keberdayaan dan kemandirian dalam penanggulangan kemiskinan melalui:

1. Mendorong tumbuh berkembangnya prakarsa, partisipasi masyarakat serta transparansi;
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dan organisasi yang berakar dimasyarakat, khususnya dalam mengelola akses bagi masyarakat miskin ke sumber daya kunci yang disediakan oleh P2KP melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), secara transparan dan akuntabel;
3. Menjalin sinergi penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan masyarakat, melalui kemitraan antar pelaku pembangunan;
4. Mendorong tumbuhnya kepedulian berbagai pihak sebagai upaya pengendalian sosial (kontrol sosial) terhadap keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.

Dalam penyelenggaraan P2KP, semua pihak terkait harus menjunjung tinggi dan berpedoman pada nilai-nilai dapat dipercaya, ikhlas, kerelawanan, kejujuran, keadilan, kesetaraan dan kebersamaan dalam keragaman.

Sedangkan setiap pihak yang terkait dan terlibat dalam pelaksanaan P2KP harus pula bertindak dengan mengingat prinsip-prinsip Demokrasi, Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas dan Desentralisasi.

Sasaran penerima bantuan dalam P2KP adalah Masyarakat sebagai kelompok sasaran penerima manfaat P2KP yaitu warga masyarakat miskin perkotaan, sesuai dengan rumusan kriteria kemiskinan setempat yang disepakati oleh warga, termasuk didalamnya adalah masyarakat yang telah lama miskin, masyarakat yang penghasilannya merosot dan tidak berarti akibat inflasi, serta masyarakat yang kehilangan sumber nafkahnya dikarenakan krisis ekonomi.

Pengertian masyarakat dalam P2KP adalah seluruh warga kelurahan peserta P2KP baik yang kaya maupun yang miskin, kaum minoritas, pendatang dan penduduk asli setempat, yang setelah melalui proses pemberdayaan dapat menyadari dan memahami kondisi kelurahan mereka serta persoalan kemiskinan yang masih dihadapi dan sepakat perlunya mengorganisasi diri untuk menanggulangi persoalan kemiskinan tersebut secara sistematis.

Sasaran Lokasi P2KP Tahap I dilaksanakan mulai bulan nopember 1999 sampai dengan bulan nopember 2001. sedangkan P2KP Tahap II dilaksanakan pada tahun anggaran 2002-2004, mencakup lebih dari 1300 kelurahan dan desa perkotaan yang tersebar di 59 kabupaten/kota di 6 propinsi pulau Jawa yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Tingkat Pusat bersama Pemerintah Daerah. Lokasi sasaran Tahap II secara umum terletak di pantai utara pulau Jawa (Pantura) meliputi Propinsi Banten, DKI, Jabar, Jateng, Jatim ditambah DIY. P2KP Tahap I dan II ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan bagi lebih dari 5 juta jiwa, atau sekitar 1 juta KK masyarakat miskin di Wilayah perkotaan di pulau Jawa, yang memiliki pendapatan perkapita dibawah Upah Minimum Regional (UMR).

Kriteria penentuan lokasi sasaran P2KP didasarkan tiga alasan penting, yaitu:

1. Kawasan tersebut yang paling parah terkena dampak krisis ekonomi;
2. Merupakan kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan memiliki jumlah penduduk miskin relatif besar;
3. Secara geografis terletak disepanjang pantai utara pulau jawa, yang secara umum merupakan kawasan yang memiliki komunitas paling miskin dibandingkan dengan kawasan lainnya dipulau jawa.

Organisasi masyarakat harus dibentuk dalam menangani dan mengelola P2KP. Masyarakat yang sadar akan potensi dan persoalan yang masih harus diselesaikan tersebut harus mampu membentuk organisasi masyarakat warga (*civil society organization*), dengan rumusan sebagai berikut:

Organisasi masyarakat warga adalah organisasi warga yang diprakarsai dan dikelola secara mandiri oleh warga, yang secara damai berupaya memenuhi kebutuhan atau memperjuangkan kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama atau menyatakan kepedulian bersama dengan tetap menghargai hak orang lain untuk berbuat yang sama. Sifat organisasi masyarakat warga adalah terbuka (inklusif), mengakar, demokratis dengan tetap mempertahankan sifat independen dan otonom terhadap institusi pemerintah, politik, militer, keluarga, agama dan usaha .

Dengan demikian organisasi masyarakat warga yang ingin dibangun dalam P2KP adalah organisasi yang didasarkan pada ciri-ciri sukarela, kesetaraan,

kemitraan, demokrasi, kemandirian, otonomi, proaktif, semangat saling membantu, menghargai keragaman dan kedamaian. Masyarakat di Kelurahan sasaran dapat membangun Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), kemudian dilegalisasi secara hukum sebagai asosiasi/perhimpunan warga. Untuk memimpin organisasi masyarakat warga ini dipilih pimpinan kolektif yang terdiri dari pribadi-pribadi yang dipercaya warga berdasarkan kriteria kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili warga dalam berbagai kepentingan. Pimpinan kolektif warga ini kemudian secara jenerik disebut BKM. Tidak ada satupun anggota BKM yang memiliki hak istimewa (*prevailage*) dan semua hasil keputusan BKM dilaksanakan secara kolektif, melalui mekanisme rapat anggota BKM.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ini merupakan suatu kelembagaan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapatkan pendampingan dari Konsultan Manajemen Wilayah (KMW). BKM beranggotakan para tokoh masyarakat dan perwakilan KSM serta warga kelurahan setempat. BKM adalah kelembagaan yang dirancang untuk membangun kembali kehidupan masyarakat mandiri yang mampu mengatasi kemiskinannya.

Adapun BKM yang sudah dibentuk Di Kelurahan Tawang Mas Kecamatan Semarang Barat, yaitu BKM "Artha Manunggal" yang dikukuhkan dengan akta notaris Makin Amin, SH, No. 16 tanggal 15 Agustus 2003. dan yang terlibat dalam kepengurusan BKM tersebut sebanyak 17 orang.

Berdasarkan hasil Rembug Warga Tahunan (RWT) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2007, dilaksanakan reorganisasi pengurus BKM, dimana jumlah pengurus lama sebanyak 17 orang, dengan reorganisasi tersebut jumlah pengurus yang baru, yaitu 13 orang. Sedangkan kepengurusan Unit Pengelola Keuangan (UPK) masih tetap sama, hanya ada penambahan pada petugas Juru Tagih .

Dalam pengelolaan dana bantuan P2KP di kelurahan dilakukan di bawah koordinasi Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai gugus tugas BKM yang fungsinya adalah mengawasi, mengadministrasi penyaluran dan penggunaan dana bantuan ke KSM-KSM, serta mengelola dana bergulir tersebut.

Setiap kelurahan sasaran hanya akan mendapat alokasi dana satu kali selama proyek berjalan. Alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

besarnya ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di kelurahan penerima proyek, seperti tertera pada tabel Distribusi Alokasi Dana BLM, sebagai berikut:

TABEL III.5
DISTRIBUSI ALOKASI DANA BLM

Kategori	Ukuran Kelurahan				
	Sangat Kecil	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Besar
Jumlah Penduduk 1995	< 7.500	7.500 s.d 15.000	15.001 s.d 22.500	22.501 s.d 30.000	> 30.000
Jumlah Alokasi Dana BLM	Rp.100 juta	Rp.250 juta	Rp.500 juta	Rp.500 juta	Rp.500 juta
Plafond dana BLM untuk usulan atau kredit mikro per KSM	Rp. 30 Juta				

Sumber : Pedoman Umum P2KP Tahap II

Jumlah alokasi dana BLM untuk masing-masing kelurahan sasaran akan diinformasikan secara terbuka, sehingga dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat secara transparan. Dari jumlah dana BLM yang telah dialokasikan untuk masing masing kelurahan sasaran tersebut merupakan jumlah maksimum yang dapat dimanfaatkan, sedangkan jumlah pencairan yang sesungguhnya akan didasarkan pada kemampuan pengelolaan dan kesiapan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tujuan dan ketentuan P2KP.

Di Kelurahan Tawang Mas Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang jumlah penduduknya adalah 6.743 orang, terdiri 3.392 laki-laki dan 3.351 wanita. Berdasarkan pembagian ukuran wilayah kelurahan yang telah ditentukan di Kelurahan Tawang Mas Kecamatan Semarang Barat, mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dalam pencairannya secara bertahap, Tahap I sebesar 20 % untuk kegiatan fisik = Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Tahap II sebesar 50 % untuk kegiatan ekonomi produktif dan sosial = Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan pada Tahap III sebesar 30 % untuk kegiatan ekonomi produktif dan sosial = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Maka realisasi sumber dana P2KP secara keseluruhan yang diterima BKM Artha manunggal Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dengan rincian penggunaan untuk alokasi biaya operasional (BOP) 5 % = Rp

5.000.000,00 dan pada Tahap I (10 %) ada dana yang dihibahkan murni untuk alokasi pembangunan fisik pavingisasi jalan di Wilayah RW I, IV, V dan VI Kelurahan Tawang Mas Kecamatan Semarang Barat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Untuk menjamin prinsip transparansi, maka pada masyarakat dilokasi atau wilayah sasaran akan diinformasikan berapa jumlah maksimum alokasi dana bantuan untuk wilayah mereka sebagai upaya pemerataan.

Peran pokok BKM adalah menilai dan memberikan persetujuan, serta mengkoordinasikan rencana-rencana kegiatan KSM. BKM mempunyai tanggung jawab untuk merealisasikan pengelolaan dana modal bergulir di masyarakat wilayah penerimaan bantuan .

Dalam penanganan tugas P2KP sehari-hari, BKM didampingi dan dibantu oleh Konsultan Management Wilayah (KMW). Secara lebih rinci, BKM berfungsi dan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dan pemantauan kegiatan-kegiatan dan organisasi kerja KSM dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan dan kegiatan pengembangan usaha.
- b. Menyusun dan menetapkan kegiatan-kegiatan melalui KUBE untuk menjadikan usulan kerja BKM yang bersangkutan.
- c. Mengkaji dan menyetujui permintaan pencarian dana bantuan (pembangunan sarana dan prasarana dasar atau pengembangan usaha) sesuai dengan tahapan – tahapan pengerjaan dilapangan (atas persetujuan KSM)
- d. Pengelola dana P2KP melalui UPK sebagai unsur pelaksana pengelola keuangan BKM.
- e. Menjamin keterbukaan dalam penggunaan dana serta meningkatkan kesadaran atau hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan.
- f. Menyadarkan dan menyakinkan kaum perempuan dan generasi muda akan hak yang sama untuk berperan serta.
- g. Menyediakan papan informasi ditempat yang mudah dijangkau dan mengumumkan Dasar Usulan KSM, laporan kemajuan fisik dan keuangan KSM dan laporan keuangan BKM.

- h. Menyediakan kotak saran dan keluhan yang menyangkut pelaksanaan P2KP, kemudian menindak lanjuti setiap saran dan keluhan yang dimasukkan kedalam kotak saran tersebut
- i. Memberikan penghargaan terhadap usulan proyek yang baik sesuai dengan kriteria yang disepakati bersama KSM-KSM sebelum suatu kegiatan dilaksanakan.

Disamping itu pengurus BKM mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan/melaksanakan program BKM, pengurus BKM berkewajiban membuat kebijakan-kebijakan antara lain:

- a. Kebijakan dalam menentukan besar kecilnya pinjaman yang diajukan oleh KSM/anggota-anggotanya.
- b. Kebijakan dalam menentukan besar kecilnya pinjaman yang diajukan pemohon sesuai dengan permohonan pinjaman yang diajukan.
- c. Kebijakan dalam menentukan jangka waktu pengambilan pinjaman sesuai dengan permohonan pinjaman.
- d. Kebijakan dalam menentukan diterima atau ditolaknya permohonan anggota KSM.
- e. Kebijakan dalam menentukan pemberian dana hibah khusus untuk pembangunan fisik/perbaikan prasarana yang diprioritaskan dalam menunjang lancarnya program P2KP.
- f. Kebijakan yang bersifat internal BKM antara lain pengaturan anggaran belanja BKM, penerimaan tenaga administrasi dan hal-hal yang lain yang tujuannya untuk menunjang kelancaran kinerja BKM.

Pengurus BKM juga berkewajiban menyebarluaskan informasi secara terbuka yang khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kegiatan program P2KP kepada seluruh KSM anggota-anggotanya.

3.2.3 Pelaksanaan Pencairan dan Pemanfaatan Dana Bergulir

Kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP di Kelurahan Tawang Mas terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, meliputi:

1. Penentuan sasaran masyarakat miskin penerima bantuan dana bergulir.

Adapun penerimaan dana bantuan (modal) bergulir P2KP adalah perorangan dan keluarga miskin yang mempunyai usaha kecil yang kemudian didorong untuk membentuk suatu kelompok suatu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), karena pada dasarnya kelompok KSM merupakan target penerimaan program P2KP yang sesungguhnya. Kriteria penetapan keluarga miskin ditentukan oleh musyawarah warga masyarakat setempat.

KSM penerimaan bantuan P2KP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Beranggota minimal tiga orang (dari rumah tangga yang berbeda)
- b. Anggota berasal dari keluarga berpenghasilan rendah berdasarkan kesepakatan bersama antara lurah/kepala desa/tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, dan warga masyarakat lainnya.
- c. Jumlah anggota yang tidak berasal dari keluarga miskin (namun diajak bergabung karena memiliki keterampilan tertentu yang dibutuhkan), dibatasi tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota KSM.

Proses pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pelaksanaan P2KP di Kelurahan Tawang Mas yaitu para warga masyarakat mengadakan rapat pembentukan KSM dengan difasilitasi oleh pengurus BKM, dan Faskel ikut menyaksikan, setelah terjadi kesepakatan seterusnya membuat usulan kegiatan, bilamana telah disetujui oleh masing-masing anggota KSM, kemudian KSM tersebut diberi nama KSM, susunan pengurus KSM, dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota KSM, KSM minimal terdiri dari 5 s/d 6 orang, kesepakatan dalam rapat tersebut dibuat dalam Berita Acara Pembentukan KSM kemudian diketahui oleh BKM, maka KSM tersebut sudah resmi terbentuk.

Falsafah dasar dalam pembentukan KSM adalah bahwa warga miskin bukanlah "*the have not*" melainkan "*the have little*" yang mempunyai makna bahwa warga miskin itu bukannya tidak mempunyai apa-apa sama sekali melainkan mereka mempunyai "sesuatu" (*motivasi, modal, pengalaman dll) tetapi belum optimal. Oleh karena itu mereka dihimpun dalam kelompok dan difasilitasi upaya-upaya mereka sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk mengatasi persoalan mereka yang paling utama, yang berkaitan dengan peningkatan kehidupan sosial-ekonomi.

KSM bagaikan seikat sapu lidi yang jika mereka bersama-sama akan menjadi lebih kuat, tidak mudah patah dan lebih bermanfaat.

2. Penyusunan usulan kegiatan

Tiap KSM menyiapkan sebuah usulan kegiatan yang telah dibahas, disepakati serta ditandatangani oleh anggotanya. Kemudian usulan kegiatan KSM tersebut diajukan oleh pengurus KSM ke BKM untuk dianalisa kelayakannya oleh UPK. Usulan kegiatan KSM harus memenuhi kriteria:

- Sesuai peta kemiskinan dan peta swadaya
- Sesuai dengan PJM pronangkis
- Tidak termasuk daftar *negatif list*

3. Pencairan dana bergulir

Pencairan dana bergulir bisa dilaksanakan jika memenuhi kriteria:

- a. Telah dinilai kelayakannya oleh UPK
- b. Disetujui prioritas pendanaannya oleh BKM

4. Pemanfaatan dana bergulir

Pemanfaatan dana bergulir sesuai juklak dan juknis P2KP adalah untuk:

- Usaha ekonomi produktif
- Pembukaan lapangan kerja baru
- Pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana lingkungan

Tiap KSM mendapat dana hanya sekali (setidak-tidaknya sampai tidak ada lagi usulan KSM lain yang dinilai layak namun belum pernah mendapat bantuan). Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi sebanyak mungkin KSM. Kaum perempuan sangat dianjurkan untuk terlibat aktif dalam KSM dan akan mendapatkan perlakuan serta kesempatan yang sama.

Kegiatan usaha yang didanai bantuan P2KP diharapkan mengalami peningkatan dari tahun ketahun, perguliran dana bantuan P2KP yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha harus terus dijalankan agar tidak ada dana mengendap. Setiap ada pengambilan pinjaman dari KSM, maka dana itu dapat segera digulirkan kepada KSM-KSM berikutnya tanpa perlu menunggu sampai semuanya pinjaman lunas.

BAB IV

ANALISIS PARTISIPASI KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) PADA PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BERGULIR PROGRAM P2KP DI KELURAHAN TAWANG MAS

Program P2KP merupakan program yang diharapkan dapat membantu menanggulangi dan mengentaskan permasalahan kemiskinan di perkotaan yaitu melalui upaya pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Dengan kata lain program P2KP ini merupakan suatu program yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utamanya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pemeliharannya. Oleh karena itu, untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program P2KP diperlukan adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Sehingga dengan demikian diharapkan program P2KP ini dapat terus berkembang secara berkelanjutan guna membantu menanggulangi masalah kemiskinan yang terjadi di wilayahnya. Sedangkan keberhasilan suatu program pembangunan kemiskinan (Korten, 2001:110) adalah proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi sendiri.

4.1 Identifikasi Pencairan dan Pemanfaatan dana Bergulir P2KP di Kelurahan Tawang Mas

Pada bagian pembahasan ini, akan dilakukan identifikasi pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP di Kelurahan Tawang Mas. Identifikasi hanya dibatasi pada pelaksanaan program berjalan tahun 2009 dan diharapkan dapat diputuskan apakah program yang telah dilaksanakan tersebut telah sesuai dengan aturan yang tertera pada pedoman umum dan pedoman teknis.

Fokus identifikasi pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP ini adalah: 1) Pencairan dana bergulir yang meliputi penentuan sasaran

masyarakat miskin, penyusunan usulan kegiatan, pencairan dana bergulir. 2) Manfaat dana bergulir yang meliputi bentuk pemanfaatan dana bergulir, besar anggaran pinjaman bergulir, tingkat pengembalian pinjaman, tingkat kemanfaatan.

Secara lebih dalam dapat diuraikan identifikasi program pada masing-masing kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP sebagai berikut:

1. Pencairan dana bergulir

Pola penentuan sasaran penerima bantuan dana bergulir program P2KP di Kelurahan Tawang Mas yaitu masyarakat miskin yang ditentukan oleh masyarakat dan tokoh masyarakat setempat. Jadi untuk dapat menerima dana bergulir pada pencairan dana bergulir ini adalah hasil seleksi dari masyarakat dan tokoh masyarakat setempat. Seleksi terhadap sasaran penerima bantuan dana bergulir merupakan kegiatan awal dari BKM dalam mempersiapkan pelaksanaan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP.

Kondisi riil dilapangan menunjukkan bahwa yang berhak mendapatkan dana bergulir dalam pelaksanaan P2KP di Kelurahan Tawang Mas yaitu perorangan dan keluarga miskin yang berdomisili secara difinitif serta telah dinyatakan layak setelah di verifikasi oleh BKM, umumnya mempunyai usaha kecil. Kriteria kemiskinan yang dipakai adalah sesuai dengan musyawarah warga dan tokoh masyarakat, di Kelurahan Tawang Mas yang menerima dana bergulir adalah masyarakat Pra KS, KS1 dan KS2. Seleksi masyarakat miskin penerima bantuan dana bergulir seperti dinyatakan oleh Bapak Suharno selaku ketua BKM:

“Yang berhak mendapatkan dana bergulir dalam pelaksanaan P2KP di Kelurahan Tawang Mas yaitu perorangan dan keluarga miskin yang telah dinyatakan layak setelah di verifikasi oleh BKM yang umumnya mempunyai usaha kecil yang kemudian didorong untuk membentuk suatu kelompok menjadi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Kriteria kemiskinan yang dipakai adalah sesuai dengan musyawarah warga dan tokoh masyarakat, di Kelurahan Tawang Mas yang menerima dana bergulir adalah masyarakat Pra KS, KS1 dan KS2”. (Lampiran 1.1.1)

Pernyataan tentang kriteria masyarakat penerima bantuan dana bergulir program P2KP juga dikemukakan oleh Bapak Kristanto sebagai Lurah Tawangmas sebagai berikut:

“Masyarakat yang mendapatkan dana bergulir P2KP adalah warga miskin dengan

kriteria yang ditetapkan masyarakat sendiri.” (Lampiran 1.2.1)

Hal ini juga di jelaskan oleh Siti Asniyah, anggota KSM Kiper:

“Warga miskin yang ada di Kelurahan Tawang Mas, yang mempunyai usaha, penentuan masyarakat yang boleh menerima dilakukan oleh BKM dalam rebug warga.” (Lampiran 1.9.1)

Proses awal pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pelaksanaan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP di Kelurahan Tawang Mas yaitu para warga masyarakat mengadakan rapat pembentukan KSM dengan difasilitasi oleh pengurus BKM, dan Faskel ikut menyaksikan, setelah terjadi kesepakatan seterusnya kelompok tersebut membuat usulan kegiatan, bilamana telah disetujui oleh masing-masing anggota kelompok, kemudian dilakukan pemberian nama kelompok, dengan nama KSM. Adapun susunan pengurus KSM, dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota KSM, KSM di Kelurahan Tawang Mas minimal terdiri dari 5 s/d 6 orang, kesepakatan dalam rapat anggota KSM dibuat dalam Berita Acara Pembentukan KSM kemudian diketahui oleh BKM, maka KSM tersebut sudah resmi terbentuk.

Falsafah dasar dalam pembentukan KSM adalah bahwa warga miskin bukanlah *“the have not”* melainkan *“the have little”* yang mempunyai makna bahwa warga miskin itu bukannya tidak mempunyai apa-apa sama sekali melainkan mereka mempunyai *“sesuatu”* (motivasi, modal, pengalaman dll.) tetapi belum optimal. Oleh karena itu mereka dihimpun dalam kelompok dan difasilitasi upaya-upaya mereka sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk mengatasi persoalan mereka yang paling utama, yang berkaitan dengan peningkatan kehidupan sosial-ekonomi. KSM bagaikan seikat sapu lidi yang jika mereka bersama-sama akan menjadi lebih kuat, tidak mudah patah dan lebih bermanfaat.

Penyusunan usulan kegiatan dilakukan dalam rangka memperoleh akses dana bergulir program P2KP. Menurut buku pedoman P2KP, usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dan warga miskin benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat yang realistis dan mendesak, bukan sekedar usulan atau keinginan semata. Pada prinsipnya usulan kegiatan dalam program P2KP bersifat *“open menu”*, sehingga tidak ada batasan kegiatan yang dapat diusulkan masyarakat.

Meskipun demikian usulan kegiatan tersebut senantiasa berlandaskan pada aturan program P2KP.

Proses penyusunan usulan kegiatan secara riil dilapangan adalah sebagai berikut: tiap KSM menyiapkan sebuah usulan kegiatan yang telah dibahas, disepakati serta ditandatangani oleh anggotanya, kemudian usulan kegiatan KSM tersebut diajukan oleh pengurus KSM ke BKM untuk dianalisa kelayakannya oleh UPK. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Suharno:

”Proses penyusunan usulan kegiatan dimulai dari musyawarah intern anggota KSM, selanjutnya membuat proposal kegiatan lalu diajukan ke BKM”. (Lampiran 1.1.2)

Sejalan dengan pendapat tersebut, Ibu Siti Asniyah sebagai anggota KSM menyatakan:

”Warga mengadakan pertemuan untuk membentuk KSM, setelah terbentuk lalu mengajukan usulan kegiatan untuk usaha diajukan ke BKM.”(Lampiran 1.9.2)

Sedangkan inisiatif usulan program kegiatan KSM pada pelaksanaan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP ini adalah berasal dari warga masyarakat sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Suharno:

“Ide atau usulan program kegiatan KSM muncul dari kesadaran warga bahwa yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan mereka”.(Lampiran 1.1.3)

Hal ini dijelaskan pula oleh Ibu Siti Asniyah sebagai berikut:

“Ide/usulan pembentukan KSM berasal dari kesadaran, untuk mendapatkan tambahan modal usaha”. (Lampiran 1.9.3)

Bapak Tarso juga menjelaskan bahwa:

“Ikut sebagai anggota KSM karena diajak, lalu saya ikut rombongan biar dapat tambahan modal usaha”. (Lampiran 1.6.3)

Dari pendapat narasumber diatas, bisa dijelaskan bahwa pengetahuan anggota KSM dalam menyusun usulan kegiatan sudah tertanam sejak awal pembentukan KSM, mereka rata-rata mengerti cara dan prosedur penyusunan usulan kegiatan tersebut. Sedangkan inisiatif penyusunan usulan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena berasal dari aspirasi masyarakat sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pencairan dana bergulir dapat dilakukan setelah tahapan penentuan sasaran penerimaan dana bergulir dan proses penyusunan usulan kegiatan sudah

terpenuhi, menurut buku pedoman teknis program P2KP hal ini dapat dilaksanakan jika memenuhi kriteria:

1. Telah dinilai kelayakannya oleh UPK
2. Disetujui prioritas pendanaannya oleh BKM

Apabila kriteria tersebut terpenuhi, maka masyarakat ataupun keluarga miskin yang menjadi anggota KSM dapat menerima dan memanfaatkan dana bergulir. Pelaksanaan pencairan dana bergulir secara riil dilapangan juga dilakukan sesuai prosedur, dimulai dari tiap KSM mengajukan permohonan pengajuan pinjaman ke BKM, dengan dilampiri blangko identitas KSM, foto kopi KTP, Kartu Keluarga yang berdomisili di Kelurahan Tawang Mas, setelah diproses dan mendapat persetujuan dari BKM, seterusnya KSM mendapatkan undangan pengambilan dana di Kantor BKM, dengan mengisi angket kredit pinjaman bermeterai Rp.6.000,00, kesanggupan tanggung renteng bermeterai Rp.6.000,00 dan persetujuan perjanjian/tata tertib pinjaman, setelah KSM menyetujui maka dana kemudian disampaikan kepada KSM, sehingga masyarakat dapat menerima dana bergulir dan memanfaatkannya, hal ini sesuai dengan ungkapan dari Bapak Suharno:

”KSM mengajukan permohonan pengajuan pinjaman ke BKM, dilampiri dengan blangko identitas KSM, foto kopi KTP, Kartu Keluarga yang berdomisili di Kelurahan Tawang Mas, setelah diproses dan mendapat persetujuan dari BKM, seterusnya KSM mendapatkan undangan pengambilan dana di Kantor BKM, dengan mengisi angket kredit pinjaman bermeterai Rp.6.000,-, kesanggupan tanggung renteng bermeterai Rp.6.000,- dan persetujuan perjanjian/tata tertib pinjaman, setelah KSM menyetujui maka dana kemudian disampaikan kepada KSM”. (Lampiran 1.1.4)

Hal ini diungkapkan pula oleh Ibu Miftiyah anggota KSM jeruk2:

“Setelah membentuk KSM, lalu membuat usulan untuk usaha apa, mengajukan dana besarnya berapa, melengkap administrasi, lalu diteruskan ke BKM.”(Lampiran 1.7.4)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Badriyah anggota KSM Dewi Sinta:

“Proses pengajuan pinjaman dana P2KP yaitu KSM mengajukan permohonan pengajuan pinjaman ke BKM, setelah diproses dan mendapat persetujuan dari BKM, seterusnya KSM mengambil dana bergulir di Kantor BKM sesuai jadwal yang ditentukan.” (Lampiran 1.8.4)

Dari pendapat narasumber di atas dapat dijelaskan bahwa secara garis besar, anggota KSM telah mengetahui prosedur dan proses kegiatan pencairan dana bergulir dari pengajuan permohonan pinjaman sampai dengan pengambilan

dana bergulir, ada pula anggota yang menyerahkan segala sesuatunya kepada ketua KSM, sehingga pengetahuan tentang prosedur pencairan dana bergulir tidak begitu dipahami secara mendalam dan hanya menuruti apa yang dikatakan ketua KSM saja, hal ini diungkapkan oleh Bapak Tarso anggota KSM Puntodewo sebagai berikut:

“Tidak tahu karena yang mengurus ketua KSM, saya hanya diajak tanda tangan”.
(Lampiran 1.6.4)

Adanya anggota KSM yang menyerahkan segala sesuatu urusan kepada ketuanya, menunjukkan bahwa adanya kepercayaan kepada ketua untuk mengurus kebutuhan anggotanya dan keinginan masyarakat miskin untuk mendapatkan guliran dana adalah dengan proses yang sederhana dalam artian yang tidak berbelit-belit.



Sumber: Penyusun, 2009

GAMBAR 4.1 PENCAIRAN DANA BERGULIR PROGRAM P2KP

2. Pemanfaatan dana bergulir

Pemanfaatan dana bergulir sesuai buku pedoman umum P2KP adalah untuk usaha ekonomi produktif dan pembukaan lapangan kerja baru, pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana lingkungan dan pengembangan SDM. Kegiatan-kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh masyarakat, baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya, dan harus terbuka untuk diperiksa.

Pemanfaatan dana bergulir secara riil dilapangan ternyata ada yang sesuai dengan pedoman umum P2KP dan ada pula yang tidak sesuai dengan kriteria pemanfaatannya dengan kata lain terjadi pentimpangan penggunaan.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Suharno selaku ketua BKM:

“Pemanfaatan dana bergulir P2KP adalah untuk usaha ekonomi mikro atau usaha kecil karena dana yang diterima kecil dan untuk menambah modal usaha serta untuk merintis usaha baru”.(Lampiran 1.1.5)

Pemanfaatan dana bergulir yang sesuai dengan pedoman umum P2KP umumnya dipergunakan untuk usaha ekonomi produktif seperti untuk usaha roti, kelontong, salon, air bersih dan tambal ban, hal ini dinyatakan oleh Bapak Tarso:

“Dana bergulir yang kami terima untuk kegiatan usaha jual bakso, untuk anggota yang lain digunakan untuk jualan roti, kelontong dan sayuran”. (Lampiran 1.6.5)

Senada dengan hal tersebut Ibu Miftiyah mengungkapkan:

“Dana bergulir yang kami terima untuk usaha air bersih, sedangkan anggota lain digunakan untuk usaha pembuatan kerupuk, kelontong, sembako, salon, tambal ban”. (Lampiran 1.7.5)

TABEL IV.1
PEMANFAATAN DANA BERGULIR

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Usaha ekonomi produktif	66	76
2	Pembukaan Lapangan Kerja Baru	4	5
3	Pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana lingkungan	5	6
4	Lain-lain	12	14
	Jumlah	87	100

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Pada penelitian ini didapatkan fakta bahwa pemanfaatan dana bergulir untuk usaha ekonomi produktif sebanyak 66 KSM atau 76% narasumber, yang terdiri dari usaha perdagangan yang meliputi: jual makanan, minuman, sayuran, ikan, baju, warung kelontong, warung nasi, pulsa dan konter hp,

bambu, air bersih dan lain sebagainya, serta usaha dibidang jasa yang meliputi: salon, bengkel motor, penjahit, kamar kos, foto kopi, parsel dan potong rambut. Sedangkan 4 KSM atau 5% narasumber untuk membuka usaha baru, yaitu: jasa les privat dan jual gorengan. Untuk perbaikan sarana dan prasarana lingkungan sebanyak 5 KSM atau 6% narasumber, yang digunakan untuk perbaikan lantai dan atap rumah. Ternyata ditemukan fakta ada 12 KSM atau 14% dari narasumber yang memanfaatkan dana diluar ketentuan program P2KP, yaitu bukannya untuk kegiatan ekonomi produktif melainkan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekunder, keperluan rumah tangga, membayar utang dan membeli barang elektronik.

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa ada anggota KSM yang tidak punya usaha, mereka menggunakan dana bergulir untuk kegiatan lain di luar ketentuan program P2KP, hal ini diungkapkan oleh Bapak Suharno:

“Selain untuk usaha ada dana bergulir yang digunakan oleh anggota KSM yang tidak sesuai dengan usulan kegiatan, antara lain untuk kebutuhan konsumtif, untuk bayar SPP, untuk bayar utang, tetapi anggota KSM masih punya tanggung jawab moral untuk mengembalikan”.(Lampiran 1.1.6)

Sama halnya dengan pernyataan Ibu Badriyah:

“Dana bergulir P2KP saya untuk menambah kebutuhan keluarga, karena harga-harga kebutuhan rumah tangga naik, dan penghasilan keluarga tidak mencukupi.”(Lampiran 1.8.6)

Senada dengan yang diungkapkan Ibu Siti Asniyah:

“Dana bergulir pada saya ada yang dipakai untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan untuk bayar sekolah anak”.(Lampiran 1.9.6)

Dari tabel IV.2 didapatkan fakta bahwa pemanfaatan dana bergulir oleh anggota KSM yang tidak mempunyai usaha adalah 49% narasumber memanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok yaitu untuk membeli sembako, sedangkan 45% narasumber menggunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder, seperti: bayar sekolah, angsuran motor, kebutuhan lain, membeli perabot rumah tangga, sepeda, yang diinginkan, elektronik, utang, bahkan untuk pasang PDAM. Sisanya sebanyak 6% narasumber menggunakan untuk memperbaiki rumah dan perbaikan saluran air. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan dana bergulir tidak benar-benar untuk kegiatan atau kepentingan produktif seperti harapan program P2KP, karena

penggunaannya ada yang untuk kebutuhan konsumtif. Pemanfaatan yang tidak sesuai dengan pedoman akan menghambat keberlanjutan dana bergulir.

TABEL IV.2
PEMANFAATAN DANA BERGULIR ANGGOTA KSM YANG TIDAK
PUNYA USAHA

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Pemenuhan kebutuhan pokok	43	49
2	Pemenuhan kebutuhan sekunder	39	45
3	Lain-lain	5	6
	Jumlah	87	100

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Besar anggaran bergulir menurut buku pedoman P2KP adalah pada tahap pertama tidak lebih dari Rp.500.000,00 per anggota dan dapat meningkat tahap demi tahap sesuai prestasinya dan maksimum pinjaman untuk tahap-tahap berikutnya tidak lebih dari Rp.2.000.000,00. Besar anggaran yang digulirkan pada tiap KSM di wilayah Kelurahan Tawang Mas adalah sekitar Rp.5 juta sampai Rp.6 juta rupiah, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suharno:

“Besarnya pinjaman dana bergulir per KSM rata-rata 5 sampai 6 juta”.(Lampiran 1.1.7)

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Tarso:

“Besarnya dana bergulir yang KSM kami terima adalah 5 juta dibagi lima orang.”
(Lampiran 1.6.7)

Dana sejumlah Rp.5 juta sampai Rp.6 juta rupiah tersebut ternyata dirasakan cukup bermanfaat bagi masyarakat yang menerima untuk kelangsungan usaha mereka. Hal ini berdasarkan fakta yang dapat dipahami dengan melihat tabel IV.3, yang menjelaskan bahwa 1 KSM atau 1% narasumber merasakan besar untuk kelangsungan usaha, 58 KSM atau 67% narasumber menyatakan cukup besar, dan 28 KSM atau 32% narasumber menyatakan dana bergulir itu kurang besar, dengan alasan sebagai berikut: harga-harga semakin meningkat,

kurang besar untuk pengembangan usaha, tidak bisa untuk buka usaha, tidak cukup untuk modal usaha, terlalu kecil untuk perbaikan rumah.

TABEL IV.3
JUMLAH NOMINAL DANA BERGULIR UNTUK
KELANGSUNGAN USAHA

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Besar	1	1
2	Cukup	58	67
3	Kurang	28	32
	Jumlah	87	100

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Menurut buku pedoman, dana bergulir yang diterima masyarakat agar dapat “*sustainable*” dan berkembang membutuhkan komitmen dari anggota KSM untuk tepat waktu dalam mengembalikan pinjaman. Jangka waktu pengembalian pinjaman dana bergulir maksimum 12 bulan, tetapi bisa kurang dari itu tergantung jenis usaha maupun putaran usahanya. Kondisi dilapangan yang terjadi yaitu jangka waktu pengembalian pinjaman dana bergulir di Kelurahan Tawang Mas yang ditetapkan oleh BKM adalah 12 bulan, dengan setiap bulannya mengangsur sesuai dengan kemampuan anggota KSM.

Pada pelaksanaannya tingkat pengembalian pinjaman ini sebagian besar lancar, tetapi ada pula yang tidak lancar atau istilahnya “nunggak” hal ini diungkapkan oleh Bapak Suharno:

”Pengembalian pinjaman selama ini lancar-lancar saja, tetapi ada juga KSM yang ”nunggak” karena sumber pendapatan keluarga yang tidak mencukupi untuk membayar angsuran, angsuran tersebut bisa terbayar bulan berikutnya. Ada juga yang ”ndableg” tidak membayar angsuran dengan alasan yang tidak masuk akal yaitu ”tunggu warisan”.(Lampiran 1.1.8)

Sama halnya dengan yang diungkapkan Ibu Miftiyah:

”Lancar”.(Lampiran 1.7.8)

Tetapi hal ini tidak berlaku bagi Ibu Siti Asniyah yang mengalami kesulitan

untuk mengangsur pinjaman karena kebangkrutan usaha, berikut ungapannya:

”Yang pertama dulu lancar, tetapi setelah sekarang nunggak sudah 1 tahun, ini dikarenakan usaha minyak tanah saya bangkrut karena orang beralih ke gas, disamping itu beban rumah tangga juga bertambah berat sehingga saya pakai untuk keperluan rumah tangga dan untuk bayar sekolah. Saya punya kesadaran moral untuk mengangsur mas, walaupun mengangsurnya tidak sebesar kewajiban saya mengangsur, ya mungkin Rp.25.000.00 dulu, untuk kondisi saya sekarang uang Rp.80.000.00 itu sangat besar artinya dan sangat susah untuk mengumpulkannya, sekarang saya sudah tidak punya usaha lagi.”(Lampiran 1.9.8)

Dari tabel IV.4 telah ditemukan fakta bahwa pengembalian pinjaman yang lancar dilakukan oleh 52 KSM atau 60% reponden menyatakan tepat waktu dalam mengangsur, 14 KSM atau 16% narasumber menyatakan kadang tepat waktu, 21 KSM atau 24% narasumber menyatakan tidak tepat waktu mengangsur pinjaman yang disebabkan oleh: adanya anggota KSM yang bekerja di luar kota, anggotanya tidak tentu penghasilannya, anggota susah bayar, anggota yang lain belum bisa mengangsur membayar, usahanya bangkrut dan tidak punya uang untuk membayar.

TABEL IV.4
TINGKAT PENGEMBALIAN PINJAMAN

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Tepat waktu	52	60
2	Kadang tepat waktu	14	16
3	Tidak tepat waktu	21	24
	Jumlah	87	100

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Peminjam yang “nunggak” tidak berarti bebas dari sanksi, adapun sanksi yang diberikan oleh BKM Artha Manunggal jika ada anggota KSM yang menunggak adalah denda sebesar 5% dan bila sudah terlalu lama “nunggak” akan diberikan surat teguran, hal ini juga telah disosialisasikan oleh ketua BKM dalam acara pencairan dana bergulir program P2KP dan telah

dimengerti oleh seluruh anggota KSM. Pinjaman yang “nunggak” menjadi salah satu hambatan keberlanjutan dana bergulir.

Harapan dari dicairkannya dana bergulir ini menurut buku pedoman teknis P2KP adalah dapat dikelola secara bijak bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin setempat sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, hal ini berarti pemanfaatannya seharusnya dapat benar-benar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai penerima dana bergulir, apakah masyarakat benar-benar merasakan kemanfaatan dari dana bergulir, untuk memahami tingkat kemanfaatannya, berikut adalah ungkapan dari Bapak Suharno:

”Dana yang diperoleh KSM sangat bermanfaat untuk menambah modal dan pengembangan usaha mikro, ada juga untuk kebutuhan rumah tangga seperti beli beras”.(Lampiran 1.1.9)

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Tarso:

”Dana bergulir tersebut sangat bermanfaat, sangat penting artinya bagi kelangsungan usaha saya”.(Lampiran 1.6.9)

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Miftiyah:

“Dana bergulir tersebut bermanfaat untuk menambah modal usaha”. (Lampiran 1.7.9)

Dari ungkapan-ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa dana bergulir yang diterima masyarakat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, baik untuk menambah modal usaha maupun mengembangkan usaha mereka, bahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dari tabel IV.5 dapat diukur tingkat kemanfaatan dana bergulir dan didapatkan fakta bahwa 50 KSM atau 57% narasumber menyatakan besar manfaatnya, 37 KSM atau 43% narasumber menyatakan cukup bermanfaat, dan tidak ada KSM yang menyatakan dana bergulir tersebut tidak bermanfaat. Adapun alasan dari tingkat kemanfaatan yang mereka rasakan karena dana bergulir tersebut dapat digunakan untuk modal usaha, untuk menambah modal usaha, mengembangkan dan memajukan usaha, serta untuk memenuhi kebutuhan yang lain, bahkan ada alasan yang menyatakan agar bisa hidup mandiri dan ingin mempunyai penghasilan sendiri.

TABEL IV.5
TINGKAT KEMANFAATAN

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Besar manfaatnya	50	57
2	Cukup bermanfaat	37	43
3	Tidak bermanfaat	0	0
	Jumlah	87	100

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Pada pelaksanaan kegiatan pencairan dana bergulir program P2KP ternyata prosedur pelaksanaan kegiatan dari tahap penentuan sasaran masyarakat miskin, penyusunan usulan kegiatan, dan pencairan dana bergulir secara garis besar sudah diketahui masyarakat lewat pengarahan yang diadakan oleh BKM dalam forum rembung warga, namun ada beberapa prosedur yang belum berjalan dengan benar, sehingga menimbulkan adanya penyimpangan pada pemanfaatan dana bergulir program P2KP seperti penggunaannya yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dilaksanakan atau direncanakan yaitu bukan untuk kegiatan ekonomi produktif dan pembangunan sarana prasarana dasar lingkungan melainkan untuk pemenuhan keinginan serta kebutuhan konsumtif, serta masih banyaknya KSM yang “nunggak” mengakibatkan keberlanjutan dana bergulir ini mengalami hambatan. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa besar anggaran bergulir sudah sesuai dengan pedoman P2KP dan sebagian besar masyarakat menyatakan dana bergulir tersebut cukup bermanfaat bagi kelangsungan usaha mereka. Jika dilihat dari tingkat kemanfaatannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dana bergulir tersebut dirasakan sangat besar tingkat kemanfaatannya bagi sebagian besar masyarakat dan masyarakat yang lain berpendapat bahwa dana bergulir tersebut cukup bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, serta tidak ada satupun masyarakat berkata tidak ada manfaatnya. Hal ini bisa di jelaskan pada tabel IV.6 berikut:

TABEL IV.6
PERBANDINGAN PROGRAM DAN KONDISI RIIL

No.	Pedoman	Kondisi	Identifikasi	Kesimpulan
1	<p>Pencairan dana bergulir Pola seleksi sasaran kemiskinan ditetapkan oleh masyarakat dan tokoh masyarakat setempat</p> <p>Usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dan warga miskin benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat yang realistis dan mendesak, bukan sekedar usulan atau keinginan semata.</p> <p>Pencairan dana bergulir dapat jika memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dinilai kelayakannya oleh UPK - Disetujui prioritas pendanaannya oleh BKM 	<p>Perorangan dan keluarga miskin yang berdomisili secara difinitif serta telah dinyatakan layak setelah di verifikasi oleh BKM, umumnya mempunyai usaha kecil. Kriteria kemiskinan yang dipakai adalah sesuai dengan musyawarah warga dan tokoh masyarakat, di Kelurahan Tawang Mas yang menerima dana bergulir adalah masyarakat Pra KS, KS1 dan KS2.</p> <p>Tiap KSM menyiapkan usulan kegiatan yang telah dibahas, disepakati serta ditandatangani oleh anggotanya, kemudian usulan kegiatan KSM tersebut diajukan oleh pengurus KSM ke BKM</p> <p>Tiap KSM mengajukan permohonan pengajuan pinjaman ke BKM, setelah melengkapi syarat administrasi dan mendapat persetujuan dari BKM, lalu KSM mengambil dana di Kantor BKM sesuai jadwal yang ditentukan.</p>	<p>Penentuan sasaran penerima bantuan adalah warga miskin yang benar-benar membutuhkan dana tersebut, bukan untuk memenuhi keinginan saja, disini peran verifikasi BKM sangat menentukan.</p> <p>Usulan harus benar-benar sesuai kebutuhan anggota KSM</p> <p>Pencairan dana bergulir dilaksanakan setelah dinyatakan benar-benar layak oleh BKM</p>	<p>Pola seleksi sasaran kemiskinan di Kelurahan Tawang Mas sudah sesuai pedoman</p> <p>Prosedur penyusunan usulan sudah sesuai pedoman</p> <p>Prosedur pencairan dana bergulir sudah sesuai pedoman</p>
2	<p>Pemanfaatan dana bergulir Pemanfaatan dana bergulir adalah untuk usaha ekonomi produktif dan pembukaan lapangan kerja baru, pembangunan / perbaikan sarana dan prasarana lingkungan serta pengembangan SDM.</p>	<p>Pemanfaatan dana bergulir ternyata sebagian besar sesuai dengan pedoman umum P2KP dan ada pula yang tidak sesuai dengan kriteria pemanfaatannya yaitu untuk pemenuhan kebutuhan primer, sekunder dan kebutuhan</p>	<p>Pemanfaatan yang menyimpang yaitu untuk membeli kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekunder, keperluan</p>	<p>Ada penyimpangan penggunaan dana bergulir</p>

Tabel IV.2 Lanjutan...

No.	Pedoman	Kondisi	Identifikasi	Kesimpulan
	<p data-bbox="440 562 699 699">Besarnya anggaran bergulir tahap pertama tidak lebih dari Rp.500.000,00, selanjutnya maksimal Rp.2.000.000,00.</p> <p data-bbox="440 846 699 982">Maksimum jangka waktu pinjaman 12 bulan, tetapi bisa lebih kurang dari itu tergantung jenis usaha maupun putaran usahanya.</p> <p data-bbox="440 1161 699 1276">Dana bergulir dapat dikelola secara bijak bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat setempat</p>	<p data-bbox="745 352 990 405">rumah tangga lain yang sifatnya konsumtif.</p> <p data-bbox="745 562 990 636">Besarnya anggaran bergulir Rp.1.000.000,00 per anggota KSM</p> <p data-bbox="745 846 990 898">Jangka waktu pengembalian 12 bulan</p> <p data-bbox="745 1161 990 1497">Dana bergulir besar manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, baik untuk menambah modal usaha maupun mengembangkan usaha mereka, bahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.</p>	<p data-bbox="1016 352 1187 489">rumah tangga, membayar utang dan membeli barang elektronik.</p> <p data-bbox="1016 562 1187 783">Sebagian besar masyarakat menyatakan Besar anggaran bergulir cukup besar bagi kelangsungan usaha mereka.</p> <p data-bbox="1016 846 1187 1129">Tingkat pengembalian pinjaman sebagian besar lancar, ada 14 KSM yang kadang tepat waktu, 21 KSM yang tidak tepat waktu.</p> <p data-bbox="1016 1161 1187 1675">50 KSM menyatakan besar manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 37 KSM menyatakan cukup bermanfaat, dan tidak ada KSM yang menyatakan dana bergulir tersebut tidak bermanfaat.</p>	<p data-bbox="1216 562 1364 1077">Besarnya anggaran bergulir sesuai dengan pedoman dan cukup bermanfaat bagi kelangsungan usaha. Masih banyaknya KSM yang nunggak menghambat perguliran dana berikutnya.</p> <p data-bbox="1216 1161 1364 1528">Tingkat kemanfaatan dari dana bergulir untuk meningkatkan kesejahteraan sangat besar, karena tidak ada satupun masyarakat berkata tidak ada manfaatnya.</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2009



Sumber: Penyusun, 2009

GAMBAR 4.2
PEMANFAATAN DANA BERGULIR PROGRAM P2KP

4.2 Kajian Partisipasi Kelompok Swadaya Masyarakat pada Pencairan dan Pemanfaatan Dana Bergulir

Program P2KP di Kelurahan Tawang Mas Kecamatan Semarang Barat secara umum mendapat tanggapan berupa adanya respon positif dari masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam KSM yang mempunyai usaha produktif atau usaha baru yang mau menghidupkan dan mengembangkan kembali usahanya yang dilanda kebangkrutan akibat krisis ekonomi Tahun 1997.

Tanggapan terhadap kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP di Kelurahan Tawang Mas Kota Semarang yang dapat diidentifikasi berdasarkan informasi terhadap partisipasi masyarakat serta observasi lapangan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Sikap sosial

Sikap merupakan kemampuan masyarakat menyesuaikan diri terhadap nilai-nilai yang telah berkembang sesuai tuntutan kemajuan jaman (Saparian:1979:20). Sikap sosial masyarakat terkait dengan kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP di Kelurahan Tawang Mas ini adalah berdasarkan kriteria sangat mendukung, cukup mendukung, dan kurang mendukung. Untuk mengetahui sikap sosial yang ditunjukkan oleh warga Kelurahan Tawang Mas dalam penelitian ini, dapat dipahami dari pernyataan Bapak Suharno:

”Sikap atau tanggapan dari KSM di Kelurahan Tawang Mas terkait program P2KP adalah positif, karena sangat membantu perekonomian mereka.” (Lampiran 1.1.12)

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Miftiyah

”Saya sangat mendukung, karena membutuhkan modal untuk usaha.” (Lampiran 1.7.12)

Senada dengan hal tersebut Ibu Badriyah mengungkapkan:

”Saya sangat mendukung program dana bergulir P2KP ini karena sangat membantu pengembangan usaha.”(Lampiran 1.8.12)

Dari pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa KSM menanggapi positif kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP ini dengan sikap sangat mendukung, karena kebutuhan akan modal usaha dan pengembangan usaha mereka. Untuk mengetahui lebih dalam kondisi

tanggapan berupa sikap sosial dari KSM dapat dilihat pada tabel IV.7 sebagai berikut:

TABEL IV.7
SIKAP SOSIAL MASYARAKAT

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Sangat mendukung	64	74
2	Cukup mendukung	23	26
3	kurang mendukung	0	0
	Jumlah	87	100

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Dari 87 KSM yang ada, 64 KSM atau 74% narasumber menyatakan sangat mendukung adanya pelaksanaan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP, 23 KSM atau 26% menyatakan cukup mendukung dan tidak ada yang menyatakan kurang mendukung. Hal ini sangat berarti bagi keberlanjutan dana bergulir karena mendapat dukungan dari masyarakat, khususnya KSM.

b. Motivasi

Ditinjau dari motivasinya, motivasi masyarakat terjadi karena: terpaksa, ikut-ikutan dan kesadaran (khairuddin,1992:126). Motivasi yang timbul dengan adanya bantuan dana bergulir program P2KP pada KSM beragam, pada penelitian ini motivasi KSM terkait dengan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir menggunakan kriteria: terpaksa, ikut-ikutan, dan kesadaran. Sebagian besar KSM di Kelurahan Tawang Mas mempunyai motivasi dengan kesadaran untuk menambah modal dan mengembangkan usaha bahkan untuk mandiri, seperti pernyataan Ibu Upit Sarimamah:

”Motivasi warga masyarakat untuk menjadi anggota KSM adalah dengan kesadaran untuk membuka peluang usaha atau menambah modal usaha.”(Lampiran 1.5.13)

Juga dinyatakan oleh Ibu Istiqomah:

”Motivasi warga masyarakat untuk menjadi anggota KSM adalah dengan kesadaran karena ingin mandiri dan punya usaha sendiri.”(Lampiran 1.4.13)

Lain lagi pernyataan Bapak Tarso:

”Motivasi untuk menjadi anggota KSM adalah ikut-ikutan untuk mendapatkan dana bantuan bergulir.”(Lampiran 1.7.13)

Beragam motivasi untuk mendapatkan dana bergulir berkembang di masyarakat, untuk mengetahui motivasi dari seluruh KSM yang ada, dapat dilihat dari tabel IV.8 berikut:

**TABEL IV.8
MOTIVASI KSM**

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Terpaksa	3	3
2	Ikut-ikutan	8	9
3	Kesadaran	76	87
	Jumlah	87	100

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa motivasi KSM karena terpaksa mengambil dana bergulir sebanyak 3 KSM atau 3% narasumber dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan dan tidak punya uang, sedangkan 8 KSM atau 9% narasumber menyatakan ikut-ikutan dengan alasan untuk mendapatkan dana bergulir, biar dapat pinjaman, dan mumpung ada bantuan, serta 76 KSM atau 87% narasumber menyatakan kesadaran, dengan alasan untuk mendapatkan dana bergulir, karena butuh tambah modal, untuk mengembangkan usaha, biar mandiri, untuk membuka usaha, untuk memenuhi kebutuhan, untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Dari hasil penelitian tentang motivasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP ini didapatkan fakta bahwa sebagian besar masyarakat sadar akan manfaat dana bergulir ini, sehingga mereka ikut berperan serta dalam program P2KP. Motivasi yang tinggi dari masyarakat akan mempengaruhi keberlanjutan dari dana bergulir.

c. Intensitas kehadiran

Intensitas kehadiran seseorang dalam berbagai pertemuan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat (Soelaiman,1985:15-20), semakin sering kehadiran dalam suatu pertemuan, semakin besar partisipasinya. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Upit Sarimanah sebagai anggota BKM:

”Antusias anggota KSM dapat dilihat dengan intensitas kehadiran anggota KSM dalam setiap kegiatan adalah banyak yang hadir, bila ada kegiatan paling tidak ada ketua dan satu anggota yang hadir pada setiap kegiatan mewakili anggotanya.”(Lampiran 1.5.14)

Hal ini juga dinyatakan oleh Ibu Badriyah:

”Bila ada kegiatan KSM, kelompok saya selalu hadir.”(Lampiran 1.8.14)

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat diketahui dan dipahami bahwa antusiasme setiap KSM dalam mengikuti kegiatan tinggi karena dalam setiap kegiatan dihadiri oleh masing-masing KSM, paling tidak dihadiri oleh ketua dan satu anggota KSM. Untuk mengetahui lebih dalam intensitas kehadiran anggota KSM dalam setiap pertemuan dan berapa banyak yang hadir setiap KSM-nya, maka dalam penelitian ini, kriteria intensitas kehadiran anggota KSM dalam menghadiri pertemuan meliputi: selalu (hadir lebih dari 75%), sering (hadir antara 45-75%), dan kadang-kadang (hadir kurang dari 45%). Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai intensitas kehadiran dalam pertemuan terkait pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP di Kelurahan Tawang Mas, dapat dilihat pada tabel IV.9 berikut:

TABEL IV.9
INTENSITAS KEHADIRAN DALAM
PELAKSANAAN SETIAP KEGIATAN

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Selalu (hadir lebih dari 75% anggota KSM)	11	13
2	Sering (hadir antara 45%-75%)	20	23
3	Kadang-kadang (hadir kurang dari 45%)	56	64
	Jumlah	87	100

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa intensitas kehadiran dalam pelaksanaan kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir ini adalah 11 KSM atau 13% narasumber menyatakan lebih dari 75% anggotanya hadir, 20 KSM atau 23% narasumber menyatakan hadir antara 45-75%, dan 56 KSM atau 64% narasumber menyatakan kurang dari 45% anggota yang hadir.

Dari penelitian intensitas kehadiran dalam setiap pelaksanaan kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP didapatkan fakta bahwa intensitas kehadiran ditinjau dari kelompok yang hadir, yaitu KSM yang hadir adalah banyak, dalam artian semua KSM hadir dalam setiap kegiatan, namun bila ditinjau dari jumlah anggota KSM yang hadir dalam pertemuan, kehadirannya sebagian besar masih rendah, hal ini karena tidak seluruh anggota KSM bisa hadir semua dalam setiap kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir, biasanya diwakili oleh ketua KSM dan satu anggota KSM. Kehadiran dari anggota KSM sangat berpengaruh pada keberlanjutan program, karena dengan berpartisipasi menghadiri setiap kegiatan, maka akan mempengaruhi pengetahuan tentang pelaksanaan program itu sendiri, sehingga dapat melaksanakan program sesuai aturan dan hal ini dapat memperkecil penyimpangan dari pemanfaatan dana bergulir.

d. Bentuk sumbangan

Partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara langsung maupun emosional untuk memberikan sumbangan-sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi seseorang yang bersangkutan melaksanakan akan tanggung jawab untuk menyelesaikan hal tersebut (Sutarto, 1980:125). Memberikan sumbangan merupakan wujud dari partisipasi, kepedulian terhadap kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP oleh anggota KSM terhadap kelompoknya dalam wujud memberikan sumbangan akan memperkuat rasa kebersamaan dan rasa memiliki terhadap program. Berikut pernyataan Bapak Suharno:

”Bentuk sumbangan yang diberikan oleh KSM adalah berupa usulan seperti tentang mekanisme perbaikan perkembangan pengelolaan keuangan dan bentuk tenaga yaitu kesediaan hadir dalam setiap pertemuan bahkan mempersiapkan atau bersih-bersih ruang rapat, serta kegiatan lain seperti pembukaan dasaran usaha.”(Lampiran 1.1.15)

Sejalan dengan pernyataan tersebut, berikut ungkapan dari Bapak Tarso mengenai sumbangan yang pernah diberikan kepada KSM-nya:

”Sumbangan yang saya berikan pada KSM adalah berupa usulan tentang penambahan besarnya dana bergulir.”(Lampiran 1.6.15)

Dari pernyataan Bapak Suharno dan Bapak Tarso dapat dipahami bahwa bentuk sumbangan yang diberikan oleh KSM di wilayah Kelurahan Tawang Mas pada pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa sumbangan pikiran dan tenaga. Bentuk sumbangan dari KSM tersebut timbul dari aspirasi anggota KSM yang merasakan adanya kekurangan terhadap pelaksanaan program untuk tujuan perbaikan terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang, disinilah terjadi proses pembelajaran masyarakat, untuk keberlanjutan pelaksanaan program P2KP.

Untuk melihat lebih dalam lagi tentang bentuk sumbangan dari setiap anggota KSM terhadap kelompoknya, dalam penelitian ini digunakan kriteria yang meliputi: sumbangan pikiran, sumbangan materi/uang, dan sumbangan tenaga, hal ini dapat dilihat pada tabel IV.10:

TABEL IV.10
BENTUK SUMBANGAN

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Pemikiran	79	91
2	Uang/materi	0	0
3	Tenaga	8	9
	Jumlah	87	100

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 79 KSM atau 91% narasumber menyatakan memberikan bentuk sumbangan berupa pemikiran, tidak ada narasumber yang memberikan bentuk sumbangan materi/uang, dan 8 KSM atau 9% narasumber memberikan sumbangan berupa tenaga.

Hasil penelitian yang didapatkan fakta bahwa sebagian besar KSM memberikan bentuk sumbangan berupa pemikiran berupa usul untuk diadakannya pelatihan bagi KSM, agar anggota KSM membayar tepat waktu, anggota KSM benar-benar diseleksi, cara menanggulangi kredit macet, hadir disetiap kegiatan, pengucuran dipercepat, pinjaman ditambah, jangka waktu pembayaran ditambah. Tidak ada satupun KSM yang memberikan sumbangan berupa materi/uang dalam pelaksanaan kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir. Sebagian kecil KSM memberikan sumbangan berupa tenaga, yaitu datang pada pertemuan KSM dan hadir pada setiap pertemuan.

e. Kesiapan bertanggung jawab

Kesiapan bertanggung jawab merupakan elemen yang tidak bisa terpisahkan dari pengertian partisipasi (Sutarto,1980:125). Dalam berpartisipasi, bukan hanya turut serta saja, melainkan juga harus ada keterlibatan pribadi seseorang yang bersangkutan melaksanakan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan hal tersebut.

Pada pelaksanaan kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP, kesiapan bertanggung jawab ini tertera dalam aturan P2KP, baik dalam buku pedoman umum maupun pedoman teknis. Bentuk tanggung jawab yang diharapkan dari setiap KSM adalah dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu dan kesiapan tanggung renteng.

Kondisi riil di lapangan tentang kesiapan bertanggung jawab dari setiap anggota KSM adalah dalam bentuk mengembalikan dana pinjaman bergulir tepat waktu dan kesiapan untuk tanggung renteng, walaupun kesiapan untuk tanggung renteng ini dalam pelaksanaannya masih menemui hambatan karena kesadaran hukum masyarakat masih lemah, mereka berpikir bahwa masalah hutang adalah masalah pribadi anggotanya, sehingga kadang tidak semua anggota KSM dapat mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya, ada yang melunasi bulan berikutnya sesuai kemampuan, diungkapkan oleh Bapak Suharno:

”Anggota KSM bersedia untuk bertanggung jawab atas dana bergulir yaitu dalam bentuk tanggung renteng, tetapi dalam pelaksanaannya meleset, karena kesadaran hukum masyarakat masih lemah, padahal kesiapan tanggung renteng tersebut tertuang dalam akte kesepakatan secara tertulis bermeterai Rp.6000,-. Masyarakat

beranggapan bahwa urusan utang piutang adalah bersifat perseorangan.”(Lampiran 1.1.16)

Demikian juga dengan ungkapan Ibu Upit Sarimanah:

”Anggota KSM bersedia untuk bertanggung jawab atas dana bergulir yaitu dalam bentuk melunasi dana pinjaman bergulir, untuk masalah tanggung renteng mereka belum ada yang melakukan karena mereka berpikir bahwa masalah hutang adalah masalah pribadi anggotanya, sehingga kadang pengembalian tidak lengkap jumlah anggota yang membayar, ada yang melunasi bulan berikutnya sesuai kemampuan.”(Lampiran 1.5.16)

Hal ini juga senada dengan ungkapan Bapak Tarso:

”Saya bersedia untuk bertanggung jawab atas dana bergulir yang saya terima, sayang kalo kenda denda 5%. dan saya bersedia untuk tanggung renteng.” (Lampiran 1.6.16)

Untuk mengetahui lebih dalam tentang kesanggupan bertanggung jawab setiap KSM dalam mengembalikan dana bergulir yang mereka terima dan tanggung renteng, maka dalam penelitian ini digunakan kriteria: sangat bersedia, bersedia, dan tidak bersedia, hal ini dapat dilihat pada tabel IV.10 berikut:

TABEL IV.11
KESEDIAAN BERTANGGUNG JAWAB

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Sangat bersedia	25	29
2	Bersedia	62	71
3	Tidak bersedia	0	0
	Jumlah	87	100

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 25 KSM atau 29% narasumber menyatakan sangat bersedia bertanggung jawab atas dana bergulir yang diterimanya, 35 KSM atau 40% narasumber menyatakan bersedia, dan tidak ada KSM atau narasumber yang menyatakan tidak bersedia.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar KSM bersedia untuk bertanggung jawab atas dana bergulir yang diterimanya dan tidak ada narasumber yang tidak bersedia bertanggung jawab dalam mengembalikan

dana bergulir dan tanggung renteng. Anggota KSM yang tidak tepat waktu mengembalikan pinjaman, mereka mempunyai kesadaran moral untuk mengembalikan sesuai dengan kemampuannya. Pelaksanaan tanggung renteng tidak berjalan dengan semestinya karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan menganggap hutang adalah urusan pribadi masing-masing anggota KSM. Bertanggung jawab dalam mengembalikan dana bergulir dan tanggung renteng merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang mempengaruhi keberlanjutan dana bergulir, karena pada dasarnya partisipasi mendorong timbulnya rasa bertanggung jawab (Alastraire White dalam Sastropetro, 1986:32).

- f. Usulan terhadap pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP
- Salah satu bentuk kegiatan yang dapat digolongkan sebagai partisipasi adalah ikut mengajukan usul-usul mengenai suatu kegiatan (Surbakti, 1984:72-73). Usulan terhadap pelaksanaan kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP di Kelurahan Tawang Mas Kota Semarang yang dapat diidentifikasi berdasarkan informasi dari ketua BKM, Bapak Suharno dan observasi di lapangan antara lain adalah sebagai berikut:
- Pada seleksi sasaran dana bergulir hendaknya verifikasi data pemohon dana bergulir dilakukan dengan seksama dilapangan.
 - Pada Penyusunan usulan kegiatan hendaknya lebih melakukan kegiatan sosialisasi tentang KSM kepada warga masyarakat.
 - Pada pencairan dana bergulir hendaknya waktu pencairan jangan terlalu lama, kalau bisa 1 minggu hingga 2 minggu.
 - Pada besarnya anggaran dana bergulir hendaknya ditingkatkan nominal dana bergulir tersebut.
 - Pada Bentuk pemanfaatan dana tersebut sesuai usulan digunakan untuk usaha ekonomi produktif seperti salon, cukur rambut, jual es, jual gorengan, warteg dan lain-lain.
 - Pada pemberdayaan masyarakat diusulkan adanya bentuk pelatihan seperti las, bengkel, jahit dan salon
- Usulan-usulan tersebut merupakan wujud aspirasi dan partisipasi masyarakat

dalam upaya pembelajaran masyarakat (*societal learning*) untuk lebih meningkatkan kualitas kegiatan. Usulan dari masyarakat tersebut diperhatikan selama bersifat konstruktif.

Untuk dapat memahami lebih dalam tentang usulan-usulan dari setiap KSM dalam kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir, maka dalam penelitian ini digunakan lima kegiatan proses pencairan dan pemanfaatan dana bergulir, yaitu: seleksi sasaran dana bergulir, penyusunan usulan kegiatan, pencairan dana bergulir, bentuk pemanfaatan dana bergulir, dan bentuk pelatihan untuk KSM, hal ini dapat dilihat pada tabel IV.11 berikut:

TABEL IV.12
USULAN KEGIATAN

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Seleksi sasaran dana bergulir	6	7
2	Penyusunan usulan kegiatan	3	3
3	Pencairan dana bergulir	73	84
4	Bentuk pemanfaatan dana bergulir	1	1
5	Bentuk pelatihan untuk KSM	4	5
	Jumlah	87	100

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ada 6 KSM atau 7% narasumber memberikan usulan pada kegiatan seleksi sasaran dana bergulir, 3 KSM atau 3% narasumber memberikan usulan pada penyusunan usulan kegiatan, 73 KSM atau 84% narasumber memberikan usulan pada kegiatan pencairan dana bergulir, 1 KSM atau 1% narasumber memberikan usulan tentang bentuk pemanfaatan dana bergulir, dan 4 KSM atau 5% narasumber yang memberikan usulan tentang bentuk pelatihan untuk KSM.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa semua KSM berperan serta memberikan usulan terkait kegiatan pelaksanaan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan

pencairan dan pemanfaatan dana bergulir ini merupakan kegiatan yang aspiratif. Adapun usulan dari seluruh KSM sebagai berikut:

1. Pada seleksi sasaran dana bergulir program P2KP hendaknya penerima dana bergulir harus diseleksi lagi, benar-benar mempunyai usaha, dan prioritas untuk KSM yang lancar mengembalikan,.
2. Pada Penyusunan usulan kegiatan hendaknya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan juga diutamakan seperti peninggian lantai rumah dan perbaikan selokan.
3. Pada pencairan dana bergulir hendaknya waktu pencairan dipercepat, jangka waktu angsuran diperpanjang, dan jumlah pinjaman ditambah.
4. Pada Bentuk pemanfaatan dana bergulir hendaknya benar-benar untuk modal usaha.
5. Pada pemberdayaan masyarakat diusulkan adanya bentuk pelatihan ketrampilan bagi KSM.

Kesimpulan pada tahap ini adalah partisipasi masyarakat pada pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP mendapatkan tanggapan yang positif dimana sebagian besar masyarakat penerima bantuan dana bergulir sangat mendukung akan kegiatan tersebut dan tidak ada yang tidak mendukung. Hal ini dapat dilihat pada tanggapan mereka terhadap motivasinya berupa kesadaran akan manfaat dana bergulir, sehingga mereka ikut berpartisipasi, intensitas kehadiran kelompok dalam setiap kegiatan yang tinggi, walaupun bila diukur dari intensitas kehadiran anggota dalam setiap kegiatan rendah, bentuk sumbangan anggota KSM berupa pemikiran dan tenaga, serta kesediaan bertanggung jawab, walaupun sebagian masyarakat kurang berkenan untuk tanggung renteng. Usulan-usulan yang diajukan masyarakat merupakan wujud aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya pembelajaran masyarakat (*societal learning*) untuk lebih meningkatkan kualitas kegiatan. Usulan dari masyarakat tersebut diperhatikan oleh pengelola program atau BKM selama bersifat konstruktif, disini terjadi perencanaan transaktif sesuai teori Friedmann dimana pengelola program mendapatkan pengetahuan eksperimental dari KSM dan KSM belajar pengetahuan teknis dari BKM.

4.3 Menganalisa Tingkat partisipasi masyarakat pada pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP

Tingkatan partisipasi masyarakat menurut Sherry Arstein (dalam Panudju, 1999:72-76) meliputi: *Manipulation, Theraphy, Informing, Consultation, Placation, Partnership, Delegated power, dan Citizen control*. Tingkatan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP ini merujuk pada salah satu tingkatan partisipasi seperti yang telah disebutkan diatas. Untuk memahami sampai pada tingkatan partisipasi yang manakah pelaksanaan kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP di Kelurahan Tawang Mas, dapat dilihat pada penjelasan tentang jabaran peran masyarakat sebagai berikut:

a. Inisiasi

Pada tahap ini dijabarkan tentang ide awal kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP. Adapun ide awal terbentuknya KSM sebagai penerima bantuan dana bergulir adalah dari musyawarah anggota masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Suharno dan Pak Tarso:

"Ide pembentukan KSM dari warga masyarakat setempat, melalui forum intern mereka membentuk KSM."(Lampiran 1.1.19)

"Ide pembentukan KSM dari musyawarah warga masyarakat setempat."(Lampiran 1.6.19)

Hal ini di jelaskan pula oleh seluruh ketua KSM pada tabel IV.12 berikut:

TABEL IV.13
IDE AWAL TERBENTUKNYA KSM

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Dari musyawarah anggota	87	100
2	Dari pemerintah	0	0
3	Dari ikut-ikutan mendapatkan dana bergulir	0	0
	Jumlah	87	100

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa semua KSM atau 100% narasumber menyatakan bahwa ide awal terbentuknya KSM merupakan hasil dari musyawarah anggota. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa semua KSM membentuk kelompoknya atas dasar ide dari masyarakat sendiri yang menyadari akan kondisi dan kebutuhan mereka dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan berpartisipasi dalam kegiatan pencairan dan pemanfaatan program P2KP.

b. Pengelolaan

Pengelolaan kegiatan KSM dari perencanaan, pelaksanaan, pemecahan masalah dan evaluasi program merupakan wewenang penuh dari masing-masing KSM. Sedangkan bila ada permasalahan, KSM tersebut mencoba memecahkan secara intern terlebih dahulu, jika tidak terselesaikan, maka KSM tersebut meminta bantuan BKM dalam penyelesaian masalah. Hal ini disampaikan oleh Bapak Suharno:

”Ya, KSM diberikan kewenangan pengelolannya dari perencanaan, pelaksanaan, pemecahan masalah dan evaluasi program karena mereka yang tahu kondisi mereka sendiri sehingga mereka bersedia untuk bertanggung jawab. Bila ada masalah secara internal mereka memecahkan sendiri, apabila ada permasalahan yang tidak bisa terpecahkan KSM melakukan konsultasi dengan BKM. Evaluasi juga mereka lakukan dalam bentuk kesanggupan dan kedisiplinan anggota KSM untuk mengangsur.”(Lampiran 1.1.20)

Hal ini juga dijelaskan oleh semua KSM yang ada, sebagai berikut:

TABEL IV.14
KEWENANGAN KSM DALAM MENGELOLA KEGIATAN

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Ya	87	100
2	Tidak	0	0
3	Tidak tahu	0	0
	Jumlah	87	100

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Dari tabel di atas didapatkan fakta bahwa semua KSM atau 100% narasumber menyatakan bahwa KSM diberikan wewenang penuh dalam mengelola kegiatan mereka sendiri dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pemecahan masalah hingga evaluasi program, sebab mereka sendiri yang tahu kondisi riil dan kebutuhan masing-masing anggota KSM.

c. Keputusan

Dalam pelaksanaan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP ini, keputusan tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh KSM ada pada kelompok itu sendiri. Mereka berhak untuk menentukan program apa yang bermanfaat bagi kelompoknya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Suharno:

”Ya, mereka berhak menentukan program yang bermanfaat bagi mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan yang urgent dan prioritas, yang mengetahui mereka sendiri.”(Lampiran 1.1.21)

Hal ini di jelaskan pula oleh seluruh anggota KSM pada tabel IV.14 berikut:

TABEL IV.15
KEWENANGAN KSM DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Sangat berhak	35	40
2	Berhak	52	60
3	Tidak berhak	0	0
	Jumlah	87	100

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa 35 KSM atau 40% narasumber menyatakan sangat berhak untuk membuat keputusan tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan 52 KSM atau 60% narasumber menyatakan berhak untuk membuat keputusan, serta tidak ada KSM yang menyatakan tidak berhak.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa semua KSM berhak untuk membuat keputusan terkait dengan kegiatan apa yang akan mereka laksanakan, karena

yang mengetahui kebutuhan riil anggotanya adalah kelompok atau masyarakat sendiri.

d. Peran Pemerintah

Peran pemerintah khususnya pemerintahan kelurahan pada kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP pada tahun 2009 ini adalah sebagai fasilitator dan mediasi jika terjadi masalah yang tidak bisa ditangani oleh BKM. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Kristanto Triyono, S.Sos. selaku Lurah Tawang Mas:

“Peranan pemerintah kelurahan adalah sebagai fasilitator, diantaranya menyediakan fasilitas tempat untuk kantor BKM, dan sebagai pengawas roda organisasi BKM.”(Lampiran 1.2.4)

Senada dengan hal tersebut, berikut pernyataan Bapak Suharno selaku ketua BKM Artha Manunggal:

”Peran pemerintah pada kegiatan ini adalah sebagai fasilitator dan mediasi jika terjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh BKM.” (Lampiran 1.1.22)

Untuk lebih mengetahui peran pemerintah dalam kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir ini, berikut pernyataan dari masing-masing KSM tentang peran pemerintah yang bisa kami jelaskan pada tabel IV.15:

TABEL IV.16
PERAN PEMERINTAH KELURAHAN

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Sebagai pengelola program	0	0
2	Sebagai fasilitator	78	90
3	Tidak berperan	9	10
	Jumlah	87	100

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar KSM, yaitu sebanyak 78 KSM atau 90% narasumber menyatakan bahwa peran pemerintah kelurahan pada kegiatan ini adalah sebagai fasilitator dan ada 9 KSM atau

10% yang menyatakan tidak berperan, serta tidak ada yang menyatakan pemerintah sebagai pengelola program.

Untuk dapat memahami kondisi mengapa ada KSM yang menyatakan tidak ada peran pemerintah dalam kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir, berikut tanggapan dari Ibu Siti Asniyah anggota KSM Dewi Sinta:

”Peran pemerintah pada kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir kelihatannya belum ada.” (Lampiran 1.8.22)

Senada dengan pernyataan tersebut, berikut argumen dari Ibu Siti Asniyah anggota KSM Kiper:

”Peran pemerintah kelurahan pada proses pencairan dan pemanfaatan dana bergulir ini belum ada, buktinya tidak hadirnya wakil dari pemerintah pada saat pencairan dana bergulir.” (Lampiran 1.9.22)

Dari argumen-argumen anggota KSM diatas, dapat dipahami bahwa peran pemerintah kelurahan belum dirasakan oleh anggota KSM karena ketidakhadiran dalam kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP. Hal ini menunjukkan bahwa program P2KP di Kelurahan Tawang Mas bisa berjalan secara mandiri, walaupun peran pemerintah kelurahan tidak tampak nyata di mata masyarakat.

Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa peran pemerintah hanya sebatas sebagai fasilitator kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP dan sebagai mediasi jika ada permasalahan KSM yang tidak bisa diatasi oleh BKM.

e. Campur tangan pemerintah bila ada masalah

Pada pelaksanaan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP ini, campur tangan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi belum muncul, hal ini dikarenakan belum ada permasalahan KSM yang sampai pada pemerintah, khususnya pemerintah Kelurahan Tawang Mas. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Kristanto Triyono, S.Sos. selaku Lurah Tawang Mas:

”Bila ada permasalahan pada KSM, tidak ada dari pemerintah kelurahan tekanan/paksaan untuk mengatasinya. Pemerintah kelurahan menawarkan kepada BKM untuk sebagai mediasi penyelesaian masalah atau jika tidak bisa ditangani oleh BKM, tetapi selama ini belum ada laporan permintaan penyelesaian masalah dari

BKM, jadi BKM tidak bermasalah atau dengan kata lain BKM di Kelurahan Tawang Mas adalah BKM sehat.”(Lampiran 1.2.5)

Dari ungkapan diatas, dapat dimengerti bahwa apabila timbul permasalahan pada KSM, pemerintah dalam menyelesaikannya dengan tanpa tekanan/paksaan. Pemerintah menawarkan sebagai mediator untuk penyelesaian masalah, jika permasalahan tersebut tidak bisa ditangani oleh BKM. Namun selama program berjalan, belum timbul permasalahan yang sampai melibatkan penanganan dari pihak pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Suharno sebagai ketua BKM:

”Sejauh ini pada pelaksanaan program P2KP di Kelurahan Tawang Mas belum ada permasalahan yang melibatkan pihak pemerintah kelurahan, apabila ada masalah diselesaikan dahulu secara internal oleh BKM melalui pembinaan, kemudian membuat surat pernyataan.”

Untuk memahami lebih dalam tentang penyelesaian masalah KSM oleh pemerintah apakah ada tekanan atau tanpa tekanan dari pemerintah, berikut pada tabel IV.16 adalah pendapat dari seluruh KSM yang ada:

TABEL IV.17
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMECAHAN MASALAH KSM

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Ada dengan tekanan/paksaan	0	0
2	Ada dengan memberi masukan	0	0
3	Tidak ada	87	100
	Jumlah	87	100

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 87% KSM atau 100% narasumber menyatakan bahwa peran pemerintah dalam pemecahan masalah KSM tidak ada.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tidak ada peran pemerintah dalam pemecahan masalah KSM, hal ini disebabkan oleh permasalahan yang ada pada KSM diselesaikan dahulu secara intern oleh kelompoknya, apabila tidak

berhasil, maka diserahkan kepada BKM. Selama program berjalan, permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan oleh KSM dan BKM, jadi permasalahan dapat diselesaikan tanpa campur tangan dari pemerintah.

Sesuai dengan uraian diatas, dapat dipahami bahwa peranan masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat menempatkan partisipasi Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Tawang Mas terhadap pelaksanaan kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP sesuai teori Sherry Arnstein berada pada tingkatan *delegated power* dimana partisipasi mendapat tempat dan apresiasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk dukungan baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemecahan masalah maupun evaluasi program dan kelompok masyarakat merasa bahwa ide awal pembentukan KSM adalah merupakan ide masyarakat sendiri, pengelolaan program ada pada masyarakat sendiri, adanya limpahan kewenangan pada masyarakat untuk membuat keputusan dan peran pemerintah dalam pemecahan masalah tanpa paksaan. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek program juga sebagai subjek yang turut serta dalam pelaksanaan dan mengontrol jalannya program.

4.4 Sintesis Analisis

Sebagai rangkuman atas uraian hasil pengamatan lapangan pada sub bab terdahulu, maka didapatkan sintesa sebagai berikut:

1. Pada pelaksanaan tahap kegiatan pencairan dana bergulir yang meliputi kegiatan penentuan penerima dana bergulir atau sasaran masyarakat miskin, penyusunan usulan kegiatan, pencairan dana bergulir sudah sesuai dengan pedoman umum maupun pedoman khusus P2KP. Tetapi kegiatan pemanfaatan dana tersebut pada pelaksanaannya terjadi penyimpangan yaitu untuk membeli kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekunder, keperluan rumah tangga, membayar utang dan membeli barang elektronik. Masih banyaknya KSM yang nunggak menghambat perguliran dana berikutnya, hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi atau keuangan yang pas-pasan dan hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari, dan juga disebabkan oleh usaha yang mereka lakukan pembelinya sepi dan tidak mendapat keuntungan,

sehingga belum bisa menyisihkan untuk mengangsur/mengembalikan pinjaman. Tingkat kemanfaatan dari dana bergulir untuk meningkatkan kesejahteraan sangat besar.

Jadi dari hasil analisis didapatkan faktor penghambat dan pendorong kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir. Adapun faktor yang menghambat keberlanjutan kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir adalah:

- Adanya penyimpangan dalam pemanfaatan dana bergulir
- Adanya anggota KSM yang tidak mempunyai usaha
- Adanya anggota KSM yang mengangsur tidak tepat waktu atau “nunggak”

Faktor pendorong keberlanjutan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir adalah:

- Besar anggaran dana bergulir dirasakan oleh sebagian besar penerima manfaat adalah cukup besar bagi kelangsungan usaha mereka
- Dana bergulir yang mereka terima dirasakan oleh sebagian besar penerima manfaat adalah sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan mereka.

2. Kajian partisipasi KSM pada pencairan dan pemanfaatan dana bergulir ini mendapatkan hasil bahwa respon atau tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir adalah positif, hal ini dibuktikan dengan adanya sebagian besar KSM menyatakan sangat mendukung program tersebut, dengan kesadaran akan manfaat dana bergulir ini mereka berpartisipasi, sebagian besar KSM memberikan bentuk sumbangan berupa pemikiran dan bersedia bertanggung jawab dalam mengembalikan pinjaman dana bergulir serta tanggung renteng. Setiap kegiatan pada pencairan dan pemanfaatan dana bergulir ini selalu dihadiri oleh seluruh KSM, tetapi sangat disayangkan bahwa intensitas kehadiran anggota dalam kelompok, yaitu KSM pada setiap kegiatan masih rendah. Semua KSM berperan serta memberikan usulan terkait kegiatan pelaksanaan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir ini merupakan kegiatan yang aspiratif.

Jadi dari hasil analisis kajian partisipasi KSM pada pencairan dan pemanfaatan dana bergulir didapatkan pula faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat pada kegiatan ini, sebagai berikut:

Faktor penghambat partisipasi masyarakat:

- Masih ada motivasi KSM untuk mendapatkan dana bergulir karena terpaksa dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan dan tidak punya uang.
- Intensitas kehadiran anggota KSM yang masih rendah pada setiap kegiatan.
- Belum diterimanya tanggung renteng sebagai bentuk tanggung jawab oleh anggota KSM.

Faktor pendorong partisipasi masyarakat:

- Sikap sosial masyarakat Kelurahan Tawang Mas yang mendukung pelaksanaan kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir
 - Motivasi yang tinggi timbul dari kesadaran masyarakat akan manfaat dari program ini
 - Intensitas kehadiran KSM yang tinggi dalam setiap kegiatan
 - Bentuk sumbangan dari anggota KSM berupa pikiran dan tenaga
 - Kesiediaan bertanggung jawab para penerima manfaat dana bergulir
 - Adanya usulan dari seluruh KSM
3. Peranan masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat menempatkan partisipasi Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Tawang Mas terhadap pelaksanaan kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP berada pada tingkatan *delegated power* sesuai dengan teori Sherry Arnstein, dimana partisipasi mendapat tempat dan apresiasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk dukungan baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemecahan masalah maupun evaluasi program dan kelompok masyarakat merasa bahwa ide awal pembentukan KSM adalah merupakan ide masyarakat sendiri, pengelolaan program ada pada masyarakat sendiri, adanya limpahan kewenangan pada masyarakat untuk membuat keputusan dan peran pemerintah dalam pemecahan masalah adalah dengan tanpa paksaan.

Pelaksanaan kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir di kelurahan Tawang Mas Kota Semarang masih terdapat sisi lemah yang menghambat keberlanjutan program, masih terdapat faktor penghambat dalam

partisipasi masyarakat, walaupun peran masyarakat sudah berada pada tingkat *delegated power*, dimana masyarakat mendapat kewenangan penuh mengelola dana bergulir, namun masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini memerlukan partisipasi aktif dari *stakeholder* dalam hal ini pemerintah kelurahan, BKM, KSM sebagai penerima manfaat untuk mensukseskan jalannya program, agar program tersebut dapat terus berlanjut dan mendapat dukungan dari masyarakat sehingga tercapai tujuan dari program tersebut yaitu dapat menanggulangi permasalahan kemiskinan di wilayahnya. Partisipasi aktif penerima manfaat telah menumbuhkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat untuk membangun wilayahnya, oleh karena itu dengan dukungan dan kewenangan dari masyarakat untuk mengelola program seharusnya mampu menaggulangi kemiskinan di wilayah kelurahan Tawang Mas secara mandiri dan berkelanjutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir pembahasan tentang Kajian Partisipasi KSM pada Pencairan dan Pemanfaatan Dana Bergulir Program P2KP di Kelurahan Tawang Mas Kota Semarang dapat dirumuskan suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tahap kegiatan pencairan dana bergulir sudah sesuai dengan pedoman umum maupun pedoman khusus P2KP. Tetapi kegiatan pemanfaatan dana tersebut pada pelaksanaannya terdapat hambatan berupa terjadinya penyimpangan pemanfaatan dana bergulir, ada anggota yang tidak punya usaha dan ada anggota yang “nunggak”. Hal ini menghambat perguliran dana berikutnya, yang juga berarti memperlama proses pengentasan kemiskinan di wilayah kelurahan Tawang Mas dan membutuhkan partisipasi aktif dari penerima manfaat dana bergulir.
2. Partisipasi penerimaan manfaat dana bergulir berupa tanggapan dan usulan tentang pelaksanaan kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir ternyata sudah muncul. Tanggapan masyarakat adalah positif, hal ini dibuktikan dengan adanya sebagian besar KSM menyatakan sangat mendukung program tersebut, dengan kesadaran akan manfaat dana bergulir ini mereka berpartisipasi, sebagian besar KSM memberikan bentuk sumbangan berupa pemikiran dan bersedia bertanggung jawab dalam mengembalikan pinjaman dana bergulir, walaupun pelaksanaan tanggung renteng dirasa masih berat untuk dilaksanakan. Kehadiran kelompok dalam hal ini KSM dalam setiap kegiatan adalah selalu hadir, walaupun intensitas kehadiran anggota KSM pada setiap kegiatan rendah, karena sebagian besar hanya 1-2 orang yang mewakili KSM-nya. Semua KSM berperan serta memberikan usulan terkait kegiatan pelaksanaan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir ini merupakan kegiatan yang

aspiratif. Partisipasi aktif penerima bantuan ini menentukan keberlanjutan kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP.

3. Peran masyarakat penerima manfaat dana bergulir sebagai bentuk partisipasi masyarakat menempatkan partisipasi Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Tawang Mas terhadap pelaksanaan kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP berada pada tingkatan *delegated power* sesuai dengan teori Sherry Arnstein, dimana partisipasi mendapat tempat dan apresiasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk dukungan baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemecahan masalah maupun evaluasi program dan kelompok masyarakat merasa bahwa ide awal pembentukan KSM adalah merupakan ide masyarakat sendiri, pengelolaan program ada pada masyarakat sendiri, adanya limpahan kewenangan pada masyarakat untuk membuat keputusan dan peran pemerintah dalam pemecahan masalah adalah dengan tanpa paksaan. Hal ini menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, yang pada penelitian ini adalah kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP.
4. Bahwa partisipasi masyarakat pada tingkatan *delegated power* di Kelurahan Tawang Mas tidak menjamin keaktifan anggota KSM dalam berpartisipasi, dimana masih terdapat intensitas kehadiran tiap anggota dalam setiap pertemuan masih rendah dan masih tidak diterimanya pertanggungjawaban dalam bentuk tanggung renteng.
5. Bahwa penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan membutuhkan partisipasi aktif dan hanya dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dengan memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat untuk mengenali masalah kemiskinan beserta problematiknya, merencanakan penanggulangannya, melaksanakan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara bersama-sama.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mencoba memberikan rekomendasi sebagai masukan untuk menindaklanjuti permasalahan

yang dihadapi KSM, dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP kedepan, sehingga dapat menunjang keberhasilan program P2KP yang lebih tinggi di Kelurahan Tawang Mas Kecamatan Semarang Barat.

Adapun rekomendasi tersebut sebagai berikut :

- a. Para pengurus BKM harus lebih aktif melakukan pendampingan untuk memantau, mengawasi dan turun langsung ke KSM yang diindikasikan tidak sehat (KSM yang tidak lancar dalam membayar angsuran), agar pemanfaatan dana pinjaman berjalan sesuai dengan pedoman P2KP.
- b. Hendaknya kehadiran seluruh anggota KSM dalam kegiatan pencairan dana bergulir dijadikan syarat pencairan oleh BKM sehingga sosialisasi tentang pemanfaatan dana bergulir dapat langsung dipahami oleh anggota KSM untuk mencegah penyimpangan pemanfaatan dana bergulir.
- c. BKM hendaknya memberikan ”reward” atau penghargaan kepada para KSM yang tepat waktu dalam pengangsuran pinjaman, dimaksudkan sebagai motivasi agar para KSM tepat waktu dalam membayar angsuran berupa Insentif , bisa berbentuk finansial maupun cinderamata yang menarik.
- d. Hendaknya ketua KSM memberikan motivasi dan pembinaan terhadap para anggota KSM yang angsuran pinjamannya tidak lancar.
- e. BKM hendaknya bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang yang difasilitasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Semarang membentuk suatu Lembaga Koperasi, hal ini sebagai upaya pengembangan jasa simpan pinjam serta usaha ekonomi kecil produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Budihardjo, Eko. 2003. *Beberapa Ungkapan Sejarah Penataan Ruang Indonesia 1948-2000*. Jakarta:Departemen Kimpraswil.
- Burke, Edmund M. 2004. *Sebuah Pendekatan Partisipatif dalam Perencanaan Kota (Terjemahan A Participatory Approach to Urban Planning)*. Bandung:Penerbit Yayasan Sugijanto Soegijoko.
- Dahl. 1963. *Democracy and Its Critics*.
- Rondinelli, Denis A.1990. *Proyek Pembangunan Sebagai Manajemen Terpadu: Pendekatan Adaptif Terhadap Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara.
- Hadi, Sudharto P. 2001. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*.Yogyakarta:Gajahmada University Press.
- Hall, Anthony, Midgley James, Hardiman, Margareth, Narine, dhanpaul. 1986: *Community Participation, Social Development and State*. London: Methven & Co.
- Iskandar, Jusman. 1994. *Strategi Dasar Membangun Kekuatan Masyarakat*. Jakarta:Rajawali.
- Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung:Penerbit ITB.
- Kantor Infokom. 2008. *Profil Kota Semarang*. Semarang.
- Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat Tinjauan aspek sosiologi, ekonomi dan perencanaan*. Yogyakarta:Liberty.
- Komarudin. 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Pemukiman*. Jakarta:Yayasan Realestat Indonesia- PT. Rakasindo.
- Korten, C. David. 1984, *Contributions Toward Theory adn Planning Framework, Pembangunan Yang Memihak Rakyat*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Strategi dan Peluang*. Jakarta:Erlangga.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi. 1982. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta:PT. Prasetia Widya Pratama.
- Midgley, James. 1986. *Community Participation, Social Development and The State*, Methuen, London.
- Miles, Matthew B. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru (Terjemahan *Qualitative Data Analysis* oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Nurhadi.2007. *Mengembangkan Jaminan sosial, Mengentaskan Kemiskinan*.Yogyakarta:Media Wacana.
- Panudju, Bambang. 1999. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta masyarakat Berpenghasilan rendah*. Bandung:Penerbit Alumni.
- Parwoto, MDS. 1997. *Pembangunan Partisipatif*. Makalah pada Loka karya Penerapan Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Pemukiman, 15-16 juli 1997 BKSNI. Jakarta.

- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis Dalam Suatu Kebijakan Publik*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Rohidi, Tjetjep Rohendi. 2000. *Ekspresi Seni Orang Miskin: Adaptasi Simbolik Terhadap Kemiskinan*. Bandung: Nuansa.
- Saiful, Arif. 2000. *Menolak Pembangunanisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, Singgih. 2003. *Statistik Diskriptif Konsep dan Aplikasi dengan MS Excel dan SPS*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Saparian Ny. 1979. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia.
- Sastropoetro, Santoso. 1986. *Partisipasi, Komunitas, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: PT. Alumni.
- Slamet Y. 1992. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soegijoko, Budi Tjahyati S. 2003. *Beberapa Ungkapan Sejarah Penataan Ruang Indonesia 1948-2000*. Jakarta: Departemen Kimpraswil.
- Soetomo. 2006. *Strategi-Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. 1995. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Jaya.
- Soetrisno, Loekman. 2004. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Jakarta: Kanisius.
- Sugiyono. 2002. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2007. *Pemberdayaan Sosial, Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Sunarso Hs dan Joh. Mardimin. 1996. *Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suparjan, Suyatno Hempri. 2003. *Pengembangan Masyarakat : Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Sutarto. 1980. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Surbakti, Ramlan A. 1984. *Kemiskinan di Kota dan Program Perbaikan Kampung*. Prisma No. 6, Jakarta: LP3ES.
- Toha, Miftah. 1986. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Verianto ST. 1979. *Kapita Selekta Indonesia*. Yogyakarta: Paramita.
- Wibisana, Gunawan. 1989. *Partisipasi Masyarakat dalam Proses peremajaan Pasar*, Thesis. Program Pembangunan Wilayah dan Kota. ITB Bandung.
- Yeung, Y. M. And T. G. Mc Gee, ed. 1986. *Community Paricipation in Delivering Urban Services in Asia*. IDRC. Ottawa.
- Manual Proyek, *Pedoman Umum Buku Satu P2KP*. Penerbit Sekretariat P2KP Pusat, Desember 1999.
- Manual Proyek, *Pedoman Teknis P2KP Tahap II*. Penerbit Sekretariat P2KP.
- Manual Proyek, *Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)*. Penerbit Sekretariat P2KP.
- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999, GBHN. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang.

